



UNIVERSITAS PERTAHANAN

**RESOLUSI KONFLIK PEMBEBASAN
LAHAN PERTANIAN UNTUK PEMBANGUNAN
BANDARA INTERNASIONAL JAWA BARAT (BIJB)
DI KECAMATAN KERTAJATI KABUPATEN MAJALENGKA**

**SURI LESMANAWATI
NIM: 120170303030**

Tesis yang Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
dalam Mendapatkan Gelar Magister Pertahanan

**FAKULTAS KEAMANAN NASIONAL
PROGRAM STUDI DAMAI DAN RESOLUSI KONFLIK**

**BOGOR
Februari 2019**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Suri Lesmanawati lahir di Bogor, 28 Oktober 1977, Agama Islam, Anak kedua dari pasangan alm. Bapak Nurjen dan Ibu Cicih, tinggal di Perumahan Griya Bukit Jaya Blok M14 No. 33 Desa Tlajungudik Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor. Menyelesaikan pendidikan SD di SDN Ciriung IV Kabupaten Bogor lulus tahun 1989, SMP Negeri 2 di Cibinong kabupaten Bogor lulus tahun 1992, melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas di SMEA PGRI Cibinong Kabupaten Bogor lulus 1995, kemudian tahun 2008 sampai dengan 2010 melanjutkan Diploma II di STIT INSIDA Jakarta, kemudian tahun 2011 melanjutkan S-1 di Universitas Pakuan Bogor lulus tahun 2013, dan pada tahun 2017 melanjutkan program Magister (S-2) di Universitas Pertahanan.

Peneliti saat ini masih aktif sebagai guru di SDIT Fajrul Amanah Gunungputri Bogor. Peneliti mengawali pekerjaan/karier di SDIT Fajrul Amanah dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2010, kemudian dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 mengemban tugas sebagai guru honorer di SDN Tlajungudik 05, kemudian dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 mengemban tugas sebagai guru honorer di SDN Gunungputri 05 kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor.

Menikah dengan Ating.P.Suwarna pada tanggal 3 Januari 1996 di Bogor, dan dikaruniai 3 orang anak yaitu: Andika Priambudi, Afifah Fitri Rahayu dan Aditya Dharma Saputra.

LEMBAR PENGESAHAN

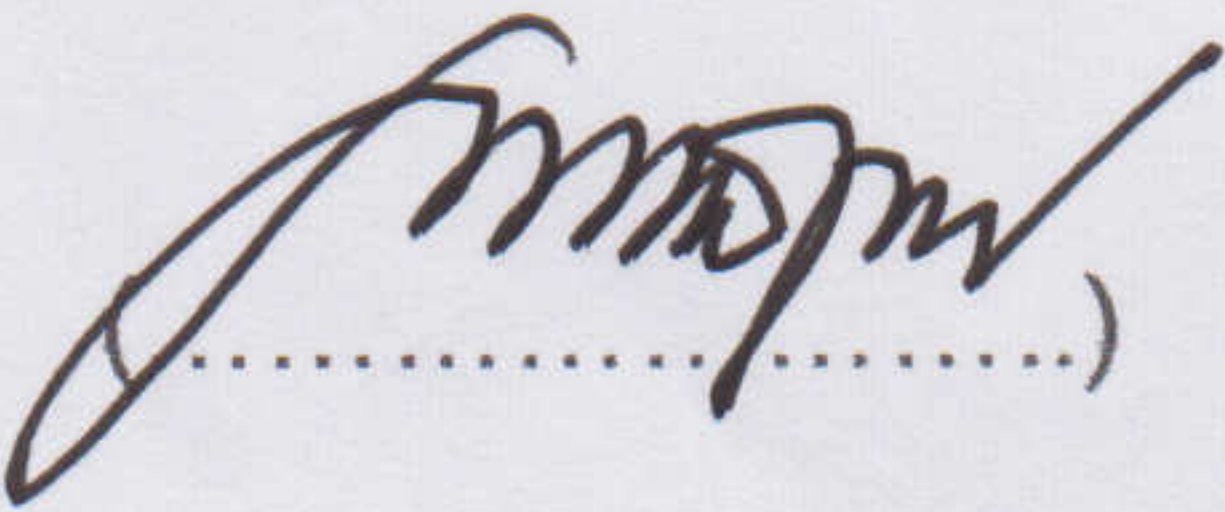
Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Suri Lesmanawati
NIM : 120170303030
Program Studi : Damai dan Resolusi Konflik
Judul : Resolusi Konflik Pembebasan Lahan Pertanian
Untuk Pembangunan Bandara Internasional Jawa
Barat (BIJB) di Kecamatan Kertajati Kabupaten
Majalengka

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan di terima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Pertahanan pada Program Studi Damai dan Resolusi Konflik Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Mayjen TNI (Mar/Purn)
Dr. Syaiful Anwar, M.A., M.Bus.



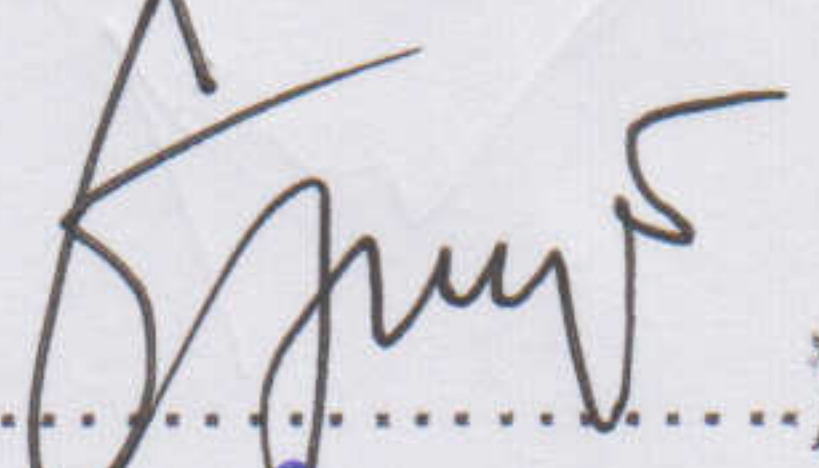
(.....)

Pembimbing II : Mayjen TNI Lasmono, M.Si (Han).



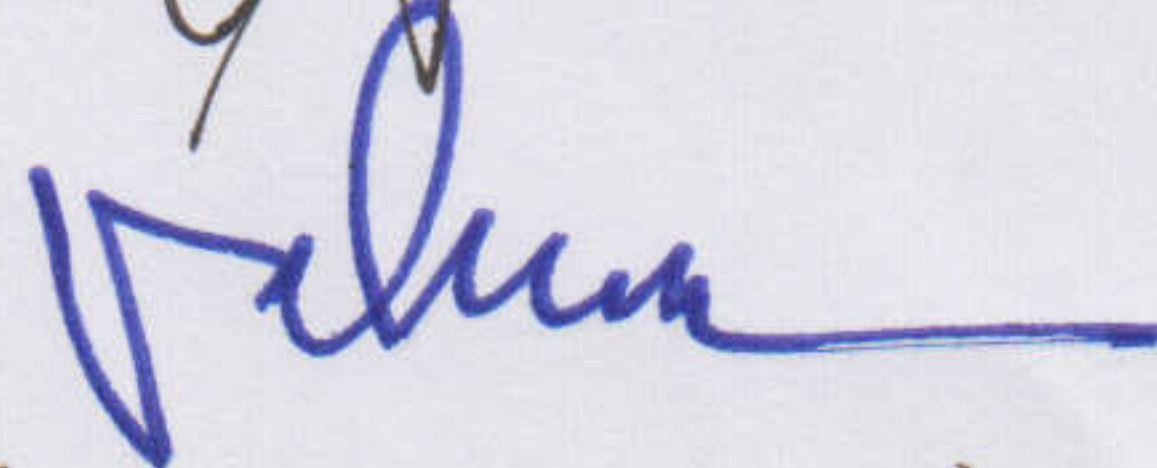
(.....)

Penguji I : Mayjen TNI Sudibyo, S.E., D.S.S., M.Si.



(.....)

Penguji II : Laksma TNI
Dr. M. Adnan Madjid, S.H., M.Hum.



(.....)

Penguji III : Kol. Inf.Dr. Bambang Wahyudi, M.M., M.Si.



(.....)

Ditetapkan di : Bogor

Tanggal : Februari 2019

PERNYATAAN ORISIONALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya atau bagian karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang apapun di suatu Perguruan Tinggi; dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat istilah, frasa, kalimat, paragraf, subbab atau bab dari karya yang pernah ditulis atau diterbitkan; kecuali yang secara tertulis diajukan dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiat dalam tesis ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan/undang-undang yang berlaku.

Bogor, Februari 2019



Suri Lesmanawati

**PERSYARATAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Suri Lesmanawati

NIM : 120170303030

Program Studi : Damai dan Resolusi Konflik

Fakultas : Keamanan Nasional

Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pertahanan Hak Bebas Royalty Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas ilmiah saya berjudul :

**Resolusi Konflik Pembebasan Lahan Pertanian untuk Pembangunan
Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kecamatan Kertajati
Kabupaten Majalengka**

Beserta perangkat yang ada jika diperlukan. Dengan Hak Bebas Royalty Noneksklusif ini Universitas Pertahanan berhak menyimpan, Mengalihmediakan/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta/Karya Intelektual dari tesis ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bogor, Februari 2019


Suri Lesmanawati

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penyusunan tesis dengan judul: "Resolusi Konflik Pembebasan Lahan Pertanian untuk Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka" dapat diselesaikan.

Penyusunan tesis ini ditujukan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister pada Program Studi Damai dan Resolusi Konflik Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan.

Penyusunan tesis ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Letjen TNI Dr.Tri Legionosuko,SIP,MAP Rektor Universitas Pertahanan yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan di Universitas Pertahanan, serta memberikan arahan bimbingan dan fasilitas dalam penyusunan tesis.
2. Laksamana Muda TNI Siswo Hadi Sumantri, S.T., M.MT Dekan Keamanan Nasional yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta memberikan ijin penelitian dalam penyusunan tesis ini.
3. Kolonel Inf. Dr. Bambang Wahyudi, M.M., M.Si Sebagai Sesprodi Program Studi Damai dan Resolusi Konflik yang telah memberikan motivasi dan saran-saran yang sangat membangun dalam penyelesaian tesis ini.
4. Mayjen TNI (Mar/Purn) Dr.Syaiful Anwar,M.A., M.Bus selaku Pembimbing I yang telah memberikan saran dan masukan serta dorongan dalam menyelesaikan tesis ini.

5. Mayjen TNI Lasmono, M.Si (Han) selaku Pembimbing II yang telah memberikan saran dan masukan serta dorongan dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Jajaran dosen-dosen pengajar di Universitas Pertahanan, terutama dosen-dosen yang mengajar di kelas Damai dan Resolusi Konflik yang selalu memberikan dukungan serta memberikan waktu untuk mendidik dan membimbing.
7. Pemerintah Kabupaten Majalengka dan beserta jajaran instansinya yang telah banyak membantu untuk kelancaran selama penelitian.
8. Keluarga tercinta, suami dan anak-anak serta orang tua dan kakak adik yang senantiasa mendukung dan menyemangati dalam penyelesaian tesis ini.
9. Teman-teman Program Studi Damai dan resolusi Konflik yang selalu menyemangati baik pada saat pembelajaran maupun dalam penyelesaian tesis, serta teman-teman di Pleton A 4 Universitas Pertahanan yang selalu mendukung satu dan lainnya dalam aktifitas di gunung bunder dan pada saat matikulasi.
10. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan-kebaikan berbagai pihak atas bantuannya.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih kurang sempurna, oleh karena itu dengan kerendahan hati mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi menunjang kesempurnaan penelitian ini.

Akhirnya, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu pertahanan dan bermanfaat bagi *stake holder* terkait dalam upaya penyelesaian konflik pertanahan khususnya konflik pembebasan lahan pertanian yang banyak terjadi di Indonesia.

Bogor, Februari 2019

Suri Lesmanawati

ABSTRAK

RESOLUSI KONFLIK PEMBEBASAN LAHAN PERTANIAN UNTUK PEMBANGUNAN BANDARA INTERNASIONAL JAWA BARAT (BIJB) DI KECAMATAN KERTAJATI KABUPATEN MAJALENGKA

SURI LESMANAWATI

Pembangunan Infrastruktur dalam bidang transportasi akan menciptakan konektivitas nasional dan internasional serta pertumbuhan ekonomi yang lebih maju serta berpengaruh signifikan terhadap pertahanan dan keamanan nasional. Pembangunan berbagai Infrastruktur merupakan proyek strategis nasional yang sedang dikembangkan saat ini. Salah satu yang menjadi proyek strategis nasional adalah Bandara BIJB Kertajati di Kabupaten Majalengka. Dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur yang perlu diperhatikan adalah adanya konflik antara masyarakat dan pemerintah terkait dengan pembebasan lahan, Konflik ini terjadi di Kecamatan Kertajati tepatnya di Desa Sukamulya yaitu bentrokan pada saat pengukuran lahan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional yang menyertakan ribuan aparat keamanan. Bandara sebagai salah satu bentuk pertahanan dan keamanan negara akan terhambat jika dalam pembangunan terjadi konflik. Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisis konflik dan resolusinya dalam pembebasan lahan untuk pembangunan bandara BIJB Kertajati. Metode yang dipergunakan yaitu metode kualitatif menggunakan teori kerangka dinamis, konsep eskalasi deeskalasi Glasl dan Ramsbohtam, teori Galtung, serta pendekatan kearifan lokal. Adapun hasil penelitian didapatkan bahwa konflik terjadi dikarenakan beberapa faktor yaitu kurangnya sosialisasi dan komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, tidak adanya kesepakatan harga yang diinginkan masyarakat, adanya pembangunan rumah hantu serta intimidasi dan keterlambatan dalam proses pembayaran. Upaya resolusi yang dilakukan yaitu dengan mediasi dan cipta kondisi damai dengan penguatan struktur ekonomi serta pendekatan kearifan lokal. Kesimpulan yang didapat pada penelitian ini adalah konflik sudah berhasil diturunkan ekskalasinya namun masih bersifat damai negatif, belum tercapainya damai positif karena masih ada beberapa kelompok masyarakat yang tidak bersedia lahannya terdampak pembebasan akibat pembangunan bandara BIJB Kertajati.

Kata kunci: Konflik, Resolusi konflik, Cipta kondisi damai dan Pembebasan lahan

ABSTRACT

CONFLICT RESOLUTION OF AGRICULTURAL LAND EXEMPTION FOR DEVELOPMENT OF WEST JAVA INTERNATIONAL AIRPORT (BIJB) IN KERTAJATI DISTRICT, MAJALENGKA REGENCY

SURI LESMANAWATI

Infrastructure development in the field of transportation will create national and international connectivity and more advanced economic growth and have a significant effect on national defense and security. Development of various infrastructures is a national strategic project that is currently being developed. One of the national strategic projects is the BIJB Kertajati Airport in Majalengka Regency. In carrying out infrastructure development that needs to be considered is the conflict between the community and the government related to land acquisition. This conflict occurred in Kertajati Subdistrict, precisely in Sukamulya Village, namely clashes when measuring land by the National Land Agency which included thousands of security forces. Airports as a form of state defense and security will be hampered if there is conflict in the construction. The purpose of this study is to analyze the conflict and resolution in land acquisition for the construction of the BIJB Kertajati airport. The method used is a qualitative method using a dynamic framework theory, the concept of escalation of deescalation of Glasl and Ramsbohtam, Galtung's theory, and local wisdom approaches. The results of the study found that conflict occurred due to several factors, namely the lack of good socialization and communication between the government and the community, the absence of price agreements desired by the community, the construction of haunted houses and intimidation and delays in the payment process. Resolution efforts are carried out, namely by mediating and creating peaceful conditions by strengthening the economic structure and approach to local wisdom. The conclusions obtained in this study are that the conflict has succeeded in being lowered, but still has a peaceful negative nature, it has not yet achieved positive peace because there are still several community groups who are not willing to acquire land affected by the construction of BIJB Kertajati airport.

Keywords: Conflict, Conflict resolution, Create peace conditions and Land acquisition

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISIONALITAS	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
 BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.4.1 Manfaat Teoritis	13
1.4.2 Manfaat Praktis	13
1.5 Ruang Lingkup dan Desain Penelitian	13
1.5.1 Ruang Lingkup	13
1.5.2 Desain Penelitian	14
 BAB 2 KAJIAN TEORITIK	
2.1 Kajian Teoritik.....	16
2.1.1 Teori Konflik	16
2.1.1.1 Teori SAT	20
2.1.1.2 Model Konsep Eskalasi Glasl	23
2.1.1.3 Nilai Tanah	26

2.1.2	Resolusi Konflik.....	29
2.1.2.1	Teori Galtung	30
2.1.2.2	Model Eskalasi dan Deeskalasi Ramsbotham.....	34
2.1.2.3	Pendekatan <i>Local Wisdom</i> (Kearifan Lokal)	35
2.1.3	Konsep Keamanan Nasional	36
2.1.4	Undang-Undang Pertanian/Agraria	40
2.1.5	Undang-Undang Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan umum	42
2.1.6	Undang-undang Kebijakan umum Pembangunan Bandara	43
2.2	Penelitian Terdahulu	43
2.3	Kerangka Pemikiran	57

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1	Tempat dan Waktu Penelitian	58
3.1.1	Tempat Penelitian	58
3.1.2	Waktu Penelitian	58
3.2	Subjek dan Objek Penelitian	59
3.2.1	Subjek Penelitian	59
3.2.2	Objek Penelitian	61
3.3	Teknik Pengumpulan Data	61
3.3.1	Observasi	61
3.3.2	Wawancara	62
3.3.3	Studi Pustaka	62
3.3.4	Dokumentasi	63
3.4	Pemeriksaan Keabsahan Data	63
3.5	Tekhnik Analisis Data	65

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Hasil Penelitian	67
4.1.1	Gambaran Umum	67
4.1.1.1	Objek Penelitian Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka.....	67

4.1.1.2 Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati	72
4.1.1.3 Penggunaan Lahan Pertanian untuk Pembangunan Bandara BIJB Kertajati	82
4.1.2 Konflik Pembebasan Lahan Pertanian untuk Pembangunan Bandara BIJB Kertajati	86
4.1.3 Resolusi Konflik Pembebasan Lahan Pertanian untuk Pembangunan Bandara BIJB Kertajati	107
4.2 Pembahasan.....	118
4.2.1 Analisis Penyebab Terjadinya Konflik Pembebasan Lahan Pertanian untuk Pembangunan Bandara BIJB Kertajati	119
4.2.2 Resolusi Konflik Pembebasan Lahan Pertanian untuk Pembangunan Bandara BIJB Kertajati	139
BAB 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	
5.1 Kesimpulan	171
5.2 Rekomendasi	174
DAFTAR PUSTAKA	177
LAMPIRAN	183
LAMPIRAN 1. SURAT PENELITIAN	
LAMPIRAN 2. PEDOMAN WAWANCARA	
LAMPIRAN 3. DOKUMEN PENDUKUNG	
RIWAYAT HIDUP PENELITI	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Sumber Terjadinya Konflik.....	20
Gambar 2.2 Kerangka Pencegahan dan resolusi Konflik.....	21
Gambar 2.3 Posisi Rekonsiliasi dalam konflik	32
Gambar 2.4 <i>Conflict Escalation and de-escalation model</i>	33
Gambar 2.3 Kerangka pemikiran	57
Gambar 3.1 Komponen analisis data kualitatif.....	65
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Majalengka	72
Gambar 4.2 Konsep <i>Aerocity</i> Bandara BIJB Kertajati	74
Gambar 4.3 Lokasi Bandara BIJB Kertajati	77
Gambar 4.4 Lokasi 7 Desa yang terdampak pembangunan.....	80
Gambar 4.5 <i>Master Plan</i> Bandara BIJB	82
Gambar 4.9 Skema Pemangku Kepentingan.....	142

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Tingkatan Model Eskalasi Glasl.....	23
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu.....	49
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian	59
Tabel 3.2 Subjek Penelitian	60
Tabel 4.1 Akar Konflik	133
Tabel 4.2 Eskalasi dan Deeskalasi Konflik	151

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan suatu tujuan untuk menciptakan kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran bagi masyarakat Indonesia. Hal ini tercantum di dalam Undang Undang Dasar tahun 1945 alinea ke IV.¹ Pada saat ini Indonesia merupakan negara berkembang yang memang dalam hal ini sedang melakukan pembangunan dari berbagai sektor, baik dalam bidang kelautan atau kemaritiman, bidang ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, sumber daya dan lingkungan hidup, maupun dalam bidang infrastruktur. Pembangunan infrastruktur ini salah satunya adalah yang akan menunjang transportasi penerbangan, baik penerbangan domestik maupun penerbangan Internasional.

Pengertian pembangunan itu sendiri dapat dikatakan sebagai suatu proses perubahan atau suatu proses pembaharuan yang terus menerus dapat dilakukan serta berkelanjutan, dari suatu keadaan semula yang masih belum berkembang menjadi berkembang serta dapat menuju kearah perbaikan yang lebih baik lagi dimasa mendatang. Untuk itu maka hal ini akan melibatkan seluruh sumber daya yang ada dan dapat di manfaatkan demi terciptanya kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang berkualitas baik. Dalam pembangunan berbagai sektor ini diharapkan dapat menuju kepada kesejahteraan yang semakin maju, serta mandiri dan merata di seluruh wilayah.

Pembangunan yang dilakukan pemerintah tidak hanya di tingkat perkotaan namun merambah hingga ke tingkat pedesaan. Hal ini sangat

¹ Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada Alinea ke 4 berbunyi: Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

dibutuhkan demi kemajuan suatu negara yang menuju kearah perbaikan di seluruh sektor yang ada, tidak hanya dilingkup perkotaan namun juga merata di lingkup pedesaan.

Pembangunan infrastruktur yang berfungsi sebagai roda penggerak laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah untuk meningkatkan taraf kehidupan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat mempunyai peran yang sangat penting di dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Menurut Stiglitz tujuan utama dalam pembangunan adalah adanya transformasi masyarakat dengan tujuan yang terukur. Masih menurut Stiglitz, Strategi pembangunan memiliki fungsi sebagai penentu prioritas dan adanya kesadaran akan pentahapan, melakukan koordinasi baik antar pemerintah, pemerintah dengan swasta, maupun antar swasta.²

Infrastruktur menurut definisi *Oxford Dictionaries* adalah struktur fisik dan organisasi dasar seperti bangunan, jalan, pasokan energi yang diperlukan untuk beroperasinya masyarakat dan institusi. Sejumlah manfaat infrastruktur yaitu adanya konektivitas antar suatu wilayah atau negara, kemudian akan meningkatkan produktivitas suatu wilayah, meningkatkan efisiensi dalam alokasi sumber daya, mempercepat pemerataan pembangunan yang ada di suatu wilayah atau negara dan juga akan mendorong investasi baru yang masuk kewilayah atau ke negara tersebut. Namun sebaliknya jika ketidaktersediaan infrastruktur yang memadai maka akan berdampak buruk bagi suatu wilayah atau negara seperti rendahnya kualitas hidup, kesulitan dalam pemberantasan kemiskinan, serta menurunkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing. Oleh karena itu setiap negara berupaya untuk menambah ketersediaan

² Joseph E. Stiglitz, seorang pemenang Nobel dalam bidang ekonomi, adalah Profesor Universitas di Universitas Columbia dan Kepala Ekonom di Institut Roosevelt, lahir 9 Februari 1943 adalah seorang pakar ekonomi, pengarang, dan peraih penghargaan Nobel bidang Ekonomi (2001) Stiglitz saat ini mengajar di Graduate School of Business di Columbia University dan menjadi editor jurnal *The Economists*, *Voice* bersama Bradford DeLong dan Aaron Edlin. Ia juga menjadi anggota Dewan Penasihat untuk Oxford Council on Good Governance. Selain memberikan banyak kontribusi di bidang ekonomi mikro, Stiglitz juga beberapa kali memegang jabatan yang bersifat membuat kebijakan. Ia pernah menjabat sebagai ketua Dewan Penasihat Ekonomi Presiden AS pada masa pemerintahan Bill Clinton (1995 - 1997). Di bank dunia, ia menjabat sebagai Wakil Ketua Senior dan Ekonom Kepala (1997 - 2000)

infrastruktur dalam rangka percepatan pembangunan , baik pembangunan ekonomi maupun sosial guna meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih sejahtera.³

Dalam agenda Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, ada Sembilan program yang di sebut sebagai NAWACITA .⁴ Dalam program ini digagas untuk dapat menunjukkan keutamaan perubahan yang didalamnya bertujuan untuk membawa Indonesia mampu menjadi mandiri dalam bidang ekonomi dan kepribadian dalam kebudayaan.

Adapun yang tertuang dalam agenda program NAWACITA tersebut yaitu: 1. Kami akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, 2. Kami akan membuat pemerintah yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, 3. Kami akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, 4. Kami akan memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya, 5. Kami akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, 6. Kami akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya, 7. Kami akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, 8. Kami akan melakukan revolusi karakter bangsa, 9. Kami akan memperteguh ke-Bhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Adapun ciri utama dari program NAWACITA yaitu negara hadir, membangun dari pinggiran, dan revolusi mental. Untuk mencapai

³ Sulistijo Sidarto Mulyo, M.T., Budi Santoso, Proyek Infrastruktur dan Sengketa Konstruksi, Depok Februari 2018 hlm 1-2

⁴ Bappenas, Visi Misi Program Aksi Ir.H Joko Widodo dan Drs. H.M.Jusuf Kalla Pemilu Presiden dan wakil Presiden tahun 2014 melalui situs [www.kpu.go.id/koleksigambar/Visi Misi JOKOWI-JK.pdf](http://www.kpu.go.id/koleksigambar/Visi_Misi_JOKOWI-JK.pdf) , dan SIMPUL PERENCANA Diterbitkan oleh Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Bappenas , Volume 29 Tahun 14, April 2017 melalui situs <http://pusbindiklatren.bappenas.go.id/file/bukuterbit/SIMPUL%20Vol.%2029%20-%20April%202017.pdf>

Sembilan NAWACITA itu maka harus di mulai dari pondasi yang kokoh salah satunya adalah dengan percepatan pembangunan nasional. Infrastruktur dalam hal ini sebagai pengungkit utama produktifitas dan daya saing bangsa, karena dengan pembangunan infrastruktur yang komprehensif maka hal ini dapat menciptakan konektivitas nasional dan pertumbuhan ekonomi yang lebih maju. Infrastruktur yang signifikan dan komprehensif merupakan proyek strategis nasional yang sedang dikembangkan pada saat ini.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 yang dijelaskan bahwa pembangunan merupakan salah satu upaya dalam pertahanan dan keamanan negara sebagai upaya pencapaian cita-cita negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945.⁵

Melihat tahapan pembangunan dalam RPJPN 2005-2025, Indonesia sudah mengarah kepada tranformasi masyarakat, karena tujuan akhir dari RPJM 4 adalah mewujudkan masyarakat yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang, dengan struktur perekonomian di segala bidang dan dengan struktur perekonomian yang kokoh dan berlandaskan keunggulan kompetitif. Saat ini kita masuk kedalam periode RPJMN ke 3 yaitu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Namun ukuran dari keberhasilan pembangunan di Indonesia masih berupa peningkatan PDB (Produk Domestik Bruto), meskipun sudah mempertimbangkan faktor-faktor seperti kemiskinan, infrastruktur, dan pendidikan.⁶

Pembangunan bandara sebagai salah satu bentuk pertahanan dan keamanan negara akan terhambat jika dalam pembangunan tersebut terjadi konflik. Untuk pembangunan dibutuhkan sarana dan prasarana berupa lahan yang memadai. Dalam pembangunan bandara ada kriteria khusus dimana hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik

⁵ Bappenas, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025

⁶ Putra Windhu, Perekonomian Indonesia penerapan beberapa Teori Ekonomi pembangunan di Indonesia, Rajawali Pers, Depok 2018. hlm 35-36

Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan.⁷ Dalam pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur, salah satu yang perlu diperhatikan dan diantisipasi adalah potensi adanya konflik dalam pembebasan lahan untuk pembangunan terhadap pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.⁸

Sesuai Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Hal ini disebutkan bahwa untuk segera melakukan penyelesaian masalah dan hambatan dalam pelaksanaan proyek strategis nasional, serta memberikan dukungan dalam percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Pembangunan bandara BIJB Kertajati ini adalah merupakan salah satu dari 225 proyek strategis yang dicanangkan oleh pemerintah. Mega Proyek itu dikuatkan dengan dikeluarkannya Perpres No 30/2015 , serta PP No.3/2016.⁹

Pembangunan bandara BIJB Kertajati sudah direncanakan dan telah dilakukan studi kelayakan sudah dimulai sejak 2003. Penetapan lokasi pertama pada tahun 2005 akan tetapi izin penetapan lokasi di ulang pada tahun 2012 dengan memasukkan kewajiban pendanaan APBN. Selama tujuh tahun tidak ada kegiatan fisik apapun dan izin penetapan lokasi yang lama hangus serta pekerjaan pembangunan tidak kunjung di mulai, Pekerjaan baru dimulai kembali pada tahun 2014 untuk pengerjaan pembersihan lahan dan pondasi.¹⁰ Kemudian terbit kembali Peraturan Presiden No 30 Tahun 2015 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan

⁷ PP NO 70 Tahun 2001 pada Bab 3 tentang penetapan lokasi, Penguasaan dan penggunaan tanah, perairan serta ruang udara di Bandar udara umum.

⁸ Sulistijo Sidarto Mulyo,M.T , Budi Santoso Proyek Infrastruktur dan sengketa Konstruksi, Depok: Prenadamedia Group, Februari 2018

⁹ PP no 30 tahun 2015 tentang perubahan ketiga atas peraturan presiden nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum , serta PP no 3 tahun 2016 tentang percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang berisi 225 Proyek nasional. dimana Bandar udara terdapat dalam daftar proyek strategis nasional pada bagian F .Proyek Pembangunan bandar udara baru No urut 83.

¹⁰ Fiki Ariyanti, Liputan 6 judul 10 Fakta Menarik soal Bandara kertajati di Majalengka melalui situs <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3537128/10-fakta-menarik-soal-bandara-kertajati-di-majalengka> tanggal 24 Mei 2018.

umum (Infrastruktur), serta PP No.3/2016 tentang percepatan pelaksanaan yang menjadi dasar atas pembangunan tersebut benar-benar akan dilanjutkannya kembali.

Bandara BIJB Kertajati merupakan bandara yang rencananya akan menjadi bandara terbesar kedua setelah bandara Soekarno Hatta, karena bandara ini di bangun seluas 1800 hektare dan memiliki landas pacu atau *runway* yang saat ini berukuran panjang 2500 dan lebar 60 Meter dan akan diperpanjang menjadi 3000 Meter. Bandara ini dapat menampung kurang lebih 5,6 Juta penumpang pada tahap pertama pembangunannya. Hal ini menjadi menarik untuk di teliti ketika tahun 2004 sudah ada wacana pembangunan namun kemudian sempat terhenti, dan baru dimulai kembali pembangunan pada tahun 2014 yang mana dalam hal ini penolakan kembali terjadi dalam beberapa tahun walaupun eskalasinya masih kondisi turun naik, Sampai kemudian terjadilah puncak konflik pada tanggal 17 Nopember 2016 yang melibatkan ribuan aparat keamanan dan masyarakat, baik masyarakat yang kontra maupun masyarakat yang pro dengan pembangunan bandara BIJB Kertajati ini.

Pembangunan Bandara BIJB Kertajati ini menimbulkan dampak yaitu adalah adanya penolakan dari masyarakat setempat yang memang lahan pertanian selama ini sebagai mata pencahariannya harus tergusur karena adanya pembangunan ini. Beberapa penolakan telah dilakukan oleh masyarakat setempat terhadap lahan pertanian mereka yang terkena gusuran, yang merupakan dampak dari adanya pembangunan bandara BIJB Kertajati tersebut. Penolakan pembebasan lahan pertanian ini berakhir bentrok pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016. Tanah yang akan di ukur di Desa Sukamulya mencapai 382 bidang. Desa Sukamulya terletak di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka memiliki luas sekitar 735 hektare, dan kawasan tersebut menjadi salah satu yang akan digunakan untuk lahan Bandara BIJB Kertajati yang membutuhkan lahan sekitar 1.800 hektare untuk

bandaranya sendiri dan 3200 hektare untuk pengembangan pusat bisnis Aerocity sebagai sarana pendukung bandara Kertajati.¹¹

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional maka dilakukanlah proses pengukuran lahan di Desa Sukamulya. Pengukuran lahan yang dilakukan oleh pihak BPN menjadi terhambat dan mendapatkan penolakan dari masyarakat Desa Sukamulya. Kabupaten Majalengka merupakan daerah pertanian dengan luas lahan yang dimiliki warga yang dipergunakan untuk pertanian yaitu sekitar 66,45% dari seluruh wilayah luas lahan yang ada di Kabupaten Majalengka. Di kabupaten ini sektor pertanian memang paling mendominasi dalam struktur perekonomian di Kabupaten Majalengka. Dalam satu kali panen dengan luas tanah 1 hektare rata-rata mencapai hasil 7 Ton, dan dalam satu tahun bisa dua kali panen. Rata-rata hasil dari pertanian ini berupa palawija dan juga cabai. Tidak adanya transparansi dan komunikasi yang baik terhadap masyarakat menjadi salah satu pemicu konflik yang ada. Namun dengan seiring berjalannya waktu maka pembebasan lahan tetap dilakukan dengan berbagai kesepakatan harga antara kedua belah pihak. Adapun warga yang telah memperoleh dana dari pembebasan tersebut kebanyakan pindah dan membeli lahan di wilayah yang tidak jauh dari lokasi Kecamatan Kertajati.

Dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pasti menimbulkan pro dan kontra, dan hal ini merupakan kondisi alami yang timbul diakibatkan hubungan sebab akibat ini, Namun dalam pembangunan Bandara BIJB Kertajati ini konflik yang eskalasinya tinggi terjadi pada bulan Nopember tahun 2016. Konflik yang pernah ada ini sebagian telah terselesaikan dengan beberapa upaya yang dilakukan. Upaya dan langkah apa saja yang dilakukan ini merupakan suatu hal

¹¹ Anugrah Perkasa, CNN Indonesia, 9 Agustus 2016, dengan judul *BPN Ukur Tanah hari ini, Petani Majalengka siaga*
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160809082804-20-150071/bpn-ukur-tanah-hari-ini-petani-majalengka-siaga?>

menarik yang menjadikan ini memerlukan perhatian dari berbagai pihak terutama *stake holder* yang ada di wilayah tersebut. Konflik yang pernah ada di tahun 2016 ini tidak menyurutkan atau menghentikan pembangunan. Pembangunan tetap dilanjutkan bahkan telah diresmikan oleh presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 8 Juni 2018 lalu, dan saat ini bandara Kertajati sudah mulai beroperasi yaitu penerbangan dari maskapai Citilink dengan rute Kertajati-Surabaya.

Di kecamatan Kertajati ada yang memanfaatkan lahan kosong untuk di bangun sebuah rumah yang tidak di huni, karena bentuknya hanya seperti bangunan bedeng yang di buat dari bangunan setengah tembok, dan setengahnya lagi terbuat dari papan seadanya yang mana tujuan dari pendirian rumah ini adalah untuk mendapatkan penggantian bangunan oleh pemerintah. Bangunan ini berada di atas tanah yang terkena dampak perluasan penggusuran pembebasan tanah yang akan di bangun untuk bandara BIJB Kertajati. Dalam hal ini penduduk setempat biasa menyebutnya sebagai “Rumah Hantu”, namun hal ini tentu saja dianggap pemerintah sebagai kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang dengan sengaja memanfaatkan situasi yang terjadi dengan menginginkan ganti kerugian lebih besar atas bangunan rumah hantu tersebut.

Pengadaan tanah secara luas mengandung 3 unsur yaitu :1. Kegiatan untuk mendapatkan tanah, dalam rangka pemenuhan kebutuhan lahan untuk pembangunan kepentingan umum, 2. Pemberian ganti rugi kepada yang terkena kegiatan,3. Pelepasan hubungan hukum dari pemilik tanah kepada pihak lain. Dalam hal ini prosedur hukum pengadaan tanah harus disertai dengan pelepasan atau penyerahan hak dari pemegang hak atas tanah kepada pihak lain. Pelepasan hak itu sendiri bisa berupa jual beli, penyerahan, hibah atau pencabutan. Khusus pelepasan yang berlaku untuk pengadaan tanah dalam arti penyerahan dengan ganti rugi, atau

pelepasan hak sepihak dengan pencabutan hak yang dilakukan oleh pemerintah.¹²

Setiap pengadaan lahan untuk kepentingan umum di daerah maupun di seluruh Indonesia selalu timbul masalah yang serius, diantara permasalahan itu adanya para pemilik tanah untuk mempertahankan hak kepemilikannya, atau tidak bersedia untuk dibebaskan tanahnya. Dalam upaya untuk mempertahankan haknya atas tanah itu pada umumnya bukan semata-mata melakukan upaya yang bersifat yuridis akan tetapi kadang kala upaya yang bersifat gerakan moral dan gerakan fisik yang kadang-kadang mengarah ke anarkis.¹³ Selain itu banyaknya spekulasi-spekulasi yang bermain didalamnya, hal ini dikarenakan jarak antara isu pembangunan dengan pelaksanaan yang sangat jauh, sehingga peluang permainan harga oleh spekulasi tersebut pasti ada dan akan berdampak kepada konflik yang eskalasinya semakin tinggi.

Setiap ada pembebasan tanah yang khususnya pembebasan tanah untuk pembangunan kepentingan umum, sebagian masyarakat sudah mempunyai anggapan dan sangkaan bahwa dirinya pasti akan mengalami kesengsaraan, Karena ganti rugi yang di dapat tidak seimbang dengan harga pasaran, yang berarti masyarakat yang demikian akan kehilangan tempat tinggal.¹⁴ Hal ini pula yang menjadi salah satu adanya penolakan yang dilakukan oleh warga masyarakat di Desa Sukamulya Kecamatan Kertajati atas pembangunan Bandara BIJB Kertajati yang berdampak kepada beralihnya fungsi lahan yang merupakan mata pencaharian warga masyarakat, yang dalam hal ini masyarakat tentu tidak dengan mudah untuk beralih profesi dari petani ke usaha lainnya, walaupun tidak menutup kemungkinan bagi sebagian orang bisa beradaptasi cepat dengan kondisi lingkungan yang ada.

¹² Mudakir Iskandar syah SH.,M.H Pembebasan tanah untuk pembangunan kepentingan umum, Permata Aksara, Jakarta 2015, hlm 3

¹³ *Ibid* hlm 21

¹⁴ *Ibid* hlm 23

Dengan seiring berjalannya waktu setelah konflik terjadi ada berbagai upaya mediasi yang telah dilakukan sehingga bandara BIJB Kertajati tetap diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 8 Juni 2018 lalu. Proses pembebasan lahan pertanian serta rumah warga yang terdampak pembangunan juga masih terus dilakukan. Dari target penyediaan lahan baru sekitar 1.050 hektare yang dibebaskan, dari 1800 hektare target pembebasan lahan yang akan dilakukan.

Terkait penggantian lahan milik masyarakat ini di ganti dalam bentuk uang, Adapun warga masyarakat di Kecamatan Kertajati yang telah memperoleh ganti rugi berupa uang tersebut mereka sudah pindah dan menyebar ke wilayah lain yang berdekatan dengan tempat tinggal semula. Namun ada juga yang pindah keluar daerah karena mengikuti keluarga dan kerabatnya. Pada saat ini sedang diupayakan untuk dilakukan penggantian dalam bentuk bukan uang yaitu penggantian dalam bentuk relokasi, namun sampai saat ini terkait dengan relokasi masih belum menemukan titik kesepakatan yang diinginkan warga masyarakat sehingga pada saat ini masih berupa keputusan penggantian uang bagi warga yang sudah bersedia untuk lahannya dibebaskan.

Berdasarkan rekomendasi konsultan, Pemerintah daerah dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majalengka menetapkan harga paling rendah adalah Rp. 2,8 Juta perbata.¹⁵ *Impact* dari pembangunan ini diprediksikan akan menyerap banyak lowongan pekerjaan baru yang diharapkan mampu mengubah kondisi perekonomian yang ada di kawasan Majalengka, dan juga diharapkan masyarakat yang lahan pertaniannya terdampak penggusuran akan memiliki kesempatan untuk dapat memiliki keterampilan selain bertani, dan akan beralih ke bidang perdagangan, industri ataupun jasa yang akan menunjang pula dalam mata pencaharian sehari-hari yang sebelumnya menggarap lahan baik lahan pertanian maupun perkebunan.

¹⁵ Luas lahan perbata sama luasnya dengan 14 Meter persegi

Harga yang ditawarkan pemerintah di rasa sudah tidak sebanding dengan harga tanah di wilayah bandara Kertajati pada saat ini, hal ini dikarenakan nilai harga jual tanah makin beranjak naik seiring dengan terus berjalannya pembangunan yang ada dan juga spekulasi-spekulasi yang berada didalamnya. permainan spekulasi ini sangat berkaitan dengan banyaknya investor yang datang dari luar wilayah Majalengka, yang mana hal ini membuat tanah menjadi semakin mahal karena melihat perkembangan perekonomian ke depan dengan adanya bandara BIJB Kertajati. Hal inilah yang menjadi pemicu konflik, juga mengapa masih ada beberapa warga masyarakat yang masih mempertahankan lahannya. Dikarenakan harga yang dibayarkan pemerintah masih terlalu kecil dibandingkan dengan harga tanah di seputar wilayah pembangunan bandara. Walaupun masih banyak juga lahan yang lokasinya jauh dengan bandara dan harga jualnya sesuai dengan harga penggantian dari pemerintah. Dari konflik yang berkembang ada beberapa upaya resolusi konflik yang dilakukan dan Bandara BIJB Kertajati merupakan satu dari 225 program percepatan proyek strategis nasional yang dicanangkan Presiden RI Joko Widodo yang menuai konflik yang terjadi antara masyarakat dan pemerintah terkait.

Dari latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Resolusi Konflik Pembebasan Lahan Pertanian untuk Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan maka masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah resolusi konflik yang dilakukan dalam menangani pembebasan lahan dalam konflik yang terjadi, menjadikan perumusan masalah yang diangkat pada tesis ini adalah:

1. Bagaimana konflik yang terjadi dalam pembebasan lahan pertanian untuk pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka?
2. Bagaimana resolusi konflik lahan pertanian untuk pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui bagaimana konflik yang terjadi serta resolusi konflik yang dilakukan dan juga sampai kepada dalam upaya membangun perdamaian pasca terjadinya konflik pembebasan lahan pertanian pada pembangunan BIJB Kertajati di Kabupaten Majalengka, maka penelitian ini bertujuan untuk, sebagai berikut :

1. Menganalisis konflik dalam pembebasan lahan pertanian untuk pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka.
2. Menganalisis resolusi konflik pembebasan lahan pertanian untuk pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini akan di bagi menjadi dua macam yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Diharapkan dalam penelitian ini memberikan manfaat yang baik untuk kedepannya dalam menangani konflik yang sama dan dalam kasus pembebasan lahan yang dalam hal ini sering sekali terjadi di Indonesia.

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya teori analisis terhadap konflik, melalui analisis atas dinamika konflik yang terjadi, serta memberikan kontribusi terkait dengan mata kuliah prodi Damai dan Resolusi Konflik, agar menjadi bahan pembelajaran terkait dengan konflik yang terjadi, serta upaya yang dilakukan dalam resolusi konflik dan upaya untuk membangun perdamaian, serta diharapkan dapat menambah wawasan bagi yang memiliki minat dalam penelitian terkait konflik yang terjadi, terutama konflik dalam kasus pembebasan lahan. Dapat dijadikan bahan kajian bagi pemangku kepentingan, juga dalam hal ini di harapkan menjadi bahan bacaan yang berguna bagi seluruh elemen masyarakat yang memiliki ketertarikan dalam penyelesaian konflik yang ada di Indonesia

1.4.2 Manfaat Praktis

Dalam manfaat praktis ini dijelaskan manfaat praktis yaitu dapat memberikan masukan kepada pihak terkait dalam upaya resolusi konflik yang dilakukan dan merumuskan kebijakan-kebijakan dalam pembebasan lahan pertanian untuk pembangunan Bandara BIJB Kertajati, Baik kepada pemerintah daerah setempat maupun terhadap pihak keamanan di lingkungan Kabupaten Majalengka, agar terciptanya pembangunan perdamaian di wilayah Bandara BIJB Kertajati.

1.5 Ruang Lingkup dan Desain Penelitian

1.5.1 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penelitian ini dibatasi pada analisis konflik dan resolusi konflik yang dilakukan. Ruang lingkup penelitian dilakukan di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka Propinsi Jawa Barat yang terpusatkan di Desa Sukamulya selaku lokasi terjadinya konflik dilakukan mulai dari level pemerintah, aparat keamanan juga lembaga terkait serta

masyarakat yang terlibat konflik. Dalam hal ini juga di kaji tentang faktor-faktor apa saja yang menjadi pemicu konflik di daerah tersebut, Serta upaya yang dilakukan *stake holder* yang ada dalam resolusi konflik untuk dapat membangun perdamaian. Adapun penelitian ini lebih difokuskan kepada kejadian konflik yaitu pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 pasca terjadinya konflik.

1.5.2 Desain Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif deskriptif berdasarkan sumber data yang ada, kemudian data primer dalam penelitian diperoleh melalui teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara, studi pustaka. Wawancara ini dilakukan secara mendalam sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam rangka penelitian. Data sekunder dalam penelitian di dapat melalui buku-buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dokumentasi, serta dokumen yang relevan dan naskah kajian yang dapat dipertanggungjawabkan. Penganalisaan dilakukan dengan mengasosiasikan jawaban narasumber atau informan yang ada dengan teori-teori yang digunakan. Dalam penelitian ini di buat mulai dari Bab 1 yang sampai dengan Bab 5 yaitu sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta ruang lingkup dan desain penelitian.

BAB 2 KAJIAN TEORITIK

Dalam bab ini dijelaskan bagaimana tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran juga menjelaskan tentang kajian teori dan konsep yang digunakan serta penelitian yang terdahulu yang relevan dan pelaksanaan dalam penelitian.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Berisi uraian tentang metode penelitian yang digunakan untuk meneliti dan mencari data, tempat atau lokasi penelitian, informan yang di wawancara, serta teknik analisis dan pengolahan data serta semua hal yang berkaitan dengan metode penelitian juga pengujian keabsahan data.

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab 4 ini dijelaskan data penelitian dan analisis data yang membahas temuan- temuan lapangan yang sudah dikumpulkan melalui gambaran umum dan dapat membantu dalam analisis masalah yang terjadi. Pembahasan tersebut merupakan interpretasi atau verifikasi peneliti terhadap temuan atau hasil penelitian dengan menghubungkan berbagai konsep atau teori yang relevan dengan pembahasan.

BAB 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dalam bab 5 ini isinya adalah berupa kesimpulan serta saran dan rekomendasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini dijawab dalam penjelasan kesimpulan di bab ini. selain kesimpulan terdapat juga saran yang harus dilakukan. Kemudian dalam bab ini pula berisi tentang rekomendasi yang dihasilkan dari pengolahan data dan analisis data sebagai bentuk manfaat yang dilakukan dalam penelitian ini. Rekomendasi ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan tentang perlunya penelitian atau kajian lanjutan dari hasil penelitian, dan implementasi dari hasil penelitian untuk pemecahan masalah-masalah praktis bagi pihak-pihak yang terkait dan diharapkan menjadi masukan bagi peneliti lain yang tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema yang sama dengan yang dilakukan oleh peneliti.

BAB 2

KAJIAN TEORITIK

2.1 Kajian Teoritik

2.1.1 Teori Konflik

Sebelum lebih lanjut membahas tentang resolusi konflik maka terlebih dahulu perlu kita mengetahui apa itu konflik dan bagaimana konflik itu bisa terjadi, karena resolusi konflik dan konflik merupakan hubungan sebab dan akibat yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, Untuk itu perlu dipahami dahulu apa yang dimaksud dengan konflik agar dapat diketahui penyebabnya dan kemudian dapat dilanjutkan ketahapan resolusi konflik, dengan menggunakan teori yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

Konflik merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan perkembangan manusia, yang mempunyai karakteristik beragam. Manusia memiliki perbedaan jenis kelamin atau gender, tingkat sosial yang berbeda dan ekonomi yang berbeda, sistem hukum, bangsa, suku, agama, kepercayaan, aliran politik, serta budaya dan tujuan hidupnya.¹⁶ Dalam tingkatan kehidupan seseorang ada yang hidupnya serba kekurangan dan ada pula yang serba berkecukupan, terkadang dalam hal ini konflik bisa saja terjadi dikarenakan tingkatan sosial yang sangat berbeda-beda. Konflik terjadi ketika dua atau lebih manusia atau suatu kelompok dari manusia itu sendiri mengalami dinamika yang berbeda-beda, dan terkadang perbedaan-perbedaan dan cara pandang itulah yang cenderung menyebabkan konflik terjadi.

Gagasan tentang konflik pada awalnya dikemukakan oleh Karl Mark yang menganalisis tentang kehidupan masyarakat dari pemikiran

¹⁶ Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik*, Jakarta: Salemba Humanika, 2009 hlm 1

konflik dan kekuasaan.¹⁷ Konflik berasal dari kata kerja Latin *Confligere* yang berarti saling memukul. Dari bahasa Latin diadopsi ke dalam bahasa Inggris, *Conflict* yang kemudian di adopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi konflik.¹⁸ Arti Konflik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai percekocokan, perselisihan, pertentangan.¹⁹ Secara sosiologis bahwa konflik diartikan sebagai suatu proses antara dua orang atau lebih bisa juga kelompok dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Definisi konflik jika di tinjau dari perspektif konflik Interpersonal atau konflik yang terjadi dalam satu organisasi. Konflik adalah Proses pertentangan yang diekspresikan diantara dua pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai objek konflik, menggunakan perilaku dan interaksi konflik yang menghasilkan keluaran konflik.²⁰

Selanjutnya menurut Garna, Perspektif konflik merupakan suatu aspek penting dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat yaitu membahas tentang dominasi suatu kelompok individu lainnya. Konflik juga didefinisikan secara sederhana oleh Fink (1968) dalam Folger dan poole. Sebagai *disagreement* atau ketidaksepahaman, *Competition* (Kompetisi), atau sebagai adanya kepentingan-kepentingan yang bertentangan atau inkompatibel (*the Presence of incompatible interest*) konflik terjadi pada situasi kompetisi terbuka ketika setiap pihak mencoba untuk mengalahkan musuhnya.²¹

Pruitt dan Kom dalam buku Jeong 2008, berpendapat bahwa secara essensial asal muasal konflik adalah situasi yang sulit untuk mempertemukan keinginan semua orang secara bersamaan. Sasaran

¹⁷ Garna,K. Yudistira. (2006) *Teori Sosial Pembangunan*, Bandung.: Primaco Akademika
Judistira Garna Foundation

¹⁸ Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik*, Jakarta:Salemba Humanika , 2009 hlm 4

¹⁹ Konflik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.web.id/konflik>

²⁰ Wirawan, dalam buku yang berjudul *Konflik dan Manajemen Konflik*, Jakarta : Salemba Humanika, 2009 hlm 5

²¹ Folger, J.P., dan Poole,M.S (1984). *Working Through Conflict*. USA:Scoot,Foresman Company

dan aktivitas setiap orang menjadi saling bertentangan ketika kepentingan salah satu pihak diancam oleh tindakan pihak lainnya. Hal tersebut dapat memunculkan ketegangan, perasaan dan perilaku yang saling bermusuhan ketika masing-masing pihak berbeda pandangan dan saling bertentangan. Dari definisi tersebut diatas ada sejumlah Indikator menurut Wirawan dalam bukunya berjudul Konflik dan Manajemen Konflik memerlukan penjelasan yaitu:

1. Proses, Konflik terjadi melalui suatu proses yang unik, artinya setiap konflik mempunyai masukan, proses dan keluaran konflik yang unik dan berbeda dengan konflik lainnya. Istilah proses ini tidak terjadi seketika, tetapi memerlukan waktu dari mulai munculnya perbedaan sampai kepada penyelesaian atau solusi konflik yang dilakukan.
2. Dua pihak atau lebih, Kecuali konflik personal, Konflik terjadi diantara dua pihak atau lebih. Adapun pihak yang terlibat konflik bisa karena antara seorang individu dan individu lainnya, bisa juga antara individu dengan suatu kelompok individu, antara suatu kelompok individu dengan kelompok individu lainnya atau antara suatu organisasi dengan organisasi lainnya.
3. Saling tergantung, Pihak yang terlibat konflik saling tergantung atau interdependen satu sama lainnya, artinya pihak tersebut tidak bebas untuk melakukan sesuatu tanpa campur tangan atau bantuan izin, dan merugikan atau mengurangi kebebasan pihak lainnya. Setiap tindakan atau tidak melakukan sesuatu dari salah satu pihak yang terlibat konflik akan berpengaruh dengan pihak lainnya.
4. Pertentangan mengenai objek konflik, Objek konflik adalah sesuatu yang menyebabkan terjadinya konflik. Pihak yang terlibat konflik mempunyai berbagai perbedaan pendapat, yaitu sikap atau kepercayaan mengenai objek konflik.
5. Diekspresikan, Pertentangan yang ada baik antar individu maupun antar kelompok akan menjadi konflik jika diekspresikan, jika

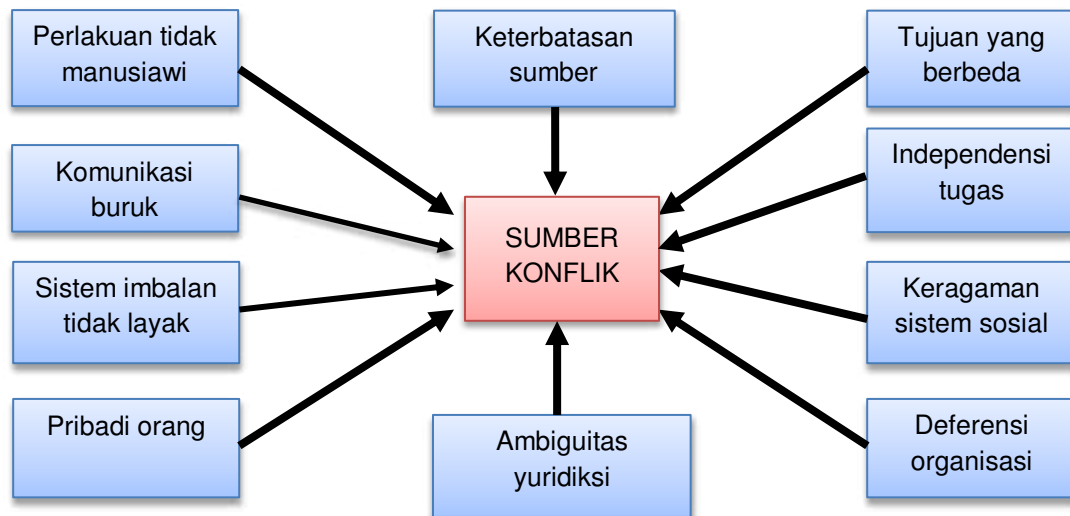
pertentangan tidak atau belum diekspresikan maka konflik bersifat laten atau tidak kelihatan, konflik baru akan terjadi jika perbedaan tersebut diinteraksikan. Ekspresi mengenai objek konflik merupakan kejadian yang memicu konflik itu terjadi dalam hal ini pengekspresian dapat tergambarkan dari bahasa verbal, bahasa badan atau bahasa tertulis.

6. Pola perilaku, adalah kecenderungan orang untuk berperilaku secara tertentu dalam menghadapi situasi konflik, pola ini juga disebut sebagai gaya manajemen konflik dan taktik konflik
7. Interaksi konflik, Proses konflik menimbulkan interaksi konflik diantara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Interaksi bisa saling menuduh, saling menyalahkan, saling mengumpat, menyelamatkan muka atau meminta bantuan pihak ketiga untuk menyelesaikan konflik.
8. Keluaran konflik, Interaksi konflik diantara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik menghasilkan keluaran konflik yang unik, untuk masing-masing jenis konflik. Keluaran konflik bisa berupa ditemukannya solusi atas suatu konflik, seperti *win&win solution*, *Win&lose solution*, serta *lose&lose solution*. Keluaran konflik juga dapat menciptakan suatu perubahan sistem sosial.²²

Disisi lain, Konflik menurut Jeong yaitu dalam situasi konflik, dinamika tindakan dan tindakan balasan pasti melibatkan upaya untuk mengendalikan perilaku pihak lain, sering kali dengan maksud untuk melukai atau menghancurkan. Perbedaan dalam minat, nilai, dan kebutuhan yang dirasakan mungkin merupakan elemen paling mendasar dalam motivasi di balik konflik sosial. Konflik antar kelompok sering mewakili berbagai cara hidup dan ideologi dengan komplikasi untuk pandangan tidak selaras tentang hubungan dengan orang lain. Perasaan keadilan muncul dari penindasan kebutuhan sosial yang melekat dan nilai-

²² Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik*, Jakarta:Salemba Hunamika , 2009 hlm 6-7

nilai yang memiliki makna yang potensial dan yang tidak dapat dikompromikan. Adapun sumber-sumber konflik yang kerap terjadi yaitu:



Gambar 2.1 Sumber terjadinya konflik²³

Sumber: Wirawan

2.1.1.1 Teori SAT (*Structural Akselerator dan Trigger*)

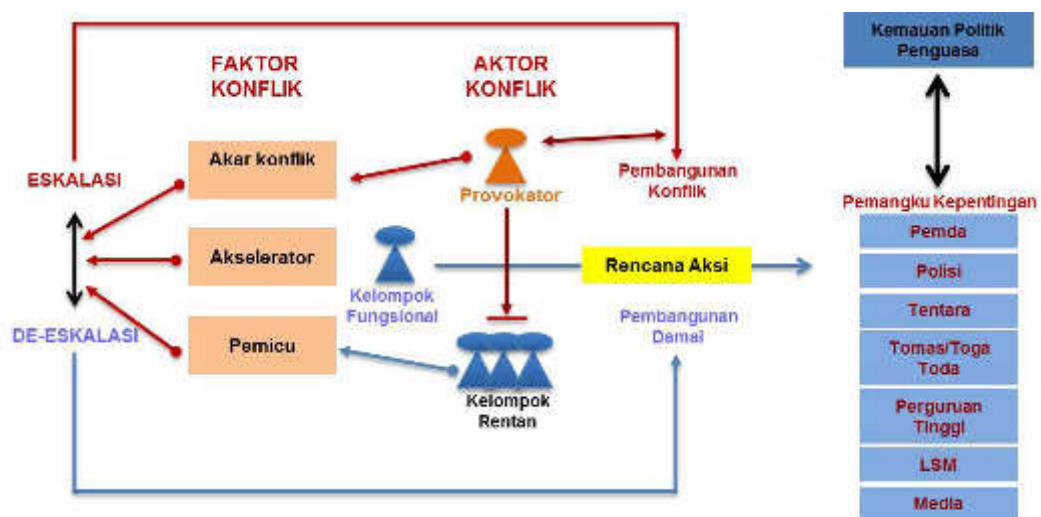
Teori konflik SAT digunakan sebagai landasan dalam melakukan analisis konflik yang terjadi, untuk mengetahui sejauh mana akar permasalahan yang ada. Analisis konflik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan Teori SAT (*Structural, Akselerator dan Trigger*) Ichsan Malik.²⁴ Model Teori SAT ini digunakan untuk melihat adanya masalah dasar pada konflik yang terjadi, S di sini sebagai *Structural* merupakan hal yang sangat dan paling mendasar yaitu meliputi masalah ketimpangan baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun budaya, kemudian A sebagai *Akselerator* merupakan segala hal yang

²³ Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik*, Jakarta:Salemba Hunamika , 2009 hlm 8

²⁴ Ichsan Malik adalah Ketua IM Center untuk dialog dan perdamaian, working group resolusi konflik dari Ikatan Psikologi Sosial seluruh Indonesia, dan anggota Tim Kerja Dialog dan Mediasi GPPAC mewakili jaringan Asia Tenggara, Beliau adalah Inisiator dan Fasilitator dari Gerakan Perdamaian Maluku Baku Bae, sebuah gerakan yang berlangsung sejak April 2000 hingga 2003 untuk membangun perdamaian di Maluku. Beliau menjadi dosen tetap di Departemen Psikologi UI sejak tahun 2000 dan mengajar mata kuliah Resolusi konflik dan Konflik Intervensi di Universitas Pertahanan sejak 2012 hingga kini, Ichsan Malik menerima penghargaan Sani Ahu Siwalima dari pemerintah dan para Pemimpin adat Maluku pada tahun 2011.

meningkatkan atau mempercepat proses terjadinya konflik yang semula kecil menjadi besar, sedangkan T untuk *Trigger* adalah pemicu yang mana hal ini merupakan kejadian biasa yang dapat menjadi alasan terjadinya suatu konflik menjadi besar.

Dalam buku Ichsan Malik yang berjudul *Resolusi Konflik Jembatan Perdamaian* disebutkan bahwa Galtung menyarankan untuk memahami konflik secara menyeluruh, untuk itu anggaplah konflik adalah suatu penyakit. Untuk dapat menentukan penyakit yang sebenarnya kita harus dapat membedakan mana yang sekedar gejala dan mana yang menjadi sumber dari pada penyakitnya, Maka dari itu harus dilakukan diagnosis terlebih dahulu baru kemudian dapat ditentukan obat apa yang tepat untuk penyakit tersebut, kemudian baru dilakukan *Treatment* tahap demi tahap untuk menuju proses resolusi konflik.²⁵ Adapun kerangka dinamis pencegahan dan resolusi konflik dapat juga digunakan untuk menganalisis konflik dan resolusinya yaitu sebagai berikut:



Kerangka Dinamis Pencegahan dan Resolusi Konflik (Ichsan Malik, 2014)

Gambar 2.2 Kerangka pencegahan dan Resolusi Konflik²⁶

Sumber : Ichsan Malik, 2014

²⁵ Ichsan Malik, *Resolusi konflik Jembatan perdamaian*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta 2017 hlm 232

²⁶ *Ibid*

Kerangka dinamis pencegahan dan resolusi konflik yang tergambar diatas ini merupakan modifikasi dari Titian Damai *Framework* yang dibuat pada dalam rangka deteksi dini dan respons dini yang di konstruksi oleh Ichsan Malik dan tim Institut titian perdamaian pada tahun 2010. Awalnya hanya memiliki tiga komponen yaitu eskalasi de-eskalasi, komponen faktor konflik dan komponen aktor konflik. Kemudian pada tahun 2013 terdapat dua komponen tambahannya yaitu komponen pemangku kepentingan dan komponen kemauan politik penguasa untuk menyelesaikan konflik dan membangun perdamaian.²⁷

Komponen pertama yaitu eskalasi dan de-eskalasi, tingkat eskalasi memberikan kontribusi bagi konflik dan perdamaian. Eskalasi harus dapat dideteksi dan dikendalikan, dilakukan musyawarah untuk menyelesaikan konflik agar krisis mulai teratasi, maka kondisi ini disebut terjadinya de-eskalasi. Komponen kedua yaitu faktor konflik, tiga elemen dalam faktor konflik ini yaitu: Elemen pemicu konflik, Elemen akselerator dan Elemen akar konflik. Komponen ketiga adalah aktor konflik yaitu yang terdiri dari kategori provokator konflik, kelompok rentan dan kelompok fungsional yaitu kelompok yang tanggung jawab utamanya adalah menghentikan kekerasan dan mencegah meluasnya konflik. Komponen keempat yaitu pemangku kepentingan atau *stake holder*, adalah elemen yang berkepentingan untuk menghentikan konflik serta mencegah meluasnya konflik, komponen ini terdiri dari kelompok polisi, militer, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, kelompok LSM, peneliti serta media massa. Komponen yang kelima adalah kemauan politik penguasa dapat terdeteksi dalam dua hal yaitu inisiatif dan kepemimpinan para penguasa untuk menyelesaikan konflik yang terjadi secara tuntas, dan adanya produk-produk hukum atau kebijakan yang dapat mencegah dan menyelesaikan konflik.²⁸ Memang harus diakui tidak mudah untuk memahami konflik nyata dalam sebuah masyarakat, untuk itu

²⁷ Ichsan Malik, *Resolusi konflik Jembatan perdamaian*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta 2017

²⁸ *Ibid* , hal 233-235

menempatkan semua faktor secara tepat dan dapat memilah masing-masing aktor yang ada didalamnya sangat begitu penting, agar diketahui secara mendasar tentang bagaimana konflik bisa terjadi agar lebih mudah diketahui cara menangani konflik tersebut.

2.1.1.2 Model Konsep Eskalasi Glasl

Teori lain yang digunakan dalam analisis konflik adalah dengan Model konsep eskalasi Glasl. Frederich Glasl (1997) mengembangkan *Conflict Escalation Model* bagi fasilitator konflik untuk dapat memahami tahapan dari eskalasi konflik. Eskalasi dipahami sebagai meningkatnya tensi dalam konflik. Dalam model tersebut, Glasl membagi tahapan konflik menjadi Sembilan, berikut penjelasan Sembilan tingkat eskalasi yang dikemukakan Glasl dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tingkatan Model Eskalasi Glasl

No	Position	Notes
1.	<i>Hardening</i>	Keadaan dan suatu pertentangan yang masih memungkinkan adanya kerjasama meskipun unsur persaingan yang masih dapat dikendalikan. Timbulnya perbedaan dalam menyikapi beberapa permasalahan. mulai timbul konfrontasi namun masih terbuka kemungkinan penyelesaian konflik melalui diskusi.
2.	<i>Debates/ polemics</i>	Polarisasi dalam perasaan, pikiran atau perilaku, sama-sama pihak ingin mendominasi posisi satu sama lain dengan tidak adanya pemikiran atau konsepsi yang dapat menjadi pen jembatan, mulai timbul kecurigaan terhadap perilaku pihak lain proses diskusi mulai ditinggalkan dan mulai berkembang menjadi argument manipulatif dan taktis
3.	<i>Action/ Tindakan</i>	Ketika bicara sudah tidak lagi membuahkan hasil, dan salah satu pihak merasa bahwa berbicara mulai tidak

		berguna, dan mulai bertindak tanpa berkonsultasi dengan pihak lain, empati mulai hilang sehingga para pihak yang bertentangan mulai tidak sungkan untuk 'Main tangan' atau melakukan aksi propokatif yang mengarah kepada kekerasan fisik. Kerjasama sudah hampir tidak mungkin dilakukan karena terjadi bentuk persaingan terbuka.
4.	<i>Images/</i> gambaran dan koalisi	Masing-masing kelompok bermanuver untuk memposisikan lawan dalam peran negatif dan akan mendorong penguatan peran ini, menghadapi lawan dengan data-data, strategi koalisi mulai dilakukan oleh masing-masing pihak yang bersiteru. Image diri sebagai reaksi dari lawan ada 'lawan' dalam posisi ini prasangka (<i>Prejudice</i>) digunakan sebagai metode memandang pihak lawan.
5.	<i>Lose of face /</i> Kehilangan muka	Serangan terbuka dan dilakukan secara langsung mengenai integritas moral lawan yang bertujuan untuk membuat mereka kehilangan muka, tahapan eskalasi utama, lawan harus dipermalukan, saling menyerang diranah publik. Tindakan yang menyebabkan rasa malu dimuka umum untuk satu maupun kedua belah pihak.
6.	<i>Strategy of threat/</i> ancaman sebagai strategi	Penggunaan ketakutan sebagai bentuk strategi mengalahkan pihak lawan, dalam level ini ancaman mengancam dan peluncuran ultimatum terakselerasi dan jamak sekali ditemui. Ancaman serangan balik, aksi yang dilakukan hanya sebuah reaksi, ada keinginan untuk mengontrol timbul kemarahan.
7.	<i>Limited destruction/</i>	Penyerangan, lawan tidak lagi dilihat sebagai manusia, mulai ada proses dehumanisasi, <i>values</i>

	kerusakan terbatas	mulai bergeser, situasi penggambaran kekecauan dimana sinisme mulai melewati moralitas yang seharusnya dipegang para aktor sesuai dengan identitas masing-masing, mengesampingkan nilai-nilai perdamaian sesama manusia
8.	Fragmen tasi musuh	Tindakan untuk menghancurleburkan lawan, ketertarikan penghancuran secara besar-besaran terhadap lawan, terjadi kehancuran total baik secara fisik, mental spiritual dari salah satu atau semua pihak yang bermusuhan, serangan yang langsung ditujukan pada inti kelompok lawan, dimaksudkan untuk menghancurkan musuh atau menghancurkan sistem vitalnya
9.	<i>Together into the abbys</i>	Konfrontasi total tanpa ada kemungkinan untuk mundur kembali, menerima kehancuran diri asal lawan hancur, factor kelangsungan hidup diri sendiri dan pihak sendiri mulai tidak lagi dipertimbangkan. Dalam situasi ini, eksisistensi dan kemanusiaan menjadi pembahasan yang krusial.

Analisis konflik dalam perspektif eskalasi Glasl dapat digunakan untuk membuat kalkulasi terhadap skenario perlawanan. Pada tahapan 1 hingga 3, masih memungkinkan untuk adanya situasi *win-win* atau sama-sama menang, sementara pada tahap 4 hingga 6 status pihak yang bermusuhan cenderung *win-lose* atau satu pihak menang dan satu pihak lainnya kalah. Sedangkan pada tahap 7 hingga 9 yang terjadi adalah saling kalah atau *lose-lose*.

Pada tahapan awal, intervensi atas konflik oleh pihak ke tiga dapat berupa negosiasi atau fasilitasi, dalam level yang lebih tinggi mediasi oleh pihak yang perlu dibuktikan netralitasnya dapat pula menjadi alternatif,

Namun dalam level konflik eskalasi tinggi perlu dilakukan arbitrase atau adjudikasi hingga intervensi power untuk terlebih dahulu meredakan ketegangan.

2.1.1.3 Nilai Tanah

Tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Tanah merupakan sumber daya alam yang ada dan sangat diperlukan manusia untuk dapat mencukupi kebutuhannya. Ray M. Northam (1975) mengemukakan dua buah pengertian tentang nilai tanah, yakni nilai tanah adalah nilai pasar (*market value*) yaitu harga jual beli tanah yang terjadi pada suatu waktu tertentu. Nilai tanah adalah nilai *assessment (assessed value)* yaitu nilai yang diestimasi oleh seorang penilai. *Market value* merupakan data dasar bagi *assessed value*.²⁹

Perkembangan suatu kota atau daerah akan selalu diikuti dengan meningkatnya permintaan tanah dan selanjutnya akan menaikkan nilai tanah. Karena tanah mempunyai sifat yang tetap, baik dalam lokasi maupun jumlahnya. Kebutuhan tanah yang tinggi memiliki kecenderungan nilai tanah di kota-kota besar meningkat. Hal ini dipengaruhi oleh dengan meningkatnya pembangunan di daerah tersebut. Penentuan nilai tanah diperlukan untuk mengetahui nilai tanah yang senantiasa berubah akibat berbagai kepentingan dalam penggunaan tanah, Karena sifat tanah yang bersifat dinamis atau berubah-ubah seiring dengan bertambahnya waktu.³⁰

Salah satu penyebab adanya peningkatan terhadap harga tanah adalah situasi pasar tanah yang tidak transparansi. Agus Prawoto (2003:3) mengatakan bahwa setiap persil dari tanah itu adalah bersifat

²⁹Sisvinta Hayu Bodro , *Identifikasi Pengaruh Pola Perubahan Lahan terhadap zona nilai tanah di Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang*, Skripsi, Fakultas Teknik Program Studi Teknik Geodesi Universitas Diponegoro Semarang, Desember 2013. [Eprints.undip.ac.id/41772/3/BAB_II.pdf](http://eprints.undip.ac.id/41772/3/BAB_II.pdf)

³⁰A. Nugroho Budiyo, *Prediksi nilai tanah berdasarkan nilai indikasi rata-rata tanah pada zona nilai tanah dengan menggunakan metode linier dan non linier pada kecamatan Rungkut*, Tesis, Program Studi Teknik Sipil Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, 2012

unik dilokasinya serta komposisinya. Latar belakang tersebut berimplikasi terhadap ketersediaan tanah.³¹ Nilai tanah bukan hanya kaitannya dengan harga tanah yang ada, namun di samping itu nilai tanah yang sesungguhnya adalah berkenaan dengan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara, seperti yang di atur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 ayat 3 yang menyatakan bahwa:

"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Sumber daya alam berupa tanah yang dimiliki masyarakat akan menjadi suatu kewajiban yang harus diserahkan kepada pemerintah jika pemerintah membutuhkannya untuk kepentingan umum, Namun berkenaan dengan hal tersebut maka pemerintah pun harus menjamin tidak akan merugikan masyarakat pemilik lahan yang akan digunakan yaitu dengan penggantian yang layak dan harus sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Tanah memiliki kekuatan ekonomis yang mana nilai tanah dan harga tanah sangat tergantung kepada penawaran dan permintaan dari tanah itu sendiri. Nilai tanah di lihat dari lokasi dan kondisinya, Tanah akan menjadi sangat tinggi nilainya jika di wilayah tersebut di bangun fasilitas sarana dan prasarana yang memadai, misalnya saja akses jalan yang di tempuh untuk menjangkau lokasi tersebut, kemudian pesatnya pembangunan yang ada menyebabkan nilai tanah akan semakin meningkat seiring berjalannya pembangunan yang ada di wilayah tersebut. Selain itu kondisi sosial di masyarakat pun sangat menentukan terhadap nilai tanah itu sendiri, misalnya saja tanah yang lahannya subur

³¹ Fahirah F, Armin Basong, Hermansah H.Tagala, *Identifikasi faktor yang mempengaruhi nilai jual lahan dan bangunan pada perumahan tipe sederhana*, Jurnal SMARTek Vol 8 No 4 Nopember 2010 hlm 251-269, di unggah melalui situs jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/SMARTEK/article/viewFile/645/561

akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat, karena dari tanah tersebut akan menghasilkan tanaman yang baik dengan kondisi pengairan yang baik pula, sehingga akan menaikkan tingkat kesejahteraan dan tingkat ekonomi, sehingga hal ini akan meningkatkan kehidupan sosial seseorang berkenaan dengan luasnya lahan yang dimiliki.

Seperti yang dijelaskan diatas bahwa harga tanah pada wilayah tertentu akan tergantung pada faktor permintaan seperti kepadatan penduduk dan tingkat pertumbuhannya. Pada tingkatan kesempatan akan adanya peluang pekerjaan dan tingkat pendapatan warga masyarakat serta kapasitas sistem transportasi. Salah satu penyebab meningkatnya harga tanah secara tiba-tiba adalah situasi pasar tanah yang belum transparan. Hal ini yang kemudian mengakibatkan persaingan akan terjadi dalam pembebasan tanah menjadi tidak sempurna. Dan juga hal ini mungkin disebabkan oleh faktor informasi yang tidak tepat, sehingga menimbulkan spekulasi.

Ketika ada informasi mengenai suatu proyek pembangunan infrastruktur di lokasi wilayah tertentu hal ini akan dengan cepat ditanggapi oleh para calo dan juga dengan spekulasi tanah akan bersegera membeli tanah yang menjadi lokasi pembangunan atau disekitarnya. Taksiran harga tanah berdasarkan NJOP sebagai ukuran normatif tanah tidak bisa lagi digunakan dan justru harga pasar yang dihasilkan dari kondisi persaingan yang tidak sempurna itulah yang berlaku. Kejadian semacam ini banyak terjadi sehingga taksiran harga tanah bisa melonjak jauh dari yang semula direncanakan oleh pemilik proyek pembangunan yaitu pemerintah, baik dari yang didanai melalui APBD maupun yang didanai melalui APBN.³²

³² Fahurah F, Armin Basong, Hermansyah H.Tagala. *Judul Identifikasi faktor yang mempengaruhi nilai jual lahan dan bangunan pada perumahan tipe sederhana*, di unggah melalui situs jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/SMARTeK/article/viewFile/645/561 Jurnal SMARTek Vol8 No 4 Nopember 2010 hlm 251-269

Nilai tanah dapat dilihat dari berbagai aspek, aspek yang ada salah satunya yaitu lokasi tanah. Nilai tanah akan meningkat seiring dengan perbaikan fasilitas transportasi darat dan udara. Karena hal ini dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif untuk nilai tanah. Tanah juga merupakan benda yang berbentuk fisik dan abstrak, Bersifat fisik yaitu karena tanah menyatu dengan permukaan bumi dan menempel baik di bagian atasnya atau dibawahnya. Tanah bersifat abstrak karena tanah memiliki hak untuk digunakan dan nilai untuk diperdagangkan (Dale & McLaughlin. 1999). Salah satu dari konsep tanah secara abstrak adalah nilai tanah. Dari segi pasar, nilai tanah dapat berarti harga tanah yang dinegosiasikan dan disetujui oleh penjual dan pembeli. Nilai tanah pula ditentukan dari jarak tanah tersebut dengan pusat kota dan juga pusat bisnis.³³

2.1.2 Resolusi konflik

Resolusi konflik adalah istilah komprehensif yang mengimplementasikan bahwa sumber konflik yang dalam berakar akan diperhatikan dan diselesaikan, ini mengimplementasikan bahwa perilakunya tidak lagi penuh dengan kekerasan, sikapnya tidak lagi membahayakan dan struktur konfliknya telah di ubah.³⁴

Resolusi konflik menurut Jeong (2010) adalah bahwa konflik yang ada bisa bertransformasi, untuk itu diperlukan cara pengelolaan konflik dan resolusi yang menyentuh akar permasalahan agar tidak menciptakan konflik yang berkepanjangan. Jeong juga menyatakan transformasi konflik akan terjadi jika konflik tersebut disebabkan oleh masalah-masalah

³³ Levana Apriani, Bambang Edhi Leksono Judul : *Pengembangan model nilai tanah dengan Geographically weighted regression (GWR) dalam pengujian kualitas nilai tanah pada lingkungan terpengaruh keberadaan transportasi darat dan udara, (studi Kasus: Kelurahan Cempaka, Kecamatan Andir, Kota Bandung)* Jurnal Pendidikan Geografi, Volume 16, Nomor 2, Oktober 2016.

³⁴ Hugh Miall, Oliver Ramsbotham Tom woodhouse, *Resolusi Konflik Kontemporer*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002 . hlm 31

sosial, budaya dan ekonomi, sehingga dalam proses resolusi konflik harus langsung bersentuhan pada akar permasalahan sehingga konflik tidak akan terulang lagi.³⁵

2.1.2.1 Teori Galtung *Peace keeping, peace making dan peace building*

Teori yang akan di gunakan dalam resolusi konflik ini adalah menggunakan teori Galtung, yang terdiri dari tiga tahap yaitu , *Peace keeping, Peace making dan Peace building*. Tiga model resolusi konflik yang dikemukakan oleh Galtung sebagaimana dikutip dalam Alo Liliweri 2005, menyatakan bahwa pada akhirnya penyelesaian konflik harus melibatkan seperangkat perubahan dinamis yang melibatkan penurunan perilaku konflik, Perubahan sikap, dan mentransformasikan hubungan atau kepentingan yang berbenturan dan berada dalam inti struktur konflik.

Menurut Galtung, resolusi konflik pada hakikatnya merupakan serangkaian aktifitas yang berbentuk siklus, berawal dari *Conflict Prevention* yaitu aktivitas pencegahan konflik, *Peace keeping* yaitu intervensi untuk menghentikan konflik kekerasan, dan *Peace making* yaitu negosiasi untuk menciptakan perdamaian dan *Peace building* yaitu upaya untuk membina perdamaian agar bisa bertahan dalam jangka panjang.

Di dalam upaya resolusi konflik terdapat negosiasi dan mediasi, Negosiasi yaitu proses dimana pihak-pihak dalam konflik berusaha untuk menyelesaikan konflik mereka. Mediasi melibatkan campur tangan pihak ketiga, yang merupakan proses sukarela dimana pihak-pihak yang mempertahankan kontrol atas hasil (mediasi murni), meskipun kadang-kadang dikombinasikan dengan bujukan positif dan negatif (mediasi dengan otot). Konsiliasi atau fasilitasi dekat dalam arti mediasi murni,

³⁵ Sri Wahyuni, *Strategi Pemerintah Indonesia dalam penyelesaian Konflik Klaim Traditional Fishing Ground pada zona ekonomi Eksklusif Indonesia di Perairan Natuna* oleh republic Rakyat Tiongkok, Tesis. Universitas Pertahanan, Bogor 2018

dan mengacu pada upaya perantara untuk mendorong para pihak untuk bergerak menuju negosiasi.

Rekonsiliasi adalah proses jangka panjang mengatasi permusuhan dan kecurigaan antara sebagian masyarakat.³⁶ dan untuk menciptakan perdamaian atau disebut dengan *Peace making*, *peace keeping* adalah upaya untuk menghentikan kekerasan ketika kekerasan itu semakin meningkat.³⁷ Secara tradisional pula dan melakukan perundingan dan untuk menghilangkan kekerasan struktural dan kultural maka dilakukanlah upaya *Peace building* yang meliputi dimensi budaya, politik, dan ekonomi.³⁸

Makna dari transformasi menurut Jeong adalah bekerja sama untuk menghentikan konflik yang membutuhkan kapasitas aktor untuk menghentikan konflik, mulai dari darurat, eskalasi, jebakan atau tipuan, menurunnya eskalasi hingga berhenti. Pada proses konflik alami yang mempengaruhi kondisi internal dan eksternal pada pihak yang berseberangan di ubah menjadi kekuatan untuk menyelesaikan, untuk itu diperlukan adanya penyediaan regulasi atau aturan-aturan dalam meresolusi konflik, untuk membangun transformasi hubungan perdamaian jangka panjang maka dibutuhkan emosi, perseptual dan aspek spiritual. Disamping itu transformasi juga merupakan transisi dinamika konflik yang berawal dari eskalasi ke de-eskalasi dan juga lebih memfokuskan ketertiban dan mitigasi kekerasan dan bukan perubahan sistem politik, ekonomi yang memiliki konflik.

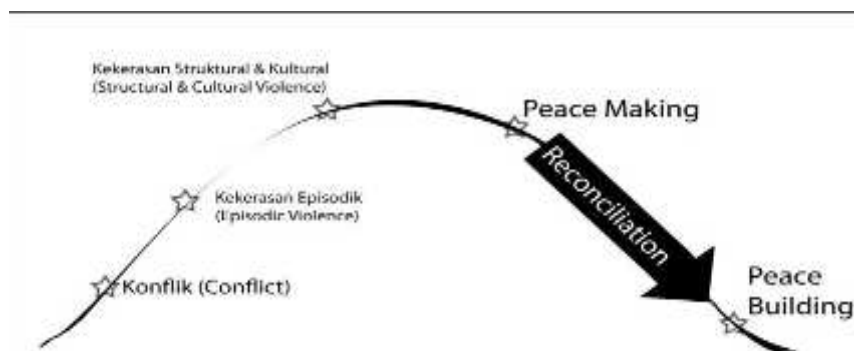
Dalam proses resolusi konflik terdapat rekonsiliasi konflik yang mana proses rekonsiliasi konflik menurut Rouhana dan Bar tal yaitu dimana rekonsiliasi ini merupakan bagian dari resolusi konflik. Tahapan

³⁶ Huriyatul Akmal, *Pengantar Resolusi Konflik*, 24 November 2012, di ambil dari situs <https://www.scribd.com/doc/114250614/Pengantar-Resolusi-Konflik>

³⁷ Ichsan Malik, *Resolusi Konflik Jembatan perdamaian*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta 2017.hlm 50

³⁸ *Ibid* hlm 50

rekonsiliasi adalah suatu tahap untuk menutup masa lalu yang menyakitkan diakibatkan oleh pelanggaran hak asasi manusia yang telah dilakukan oleh rezim terdahulu yaitu Rouhana dan Bar-tal 2004, adapun posisi dalam rekonsiliasi adalah pada gambar di bawah ini :



Gambar 2.3 Posisi Rekonsiliasi dalam Konflik (Telah diolah kembali dari Christie et al, 2001)³⁹

Sumber : Ichsan Malik

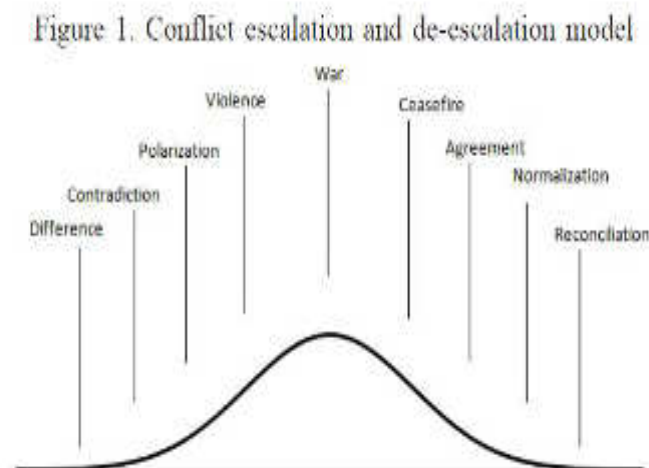
Menurut Bar-tal dalam Bar- simantov 2004, Rekonsiliasi adalah suatu proses perubahan psikologis yang berlangsung lama dan berkelanjutan, meliputi proses perubahan motivasi, perubahan tujuan hidup, perubahan keyakinan, sikap, dan emosi proses perubahan sangat sentral dan berlangsung secara perlahan-lahan karena tidak bisa dipaksakan. Rekonsiliasi dapat pula didefinisikan sebagai upaya menjaga perdamaian yang berkelanjutan agar konflik yang pernah ada tidak kembali terulang. Dapat dikatakan sebagai upaya dari *Peace building* yaitu membangun perdamaian. Masih menurut Galtung bahwa upaya *Peace building* yaitu tercapainya perdamaian yang positif, atau sebuah kondisi damai yang stabil. Dapat pula didefinisikan bahwa rekonsiliasi adalah sebagai upaya untuk mewujudkan reintegrasi pada pihak-pihak yang berkonflik dan terciptanya stabilitas perdamaian.

³⁹ Ichsan Malik, *Resolusi konflik Jembatan perdamaian*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta 2017 hlm 51

Rekonsiliasi sebagai proses, menurut Bar-tal dalam Bar-siman-tov. 2004 adalah suatu proses perubahan psikologis yang berlangsung lama dan berkelanjutan yang meliputi proses perubahan motivasi, perubahan tujuan hidup, perubahan keyakinan, sikap dan emosi. Proses perubahan psikologis sangat sentral dan berlangsung secara perlahan-lahan karena tidak bisa dipaksakan.

2.1.2.2 Model eskalasi dan de-eskalasi Ramsbotham

Model eskalasi dan de-eskalasi ini menggambarkan bagaimana konflik berpindah dari satu tahap ke tahap lain dan membentuk kurva normal eskalasi dan de-eskalasi Konflik. Eskalasi dan de-eskalasi konflik dalam hal ini merupakan buah pemikiran Ramsbotham yang terinspirasi dari model konflik Galtung. Berikut merupakan gambar kurva eskalasi dan de-eskalasi konflik:



Source: O. Ramsbotham, H. Miall, T. Woodhouse, *Contemporary Conflict Resolution*, Cambridge: Polity Press, 2011, p. 13.

Gambar 2.4 Conflict Escalation and De-escalation model Ramsbotham

Sumber: O. Ramsbotham, H. Miall/ M. Mukhsin Jamil

Secara umum, model tersebut membagi tahapan konflik menjadi dua fase utama yaitu fase eskalasi dan fase de-eskalasi. Dalam fase eskalasi, terdapat 5 tahap, yaitu: Perbedaan, Kontradiksi, Polarisasi,

Kekerasan, dan Perang. Tahap perbedaan (*difference*) merupakan bagian dari perkembangan sosial yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat. Perbedaan tersebut dapat berupa perbedaan nilai maupun struktur. Setelah melalui tahap perbedaan, konflik menuju tahap kontradiksi.

Ramsbotham meminjam istilah *Contradiction* dari Galtung yang didefinisikan sebagai situasi ketika adanya ketidakcocokan tujuan dari pihak-pihak yang berkonflik. Ketidakcocokan ini dapat disebabkan karena tidak sepadannya nilai-nilai dan struktur sosial dalam suatu masyarakat. Dalam kedua tahap ini, biasanya konflik belum mencuat ke permukaan. Tahap ketiga yaitu tahap dimana konflik mulai nampak ke permukaan. Antar pihak yang berkonflik mulai terlihat saling bertentangan dan kubu-kubu atau kelompok-kelompok mulai terbentuk. Tahap ini disebut dengan polarisasi. Puncak dari pertentangan antar kedua belah pihak adalah tahap kekerasan dan perang. Pada tahap kekerasan, pengerahan pasukan bersenjata tidak selalu terjadi, namun pada tahap perang pihak-pihak yang berkonflik mengerahkan pasukan senjatanya secara penuh untuk menghancurkan pihak lawan.

Setelah perang terjadi, konflik mulai memasuki fase kedua yaitu de-eskalasi. Dalam fase de-eskalasi, terdapat 4 tahap: Gencatan senjata, kesepakatan, normalisasi, dan rekonsiliasi. Tahap gencatan senjata (*Ceasefire*) disertai oleh akhir permusuhan, penarikan kekuatan, dan mendiskusikan hubungan bilateral yang sebelumnya telah ada. Tahap ini diikuti oleh tahap kesepakatan (*agreement*). Tahap ini terjadi ketika kedua belah pihak sudah siap untuk masuk ke tingkat pembicaraan yang lebih tinggi. Mereka juga biasanya menandatangani perjanjian bilateral untuk memperkuat kerjasama antar kedua belah pihak. Selain itu, mereka berjanji untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalur damai.

Ketika dua tahap ini terlewati, maka tahap selanjutnya adalah normalisasi (*normalization*). Normalisasi terjadi pada kondisi pasca perang yang tampak ketika suatu negara memiliki kapasitas untuk melakukan atau mewujudkan hal-hal sebagai berikut yaitu keamanan bermasyarakat, budaya kekerasan yang sudah bertransformasi, pengadilan dan polisi yang tidak lagi dipolitisasi, respek terhadap hak-hak individu dan minoritas, penurunan kejahatan yang terorganisir, pemindahan kekuasaan yang damai lewat pemilu yang demokratis, dan lain sebagainya. Sedangkan fase terakhir, rekonsiliasi (*reconciliation*) didefinisikan sebagai pengembalian hubungan yang terputus dan belajar untuk hidup tanpa kekerasan dengan menerima bentuk-bentuk perbedaan (*differences*).

2.1.2.3 Pendekatan *Local Wisdom* (Kearifan Lokal)

Local Wisdom atau yang lebih dikenal dengan kearifan lokal merupakan sebuah nilai atau adat istiadat dalam setiap daerah atau wilayah yang memiliki nilai atau muatan kebijaksanaan. Dalam pendekatan yang menggunakan kearifan lokal ini menjadi salah satu metode alternatif yang dapat diterapkan sebagai metode dalam upaya menyelesaikan konflik. Situmorang dan Simanjuntak, 2015 menyatakan bahwa kearifan lokal tidak sama pada tempat, waktu dan suku bangsa. perbedaan ini disebabkan oleh tantangan alam dan kebutuhan hidup yang berbeda-beda sesuai dengan lingkungan alam dan sosialnya.⁴⁰ Kearifan lokal merupakan sebuah tawaran strategi dalam proses penanganan konflik dengan fokus kajian pada realitas wilayah konflik terjadi. Kearifan lokal menjelaskan mengenai nilai-nilai yang disepakati oleh masyarakat secara sukarela.

Awal mula pembentukan kearifan lokal yang ada didalam masyarakat umumnya tidak diketahui secara pasti kapan kearifan lokal tersebut muncul, hal ini terbentuk karena tradisi tentang masa lalu dari

⁴⁰ Bambang Wahyudi, *Penanganan Konflik Pendekatan Kearifan Lokal*, Yogyakarta. September 2018 Hlm 37

generasi sebelumnya yang kemudian diturunkan kegenerasi selanjutnya. Geertz (1983) menegaskan bahwa kearifan lokal merupakan entitas yang sangat menentukan harkat dan martabat manusia di dalam komunitasnya. Hal itu yang berarti bahwa kearifan lokal berisi unsur kecerdasan kreativitas dan pengetahuan lokal dari para elit dan masyarakatnya adalah menentukan dalam pembangunan peradaban masyarakatnya.⁴¹

Wasino (2006) mengungkapkan bahwa setiap tradisi tentunya memiliki makna penghormatan terhadap leluhur dan juga memiliki nilai positif sebagai bentuk hubungan yang berkeseimbangan antara generasi ke generasi terdahulu dengan generasi berikutnya.

2.1.3 Konsep Keamanan Nasional

Konsep *national security* atau konsep keamanan nasional merupakan suatu konsep yang harus dimiliki oleh suatu negara yang berorientasi kepada pertahanan dan keamanan negara secara militer. Tugas utama suatu negara dalam meniadakan ancaman yang kemudian dituangkan dalam strategi pertahanan negara adalah keamanan nasional. Perkembangan tantangan dan ancaman sekarang ini bukan hanya kepada tantangan yang bersifat militer tetapi juga nir militer sehingga dalam berbagai penyelesaiannya pun tidak menggunakan kekuatan militer namun dengan kekuatan nir militer.

Keamanan Nasional dapat dimaknai baik sebagai kondisi maupun sebagai fungsi, sebagai fungsi keamanan nasional akan memproduksi dan menciptakan rasa aman dalam pengertian luas yang didalamnya tercakup rasa nyaman, damai, tentram dan tertib. Kondisi keamanan semacam ini merupakan kebutuhan dasar umat manusia di samping kesejahteraan. Pemahaman terhadap makna dan substansi yang

⁴¹Bambang Wahyudi, Penanganan Konflik Pendekatan Kearifan Lokal, Yogyakarta. September 2018 Hlm 39-40

terkandung didalamnya akan bervariasi tergantung kepada tata nilai persepsi dan kepentingan.

Reformasi keamanan di Indonesia masih terus berlangsung, akan tetapi dinamika lapangan masih mengindikasikan belum ada terwujudnya kesepahaman bersama terhadap substansi keamanan nasional, maka tidaklah mengherankan apabila draf RUU kamnas yang disiapkan pemerintah masih menemui banyak kendala dan hambatan. Penyebabnya antara lain dikarenakan para pihak terkait masih mempunyai persepsi yang berbeda tentang pengembangan konsep dan sistem keamanan nasional Indonesia yang mampu menampung kepentingan bangsa Indonesia.

Idealisme tentang keamanan nasional yaitu melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Idealisme ini sangat luas karena melindungi seluruh bangsa Indonesia yang mencakup perlindungan terhadap warga negara yang dalam pengertian universal sering diberi makna human security dan hak asasi manusia, perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap negara. Sektor keamanan tidak hanya bertujuan mengamankan negara, tetapi sekaligus juga mengamankan keselamatan warga negara dan umat manusia, karena konsep keamanan lebih dipandang sebagai satu kesatuan yang menyeluruh mencakup pertahanan negara (*defence*), Keamanan dalam negeri (*Internal security*) Keamanan public (*Public security*) dan Keamanan insani (*Human security*).

Dimensi dari keamanan nasional adalah militer dan non militer, Termasuk non militer adalah dan terutama; Keamanan ekonomi (*Economic security*), Keamanan energi (*Energy security*), Keamanan lingkungan (*enviromtent Security*) dan Keamanan manusia (*Human security*) Keamanan nasional mencakup pencegahan-tangkal ancaman dari (*actor*) negara maupun (*actor*) non negara dan ancaman bencana

alam yang dapat menghancurkan suatu negara. Istilah keamanan mempunyai pengertian yang beraneka ragam sehingga tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi harus dikaitkan dengan sesuatu, misalnya keadaan atau kondisi bebas dari gangguan fisik, maupun psikis, terlindunginya keselamatan jiwa dan terjaminnya harta benda dari segala macam ancaman gangguan dan bahaya.

Sistem pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah mekanisme pertahanan semesta yang mencakup pertahanan militer dan nir-militer, dengan tujuan untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melindungi seluruh aspek kehidupan dari setiap ancaman yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Dalam buku yang berjudul Melindungi Negara, Syaiful Anwar menjelaskan bahwa mempertahankan negara diartikan sebagai mencegah dan menangkis serangan lawan yang dilancarkan terhadap negara. Hal ini dinyatakan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002, tentang Pertahanan Negara, yang menyatakan bahwa pertahanan negara adalah :

Segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Prinsip-prinsip pertahanan negara disebutkan dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 sebagai berikut :

- 1) Pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai.
- 2) Pertahanan negara disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara Kepulauan.

Dalam Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan No 16 Tahun 2012 tentang kebijakan pengintegrasian komponen pertahanan negara disebutkan bahwa pertahanan negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa. Upaya-upaya untuk mempertahankan negara memerlukan dukungan dari berbagai sektor, salah satunya dukungan dari sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana dalam bentuk pertahanan negara dan perlawanan bersenjata merupakan bagian dari administrasi dan transportasi.

Menurut Barry Buzzan bahwa studi keamanan merupakan cabang dari politik. Dasar masalah yang mendasari hampir semua minat dalam hubungan internasional adalah ketidakamanan. Pengaruh serta status kekuasaan dan kedamaian yang diperoleh sebagai konsep inti berasal dari wawasan, dan panduan untuk tindakan yang mereka tawarkan. Perkembangan keamanan tradisional dilakukan oleh Barry Buzzan yang mengkategorikan lingkup isu keamanan kedalam 5 sektor yaitu : Sektor militer, Sektor politik, Sektor ekonomi, Sektor sosial dan Sektor lingkungan. Konsep dan sistem keamanan nasional itu sendiri harus senantiasa didasarkan pada Pancasila, baik sebagai falsafah hidup bangsa maupun sebagai sumber segala sumber hukum nasional, dan amanat keamanan yang tertuang di dalam UUD RI Tahun 1945, dengan tetap memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan strategis sehingga akan mampu menjawab setiap tuntutan jaman.

Berhubungan dengan sistem pertahanan dalam konsep keamanan nasional, Pembangunan bandara adalah pembangunan infrastruktur yang merupakan salah satu sarana dan prasarana dalam sistem pertahanan dalam suatu negara, dimana hal ini akan menjadikan sebagai salah satu bentuk pertahanan negara dalam bidang transportasi, seperti yang kita ketahui bersama bandara merupakan pusat atau pintu menuju berbagai negara dibelahan dunia, Bandar udara merupakan prasarana transportasi

yang sangat penting. Prasarana transportasi tersebut sangat berperan penting karena mendukung pelaksanaan pergerakan sarana perhubungan serta pengangkutan orang dan barang dari suatu tempat ketempat lain.

Keamanan nasional akan terbentuk jika sistem pertahanan suatu negara berkembang dan berkemajuan baik dalam teknologi maupun perkembangan sarana dan prasarana yang mendukung pertahanan dan keamanan suatu negara. Pembangunan sarana dan prasarana akan terhambat jika didalamnya terjadi konflik yang berkepanjangan dan tidak terselesaikan, karena semua itu akan berdampak kepada terpenuhinya kemampuan negara dalam memfasilitasi atau mempersiapkan sarana dan prasarana yang mendukung demi terciptanya pertahanan negara.

2.1.4 Undang-Undang Pertanian/Agraria

Dalam pembangunan bandara BIJB Kertajati menyebabkan lahan-lahan pertanian di kecamatan tersebut menjadi beralih fungsi yang semula sebagai lahan pertanian sebagai sumber penghasilan wilayah setempat namun setelah dibangunnya bandara BIJB Kertajati ini lahan pertanian sebagian besar sudah merupakan bangunan dari infrastuktur bandara.

Dalam undang-undang No 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani pada pasal 98 disebutkan bahwa :

Masyarakat dalam Pemberdayaan Petani dapat berperan serta dalam menyelenggarakan: a. pendidikan nonformal; b. pelatihan dan pemagangan; c. penyuluhan; d. pencegahan alih fungsi lahan Pertanian; e. penguatan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani; f. pemberian fasilitas sumber pembiayaan atau permodalan; dan/atau g. pemberian fasilitas akses terhadap informasi.

Kemudian di Pasal 14 Undang-undang No 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok agraria, Pada pasal ini mengatur soal perencanaan, persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan

ruang angkasa sebagai yang telah dikemukakan dalam Penjelasan Umum (II angka 8). Mengingat akan corak perekonomian negara di kemudian hari dimana industri dan pertambangan akan mempunyai peranan yang penting, maka di samping perencanaan untuk pertanian perlu diperhatikan, pula keperluan untuk industri dan pertambangan (ayat 1 huruf d dan e).

Perencanaan itu tidak saja bermaksud menyediakan tanah untuk pertanian, peternakan, perikanan, industri dan pertambangan, tetapi juga ditujukan untuk memajukannya. Pengesahan peraturan Pemerintah daerah harus dilakukan dalam rangka rencana umum yang dibuat oleh Pemerintah pusat dan sesuai dengan kebijaksanaan pusat.⁴² Disebutkan bahwa perencanaan lahan pertanian dapat ditujukan untuk memajukannya sesuai dengan rencana umum yang di buat pemerintah pusat dan sesuai kebijaksanaan pusat.

Dalam lampiran Undang-Undang Agraria disebutkan bahwa tujuan Undang-Undang Pokok Agraria adalah :

- a. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria Nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur;
- b. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan;
- c. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

⁴² Kementerian Agraria dan tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional , Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria.

2.1.5 Undang-undang Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Pembebasan tanah menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Ba.12/108/1275 adalah setiap perubahan yang bermaksud langsung atau tidak langsung melepaskan hubungan hukum yang ada antara pemegang hak /penguasa atas tanahnya dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang berhak/penguasa tanah itu. Arti pembebasan tanah secara tekstual yang tercantum salah satunya adalah: 1. UU Nomor 2 Th. 2012 dalam pasal 1 angka 2 dijelaskan bahwa Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti rugi kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. 2. Perpres Nomor 71 Tahun 2012 dijelaskan dalam pasal 1 angka 2, Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.⁴³ Juga disebutkan pada bagian kedua tentang perencanaan pengadaan tanah pasal 14 ayat 2 dijelaskan Perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana di maksud didasarkan atas rencana tata ruang wilayah dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMN, rencana strategis, rencana kerja pemerintah instansi yang bersangkutan. Pasal 40 Pemberian ganti kerugian atas objek pengadaan tanah diberikan langsung kepada pihak yang berhak.

Dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum secara yuridis ada tahapannya yaitu sosialisasi, Negosiasi, eksekusi dan konsinyasi. Apabila tahapan per tahap sudah di tempuh tetapi pemilik hak masih ada yang kontra maka bisa dilakukan langkah eksekusi dan konsinyasi. Mengacu kepada UU No 2 tahun 2012 bahwa kewenangan pengadilan negeri dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu menerima laporan keberatan dari pemilik tanah selambat-lambatnya 14 hari dan

⁴³ Mudakir Iskandar syah SH.,M.H *Pembebasan tanah untuk pembangunan kepentingan umum*, Permata Aksara, Jakarta 2015, Hlm 1-2

pengadilan negeri akan memproses waktu 30 hari apabila tidak tercapai keputusan atau jika tidak terima bisa naik ke MA, dan apabila dalam 14 hari tidak ada laporan keberatan maka pemilik asset dianggap setuju dan Pengadilan negeri akan menerima proses konsinyasi atau titipan uang ganti rugi (UGR)

2.1.6 Undang-Undang Kebijakan umum pembangunan Bandara.

Undang-undang yang mengatur tentang kebijakan umum Kebandarudaraan terdapat dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 70 tahun 2001 tentang kebandarudaraan, kemudian terdapat di Rencana Pemerintah Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 pada point VIII tentang pembangunan Infrastruktur selain rencana pembangunan dari berbagai sektor, Rencana pembangunan bandara di kabupaten Majalengka telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 5 tahun 2007 tentang rencana induk bandar udara di Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, yang di tanda tangani oleh Menteri Perhubungan saat itu M. Hatta Rajasa pada tanggal 19 Februari 2007. Kebijakan pembangunan bandara yang menjadi proyek nasional pun telah di atur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis Nasional, dimana pembangunan bandara BIJB Kertajati ini berada pada urutan ke 83 dari 225 proyek strategis nasional lainnya.

2.2 Penelitian terdahulu

2.2.1 Penelitian oleh Adi Noverdi dengan judul “ Pengadaan Tanah bagi pembangunan perpanjangan landasan Pacu Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang”

Tesis ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Lokasi penelitian di Kecamatan Sukarame Kota Palembang. Metode penentuan sampel menggunakan non random sampling dengan metode *purposive sampling*.

Metode Pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis dalam penulisan tesis ini menggunakan analisis data kualitatif. Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan pengadaan tanah yang dilakukan oleh Pemerintah kota Palembang dan instansi-instansi yang terkait dalam pembangunan perpanjangan landasan pacu bandara Sultan Mahmud Baddaruddin Palembang juga untuk mengetahui kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pembebasan tersebut dan upaya penyelesaiannya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pengadaan tanah yang dilakukan oleh panitia Pengadaan tanah dalam pembangunan perpanjangan landasan pacu bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II di Palembang, serta menganalisis kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pembebasan lahan tersebut dan bagaimana upaya penyelesaiannya.

Dalam kesimpulan yang didapat bahwa dalam pelaksanaan pembebasan tanah ini memang terdapat beberapa kendala yang menghambat proses pembebasan tanah tersebut, antara lain pada tahap musyawarah untuk menetapkan besarnya ganti rugi yang akan diberikan, adanya jalan umum yang masuk kedalam koridor areal pembebasan lahan, adanya bukti kepemilikan tanah berupa surat asli yang tidak dipegang atau telah hilang, sehingga perlu diperbaharui dengan prosedur yang berlaku. Pelaksanaan pengadaan tanah untuk perpanjangan landasan pacu Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang dapat dikatakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mulai dari tahap penetapan lokasi, penyuluhan, penentuan batas lokasi dan inventarisasi, pengumuman hasil inventarisasi, musyawarah mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian, penetapan nilai ganti rugi, keberatan terhadap keputusan panitia, pelaksanaan pemberian ganti

kerugian sampai dengan tahap pelepasan dan penyerahan hak atas tanah.

2.2.2 Penelitian oleh Ervan Wirawan berjudul :”Konflik Pembebasan Tanah pembangunan Jalan Tol Jombang-Mojokerto Studi Desa Watukadon Kabupaten Jombang”⁴⁴

Penelitian tentang konflik pembebasan lahan di Lokasi penelitian dilakukan di Jombang Mojokerto. Pembangunan dilakukan untuk mempermudah mobilitas kendaraan. Pembangunan ini sudah sangat berlarut-larut dan tidak ada kesepakatan harga penggantian kerugian tersebut. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan dengan studi pustaka, observasi, dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik terjadi disebabkan ketidaksepakatan ganti rugi tanah antara warga dengan panitia pengadaan tanah. Analisis menggunakan perpektif konflik Ralf Dahrendorf yang melihat bahwa wewenang dan posisi dalam warga Desa Watudakon antara panitia pengadaan tanah untuk pambangunan jalan tol Jombang- Mojokerto memiliki perbedaan. Warga harus mengikuti aturan dan prosedur yang ada untuk mempermudah pembebasan lahan, namun konflik masih terjadi karena sebagian warga ada yang sudah menerima namun sebagaian warga juga masih ada yang menginginkan harga tanah yang lebih tinggi lagi dari yang sudah di tetapkan oleh pemerintah. Dialektika konflik kekuasaan antara panitia pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Jombang-Mojokerto dan warga Desa Watudakon disulut oleh beberapa kepentingan yang berbeda.

⁴⁴ Wirawan, Ervan , *Konflik Pembebasan Tanah pembangunan jalan tol Jombang-Mojokerto Studi Desa Watukadon Kabupaten Jombang* 2017 pada Jurnal Politik Muda, Vol.6, No.1, Januari –Maret 2017

2.2.3 Penelitian oleh Purwasandi judul “Resolusi Konflik lahan antara PT Duta Palma Nusantara dan Masyarakat Empat Kenegerian di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau”

Penelitian yang dilakukan oleh Purwasandi tentang resolusi konflik di kabupaten Kuantan Singingi provinsi Riau. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab mengapa terjadi penyerangan terhadap perusahaan oleh masyarakat dalam konflik lahan. Adapun penelitian yang digunakan melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Konflik terjadi karena adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap perusahaan, yang menyebabkan penyerangan terhadap perusahaan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyerangan terhadap perusahaan tersebut dikarenakan HGU perusahaan yang diperpanjang namun tidak melibatkan masyarakat adat, eskalasi konflik lahan antara masyarakat dan perusahaan berada pada tingkatan *strategies of threat* yang seharusnya di selesaikan dengan *process accompaniment* dan *classical mediaton* karena sudah menimbulkan *tension*, sehingga dapat diselesaikan dengan tuntas.

Persamaannya dari penelitian ini adalah sama-sama menganalisis konflik lahan. dan menganalisis resolusi konflik yang terjadi. Menggunakan metode yang sama yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menggunakan kerangka dinamis Ichsan Malik untuk mengetahui akar dari konflik yang terjadi, serta konsep Ramsbotham untuk mempertajam dalam menganalisis resolusi Konflik yang ada. Perbedaannya dari penelitian ini adalah di lokasi yang berbeda, kemudian konflik yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat dalam penggunaan lahan PT. Duta Palma Nusantara.

2.2.4 Penelitian oleh Waluyo Zulfikar dan Yayat Rukayat “Dampak sosial, Ekonomi dan Politis dalam pembangunan bandara udara Kertajati di kabupaten Majalengka”

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan adalah penelitian oleh Wahyu Zulfikar dan Yayat Rukayat (2017) di wilayah bandara Internasional Jawa Barat (BIJB).⁴⁵ Penelitian ini menganalisa dampak sosial, ekonomi dan politis dalam proses pembangunan Bandara Kertajati kabupaten Majalengka yang diindikasikan belum optimal dalam proses pelaksanaan pembangunannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mendalami makna dari satu fenomena yang terjadi., teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dokumentasi, serta triangulasi.

Dalam penelitian ini di ambil kesimpulan bahwa dampak sosial, Ekonomi dan politis dalam pembangunan bandara ini masih membutuhkan perbaikan akibat dari pelaksanaan yang bertahap dan rendahnya komitmen dari semua pihak, serta belum terperhatikannya persepsi dan ekspektasi yang terjadi di masyarakat. menggunakan teori implementasi kebijakan dari Grindle, dan di dapat beberapa temuan yaitu pertama konten kebijakan tentang beberapa penguatan yang perlu dilakukan berkenaan dengan pentingnya penegasan komitmen, kedua konteks pelaksanaan yang perlu juga diperkuat dengan peningkatan dan penyesuaian strategi para pelaksana serta kepatuhan dan tanggap terhadap kebijakan pembebasan lahan yang bertujuan untuk mampu mendukung pelaksanaan kebijakan, yang ketiga bahwa kebijakan pembebasan lahan juga tidak berdiri sendiri artinya harus bersinergiskan dengan kelembagaan dan program lain yang mendukung untuk pemenuhan harapan masyarakat seperti pemberdayaannya, peningkatan pendidikan dan pelatihan, perbaikan sarana dan prasarana umum. Dengan lokasi penelitian yang sama, dan menggunakan metode yang sama yaitu pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data yang

⁴⁵ Judul: *Dampak sosial, Ekonomi dan Politis dalam pembangunan Bandara Udara Kertajati di Kabupaten Majalengka*, Universitas Nurtanio Bandung , Terdapat dalam Jurnal Sosiohumaniora, Volume 19 No.3 Nopember 2017:225-232

sama. Menganalisis tentang kondisi sosial dan ekonomi yang ada pada masyarakat di wilayah pengrusakan lahan pembangunan.

2.2.5. Penelitian oleh Dina Kartika “Hubungan pemerintah Pusat dan daerah dalam penyelenggaraan Bandara: (Kajian atas pembangunan Bandara Kertajati di Jawa Barat)”⁴⁶

Penelitian terdahulu ini dilakukan bertujuan untuk memperoleh gambaran pembagian urusan pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan bandara di era desentralisasi dan mengetahui persepsi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap pembangunan bandara. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara dan studi dokumen. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa dalam pembangunan dan penyelenggaraan bandara dihadapkan pada beberapa hambatan yang seperti penyediaan anggaran pembangunan, pembentukan organisasi dan sumber daya manusia untuk pengelolaan bandara. Hambatan lain berupa kesulitan koordinasi yang disebabkan oleh perbedaan persepsi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Persamaan , lokasi penelitian yang sama. dalam hal ini peneliti akan berhubungan dengan pemerintah daerah setempat dalam mengkaji penyelenggaraan pembangunan bandara BIJB Kertajati dengan menggunakan metode yang sama yaitu kualitatif deskriptif dengan metode observasi, wawancara dan studi pustaka serta dokumentasi. Fokus penelitian yang dilakukan berbeda, Fokus dan sub fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengenai analisis konflik yang terjadi dan bentuk proses yang ada melalui tahapan resolusi konflik agar konflik tidak kembali terjadi.

⁴⁶ Judul : *Hubungan pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Bandara (Kajian atas pembangunan Bandara Kertajati di Jawa Barat)*, Tesis, Institut Teknologi Bandung , 2015

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

No	JUDUL	PENULIS	METODE	PERSAMAAN	PERBEDAAN	KET
1.	Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Perpanjangan Landasan Pacu Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang	Adi Noverdi	Menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis.	Menganalisis tentang pengadaan tanah untuk pembangunan bandara dan menganalisis kendala-kendala yang timbul dalam pembebasan tanah tersebut .	Lokasi yang berbeda, yang penelitian terdahulu di lakukan di Palembang sedangkan yang akan di lakukan oleh peneliti adalah Di Kabupaten Majalengka . Menggunakan metode yang berbeda , pada penelitian terdahulu	Tesis Program Studi Kenotariatan pada Universitas Diponegoro Tahun 2010

					menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. sedangkan yang peneliti lakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif	
2.	Konflik Pembebasan Tanah pembangunan Jalan Tol	Ervan Wirawan	Menggunakan Analisis perpektif konflik Ralf Dahrendolf yang melihat	Pesamaan: menganalisis konflik pembebasan lahan untuk kepentingan pembangunan yang	Dalam menggunakan analisis menggunakan perspektif konflik	Jurnal Politik Muda, Vol.6, No.1, Januari-Maret 2017

	Jombang- Mojokerto Studi Desa Watukadon Kabupaten Jombang		bahwa wewenang dan posisi dalam warga Desa Watudakon antara panitia pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Jombang Mojokerto memiliki perbedaan	dilaksanakan oleh pemerintah Sama-sama tidak sesuai kesepakatan harga tanah yang dimiliki oleh masyarakat atas pembebasan lahan untuk pembangunan tersebut .	Ralf Dahrendorf, sedangkan pada penelitian yang dilakukan menggunakan analisis SAT,Teori Glasl . Lokasi penelitian yang berbeda, pada penelitian ini pembangunan yang dilakukan adalah pembangunan jalan tol, sedangkan yang di teliti oleh peneliti adalah Pembangunan Bandara.	
--	---	--	---	---	---	--

3.	Resolusi konflik lahan antara PT Duta Palma Nusantara dan Masyarakat empat kenegerian di kabupaten Kauntan Singingi propinsi riau	Purwandi	Kualitatif dengan Pendekatan deskriptif	Persamaannya dari penelitian ini adalah sama-sama menganalisis konflik lahan. dan menganalisis resolusi konflik yang terjadi. Menggunakan metode yang sama yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif Menggunakan kerangka dinamis ichsan malik untuk mengetahui akar permasalahan dari konflik yang terjadi	Perbedaannya dari penelitian ini adalah di lokasi yang berbeda, kemudian konflik antara Perusahaan PT Duta Palma Nusantara dan masyarakat, Sedangkan di penelitian yang dilakukan yaitu konflik antara masyarakat dan pemerintah dalam pembangunan bandara BIJB , baik	Jenis penelitian Tesis Universitas Pertahanan , Fakultas Strategi pertahanan program studi damai dan resolusi konflik Februari 2016
----	---	----------	---	---	--	---

					dengan masyarakat yang pro maupun masyarakat yang kontra.	
4.	Dampak sosial, Ekonomi dan Politis dalam pembangunan bandara udara Kertajati di kabupaten Majalengka	Waluyo Zulfikar dan Yayat Rukayat	Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara , observasi dan dokumentasi , Teori implementasi	Dengan lokasi penelitian yang sama, dan menggunakan metode yang sama yaitu pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data yang sama. Menganalisis tentang kondisi sosial dan ekonomi yang ada pada masyarakat di wilayah pengusuran	Perbedaanya menganalisa dampak soaisl, ekonomi dan politis dalam proses pembangunan , menggunakan teori implementasi kebijakan sedangkan yang akan dilakukan peneliti adalah teori konflik SAT dan	Universitas Nurtanio Bandung, Jurnal Sosiohumani ora, Volume 19 No.3 Nopember 2017:225-232

			kebijakan dari Gridle, kebijakan pembebasan lahan bertujuan untuk mampu mendukung pelaksanaan kebijakan.	lahan pembangunan	meneliti tentang resolusi konflik yang ada sehingga pembangunan bandara tetap berlanjut dan sudah di resmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 8 Juni 2018 lalu.	
5.	Hubungan pemerintah Pusat dan daerah dalam penyelenggaraan Bandara: (Kajian	Dina Kartika	Metode kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. keudian data di peroleh melalui	Persamaan , lokasi penelitian yang sama. dalam hal ini peneliti berhubungan dengan pemerintah daerah setempat dan aparat	Fokus penelitian yang berbeda, Focus penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti yaitu mengenai	Tesis , Institut Teknologi Bandung 2015

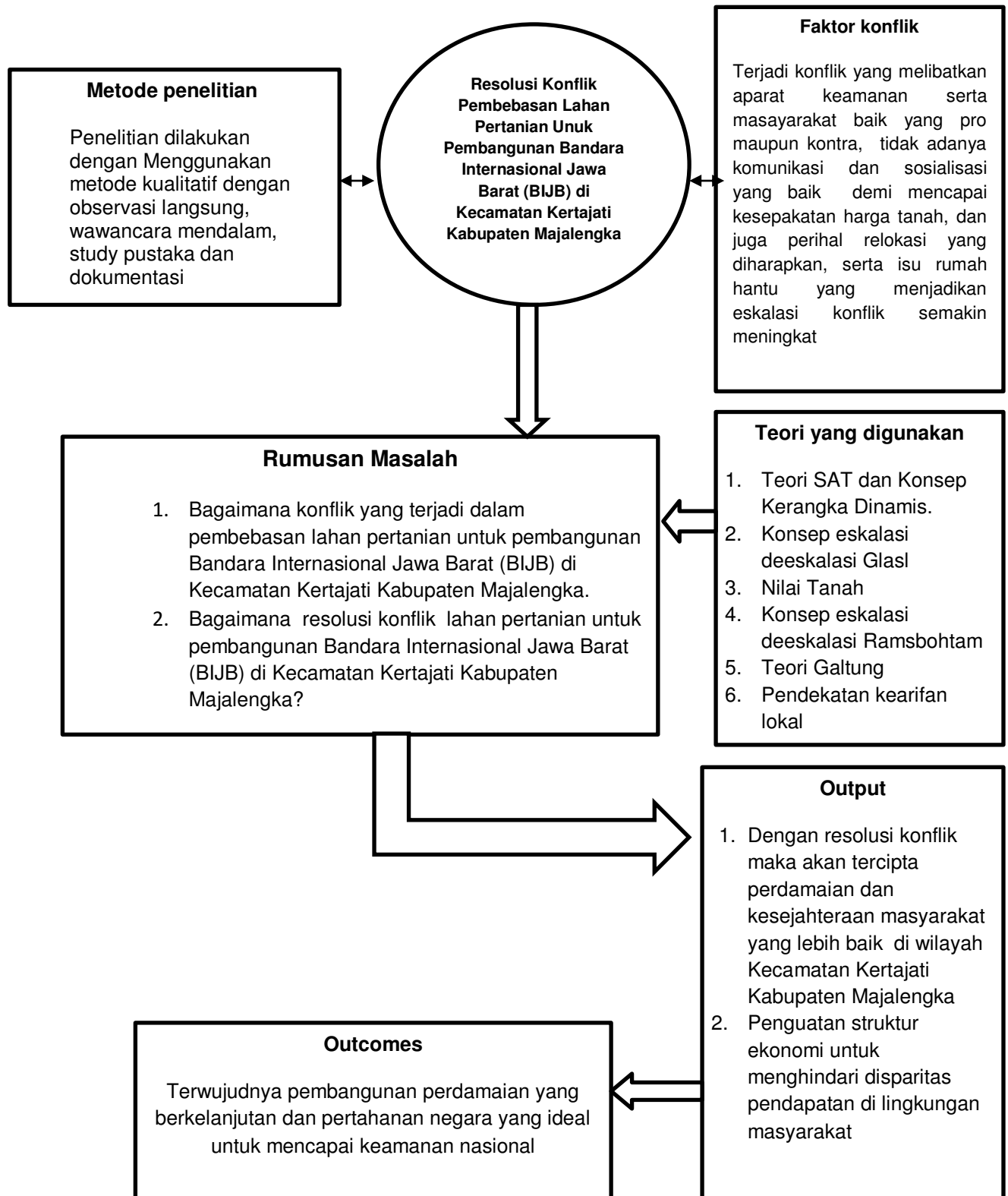
	atas Pembangunan Bandara Kertajait di Jawa Barat)		observasi lapangan, wawancara dan studi dokumen	keamanan serta masyarakat yang pro dan kontra dalam mengkaji pelaksanaan pembangunan bandara BIJB Kertajati. Menggunakan metode yang sama yaitu kualitatif deskriptif dengan metode Observasi, Wawancara dan studi pustaka serta dokumentasi.	analisis konflik yang terjadi dan bentuk proses yang ada melalui tahapan resolusi konflik agar konflik tidak kembali terjadi.	
--	--	--	--	---	---	--

2.3 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini menganalisis tentang faktor-faktor penyebab konflik yang terjadi didalam pembebasan lahan pertanian bandara BIJB Kertajati, serta resolusi konflik yang dilakukan dalam penanganan konflik dikecamatan tersebut. Adapun kerangka pemikiran konflik yang terjadi dalam pembangunan Bandara BIJB Kertajati maka peneliti membuat rumusan masalah yang di teliti dengan menggunakan teori analisis konflik yang terjadi, dimana didalamnya menggunakan teori SAT dan konsep kerangka dinamis, teori Glasl, teori Galtung, Konsep model eskalasi deeskalasi Ramsbotham serta melalui pendekatan kearifan lokal atau *local Wisdom*.

Hasil pengumpulan data yang diperoleh dengan mengacu kepada teori dan konsep yang ada maka di lanjutkan dengan analisis data dan diolah data yang ada apakah data-data yang dibutuhkan sudah terkumpul, jika belum maka dilanjutkan dengan mencari data kembali sampai data yang dibutuhkan didapatkan oleh peneliti. Setelah semua proses tersebut dilalui, maka berdasarkan data yang diperoleh mendapat hasil yang sesuai dengan rumusan masalah yang di teliti. Kemudian berdasarkan hal itu maka ada didapatkan *outputnya* yaitu terciptanya perdamaian dan kesejahteraan masyarakat di wilayah bandara Kertajati, dan juga Penguatan struktur ekonomi untuk menghindari disparitas pendapatan di lingkungan masyarakat serta *outcomenya* yaitu Terwujudnya pembangunan perdamaian yang berkelanjutan dan pertahanan negara yang ideal untuk mencapai keamanan nasional. Berdasarkan semua proses tersebut maka ada kesimpulan dan rekomendasi yang di jelaskan oleh peneliti. Adapun bagan dari kerangka pemikiran yang dijelaskan adalah sebagai berikut:

Kerangka Pemikiran



BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

3.1.1 Tempat Penelitian

Tempat atau lokasi penelitian merupakan objek penelitian terkait dengan tempat kegiatan penelitian yang dilakukan. Penentuan lokasi menjadi sangat penting karena hal ini merupakan keterhubungan dengan data-data yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian, serta pertimbangan dari segi waktu, biaya dan tenaga dalam menentukan lokasi penelitian. penentuan lokasi dimaksudkan untuk mempermudah dan memperjelas objek yang menjadi sasaran dari penelitian.

Penelitian yang dilakukan adalah di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, lebih dikhususkan di desa Sukamulya. Kertajati merupakan kecamatan di mana lahan pertanian yang dimiliki oleh masyarakat terdampak penggusuran akibat adanya proyek pembangunan bandara BIJB Kertajati yang merupakan proyek strategis nasional dari pemerintahan Presiden RI Joko Widodo, dan pembangunan bandara BIJB Kertajati adalah salah satu dari 225 proyek strategis nasional yang telah dicanangkan.

3.1.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang ditetapkan dalam penelitian dimaksudkan untuk mempermudah peneliti dalam mengumpulkan dan mencari data yang dibutuhkan, Penelitian konflik ini dilakukan pada periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, dalam penelitian ini gambaran waktu penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

N o	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan									
		Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
1.	Pengajuan Judul Proposal Tesis										
2.	Penyusunan Proposal Tesis										
3.	Bimbingan										
4.	Seminar Pra Proposal										
5.	Revisi Usulan Proposal Tesis										
6.	Ujian Proposal Tesis										
7.	Penelitian Lapangan dan Pengolahan Data										
8.	Penyusunan Hasil penelitian										
9.	Ujian Pra Tesis										
10.	Ujian Tesis										
11.	Perbaikan Naskah Tesis										
12.	Penyerahan Tesis										

3.2 Subjek dan Objek Penelitian

3.2.1 Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam hal ini berupa benda, hal, atau pun orang. Dengan demikian, secara umum subjek penelitian merupakan manusia atau hal-hal yang menjadi urusan manusia itu sendiri.⁵⁷ Oleh karena itu,

⁵⁷ Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Penerbit PT Rineka Cipta. hlm 152

dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Subjek Penelitian

No	Instansi	Jabatan	Narasumber
1.	Pemerintah Daerah Majalengka	Sekretaris Daerah	H. Achmad Diki, M.M
2.	Kesbangpol	Kepala Kesbangpol	Akbar Suarya Harto, S.Pd
3.	Badan Pusat Statistik	Kepala Badan Pusat Statistik	Aris Budiyanto, S.ST., M.Si
4.	Sat Pol PP	Katibum Satpol PP	Deddy
5.	Bapelitbangda Majalengka	Kepala Bapelitbangda	Drs. Eddy Noor Sudjatmiko, M.Si
6.	KODIM 0617	Komandan	Letkol Arm Novi Herdian, S.H., M.M
7.	KODIM 0617	Pasi Intel	Dedi Kusnadi
8.	KODIM 0617	Anggota Intel	Isya
9.	Polsek Kertajati	Kapolsek Kertajati	AKP. H Tatang
10.	Lembaga Badan Hukum Kab. Majalengka	Direktur LBH	H. Tatan Hartono BE, S.H
11.	Kecamatan Kertajati	Camat Kertajati	Aminudin, S.Sos., M.M
12.	Perangkat Desa Sukamulya	Kepala Desa Sukamulya	Nono Darsono, S.H
13.	Perangkat Desa Sukamulya	Juru Tulis/ Sekretaris Desa	Ulis
14.	Badan Pertanahan Nasional Kab. Majalengka	Kepala Bagian pengadaan tanah	H. Nunang
15.	Masyarakat Kontra	Warga Desa Sukamulya	Bambang Nurdiansyah, S.Pd
16.	Masyarakat Pro	Warga Desa Sukamulya	Sopiah DKK
17.	PT BIJB	<i>Finance and Administration staff</i>	Nadia Maulina

3.2.2 Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2002), bahwa objek penelitian ini merupakan pusat kegiatan yang diteliti, atau yang menjadi sasaran penelitian. Oleh karena itu objek penelitian yang dilakukan yaitu terkait dengan analisis konflik dan resolusi konflik pembebasan lahan pertanian untuk pembangunan bandara BIJB di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Creswell (1998:15) menekankan suatu gambaran yang kompleks dan holistik, suatu rujukan pada naratif yang kompleks dan mengajak pembaca ke dalam dimensi jamak dari sebuah masalah atau isu yang menyajikannya dalam semua kompleksitasnya.⁵⁸ Sementara itu menurut Lodico, Spaulding, dan Voegtler (2006), penelitian kualitatif juga disebut sebagai penelitian interpretif atau penelitian lapangan adalah suatu metodologi yang di pinjam dari disiplin ilmu seperti sosiologi dan antropologi dan di adaptasi kedalam *setting* pendidikan.⁵⁹ Dalam pengumpulan data ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data kualitatif dalam penelitian kualitatif, Dalam hal ini teknik pengumpulan data akan dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

3.3.1 Observasi

Observasi telah dilakukan pada bulan Mei 2018 dengan mengamati kondisi yang ada di wilayah tersebut. Dalam pengamatan awal ini peneliti belum berinteraksi dan belum berkomunikasi langsung dengan instansi dan masyarakat setempat, baik tentang resolusi konflik maupun tentang konflik itu sendiri yang pernah beberapa waktu lalu mencuat kepermukaan, Pada tahapan observasi ini peneliti hanya membaca situasi

⁵⁸ Prof.Dr.Emzir,M.Pd *Metodologi penelitian kualitatif Analisi data*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2010. Hlm 2

⁵⁹ *Ibid*

yang ada dan memperhatikan kondisi tempat tinggal di sekitar wilayah tempat penelitian yang akan dilakukan.

3.3.2 Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses di mana dengan wawancara ini didapatkan informasi melalui tanya jawab secara tatap muka untuk memperoleh data yang mendalam terkait dengan hal yang diteliti. Adapun pedoman wawancara dilakukan yaitu dengan membuat pedoman yang berbentuk pertanyaan diajukan kepada narasumber atau informan yang membantu dalam pengumpulan data yang dibutuhkan. Dalam wawancara mendalam dilakukan terhadap narasumber yang kompeten dalam memahami konflik serta resolusinya pada pembebasan lahan pertanian untuk pembangunan bandara BJB Kertajati. Dalam wawancara ini dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber ataupun informan yang memahami konteks dari permasalahan yang terjadi di wilayah tersebut. Wawancara dilakukan terhadap semua subjek penelitian, dengan lokasi waktu dan tempat yang berbeda-beda.

3.3.3 Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan langkah yang dilakukan dalam penelitian dimana hal ini merupakan cara yang dilakukan peneliti dalam memperoleh data sekunder yaitu melalui buku-buku, internet, jurnal, dokumentasi, media cetak maupun *online*, atau pun berbagai referensi yang dapat digunakan dan yang ada keterkaitannya dengan penelitian yang dijalani. Data yang diperoleh ini mampu melengkapi dan memperkuat data yang didapat dari hasil wawancara yang dilakukan secara mendalam sehingga dapat memperkuat dan memperkaya terhadap pembahasan penelitian yang dilakukan.

3.3.4 Dokumentasi

Salah satu dari teknik pengumpulan data yang tak kalah penting adalah dengan dokumentasi. Data dokumentasi tersebut tentu saja merupakan data yang terkait dengan permasalahan penelitian. Penelitian ini juga didukung oleh dokumentasi yang berbentuk gambar seperti foto-foto dari kegiatan para pihak yang terlibat dengan proses penyelesaian konflik tersebut. Dokumentasi dilakukan untuk mengabadikan kondisi yang ada dilapangan yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti, Dokumentasi ini dapat berupa gambar atau foto-foto yang dibutuhkan guna memperkuat dalam hal pengumpulan data yang dilakukan

3.4 Pemeriksaan Keabsahan Data

Nasution (2003), mengemukakan bahwa pengujian keabsahan data diperlukan untuk membuktikan kesesuaian hasil yang sudah diamati dengan fakta dan peristiwa yang sebenarnya terjadi dilapangan, harus melewati proses pengujian keabsahan untuk mengetahui akurasi data yang ada. Dengan demikian diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. *Triangulasi*. Menurut Creswell (2010), Triangulasi merupakan teknik mengumpulkan sumber-sumber data yang berbeda dengan memeriksa bukti-bukti yang berasal dari sumber-sumber tersebut dan menggunakannya untuk membangun justifikasi tema-tema secara koheren. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen lain-lain. Data yang diperoleh dari dua sumber yaitu data primer yang mencakup data yang didapat secara langsung, diamati dan di catat seperti wawancara sehingga dapat memnberikan jawaban ataupun penjelasan tentang pertanyaan penelitian di bab 1. Kemudian data sekunder didapat dari buku-buku, jurnal ilmiah, laporan, dokumentasi serta dokumen-dokumen resmi dari lembaga terkait dan institusi yang terlibat langsung dalam penyelesaian konflik dan resolusi konflik.

Kemudian di kaji melalui studi pustaka dan mengkaitkannya dengan teori-teori yang dikembangkan oleh para ahli. Selain itu ada Triangulasi metode yaitu melalui metode yang berbeda kepada sumber yang sama, Misalnya dengan metode observasi untuk memastikan kondisi yang sebenarnya, dan triangulasi waktu, yaitu digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan perubahan suatu proses dan perilaku manusia dari waktu ke waktu. Dalam pengumpulan data sebaiknya dilakukan pada pagi hari, agar narasumber masih fokus dan bersemangat dengan demikian akan memberikan data yang valid, dan dilakukan dalam situasi yang berbeda, jika masih ditemukan data yang belum sesuai maka perlu pengulangan penggalan informasi kembali hingga mendapat kepastian data.

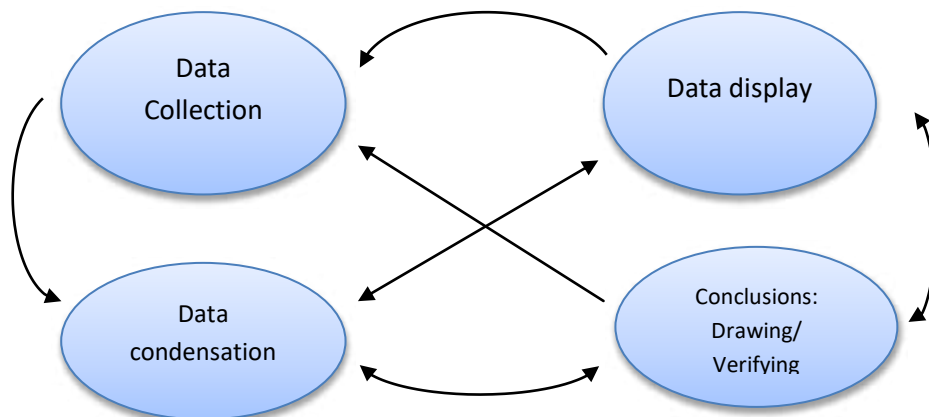
2. *Member checking*, Sugiyono (2007:129) menyatakan bahwa hal ini merupakan suatu proses di mana pengecekan data yang diperoleh dalam penelitian yang dilakukan. Proses ini memiliki tujuan untuk mengetahui tentang kesesuaian data yang telah diperoleh dengan data yang sudah diberikan oleh narasumber (Informan) atau pemberi data. Dalam proses ini hal yang dilakukan yaitu dengan meneliti kembali laporan akhir atau penjelasan data penelitian kepada informan untuk melakukan konfirmasi tentang kebenaran akan laporan yang didapat tersebut.
3. *Expert Opinion*, Dalam tahapan ini hasil temuan lapangan dikonsultasikan kepada para ahli dibidangnya termasuk pembimbing dalam penelitian.

Dengan demikian, guna menguji tentang keabsahan data dalam penelitian maka dilakukan triangulasi dengan mengumpulkan berbagai data yang diperoleh. Mengenai konflik dan resolusi konflik yang terjadi di Desa Sukamulya Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka dan juga akan dilakukan *member checking* dengan menyesuaikan data yang diperoleh terkait dengan penelitian yang dilakukan. Kemudian proses

terakhir yaitu dengan berkonsultasi dengan dosen pembimbing guna memantapkan hasil akhir dari penelitian yang dilakukan.

3.5 Teknik Analisis Data

Setelah semua data yang dibutuhkan telah diperoleh maka tahap selanjutnya yaitu dengan analisis data. Analisis data yang dilakukan menggunakan analisis data kualitatif Menurut Miles dan Huberman kegiatan dalam analisis data kualitatif. Analisis data terdiri dari beberapa tahap yang dilakukan. Tahap-tahap tersebut dilakukan di dalam proses penelitian. Tahap tersebut digambarkan sebagai berikut:⁶⁰



Gambar 3.1 Komponen Analisis data Kualitatif

Sumber: Miles,M.B., and Huberman,A.M. 2014

1. Data Collection

Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data atau *data collection* dari hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen yang didapat berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan oleh penajaman data melalui pencarian data selanjutnya. Pada langkah ini termasuk pula memilih dan meringkas dokumen yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. selama pengumpulan data adalah membuat catatan-catatan yang objektif. catatan reflektif dan

⁶⁰ Prof.Dr.Emzir,M.Pd *Metodologi penelitian kualitatif Analisi data*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2010. Hlm 129

menuliskan sekaligus mengklarifikasi dan mengedit jawaban atau situasi sebagaimana adanya, faktual atau objektif deskriptif.⁶¹

2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Yaitu mengacu kepada proses pemilihan atau seleksi fokus, menyederhanakan serta melakukan pergantian data yang terdapat pada catatan di lapangan, transkrip wawancara, dokumen maupun data empiris yang telah didapatkan. Data kualitatif tersebut dapat di ubah dengan cara seleksi, ringkasan, atau uraian menggunakan kata-kata sendiri dan lain-lain. Berdasarkan data yang dimiliki, peneliti mencari data, tema, dan pola mana yang penting, sedangkan data yang di anggap tidak penting itu dibuang.

3. Penyajian data (*Data Display*)

Pada penyajian data dilakukan dengan tujuan agar peneliti lebih mudah memahami permasalahan yang terkait dalam penelitian dan dapat melanjutkan ke langkah berikutnya. Pada umumnya penyajian merupakan suatu pengaturan, kumpulan informasi yang telah dikerucutkan sehingga dapat di tarik sebuah kesimpulan. Penyajian data dapat dilakukan dengan bagan, uraian singkat, skema dan lain-lain.

4. Pengambilan Kesimpulan (*Conclusions Drawing* atau *Verifiying*)

Merupakan langkah yang lebih lanjut dilakukan setelah kondensasi data dan penyajian data. Data yang sudah di dapat disimpulkan secara jelas. Pengambilan kesimpulan merupakan bukti terhadap penelitian yang dilakukan. Kesimpulan terakhir akan terjadi jika pengumpulan data telah selesai, tergantung kepada ukuran dan catatan di lapangan, penyimpanan serta perbaikan-perbaikan yang akan digunakan pada kesimpulan akhir ini diperoleh berdasarkan kesimpulan sementara.

⁶¹ Rahmat Sahid, *Analisis Data Penelitian Kualitatif Model Miles dan Huberman*, 2011

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum

Penelitian terhadap objek penelitian dilakukan di wilayah Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka, kemudian juga di Desa Sukamulya yaitu desa dimana konflik terjadi dalam pembebasan lahan untuk pembangunan bandara BIJB Kertajati. Selain gambaran umum tentang lokasi penelitian dijelaskan pula tentang pembangunan bandara BIJB itu sendiri berikut dengan penggunaan lahan pertanian untuk pembangunan bandara BIJB Kertajati.

4.1.1.1 Objek Penelitian Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka

Kabupaten Majalengka sendiri memiliki 26 kecamatan, dan salah satunya adalah Kecamatan Kertajati yang di pilih dengan berbagai pertimbangan sebagai lokasi pembangunan bandara Internasional di Jawa Barat tepatnya berada di Kecamatan kertajati yang telah diresmikan oleh presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 8 Juni 2018. Yang terdampak pembebasan lahan untuk kepentingan bandara yaitu terdapat Tujuh desa diantaranya Desa Kertajati, Desa Sukakerta, Desa Kertasari, Desa Mekarmulya, Desa Sukamulya, Desa Bantarjati, dan Desa Babakan. Penelitian dilakukan di Kabupaten Majalengka dan Kecamatan Kertajatidan, yang memang pernah terjadi konflik pada bulan Nopember tahun 2016.

Secara geografis Kabupaten Majalengka terletak di bagian timur propinsi Jawa Barat yaitu di sebelah barat berada di antara 108°03' – 108°19' BT, sebelah timur 108°12'-108°25' BT, sebelah utara antara 6°37'

–7°10' LS dan sebelah selatan 6°43'–7°44' LS. Batas-batas wilayah yang ada adalah sebagai berikut: a) Sebelah selatan, berbatasan langsung dengan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya, b) Sebelah barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Sumedang, c) Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Indramayu, d) Sebelah timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan.

Luas wilayah Kabupaten Majalengka adalah 1.204,24 KM², Dalam hal ini yang berarti Kabupaten Majalengka hanya sekitar 2,71% dari luas wilayah propinsi Jawa Barat, dengan ketinggian tempat antara 19 - 857 M di atas permukaan laut.⁶¹ Jika dilihat dari topografinya Kabupaten Majalengka dapat di bagi kedalam Tiga zona daerah yaitu: daerah pegunungan dengan ketinggian 500 – 857 M diatas permukaan laut dengan luas 482,02 KM² atau 40,09% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Majalengka. Untuk daerah yang bergelombang atau berbukit dengan ketinggian 50 - 500 M diatas permukaan laut dengan luas 376,53 KM² atau 31,27% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Majalengka. Daerah dataran rendah dengan ketinggian 19 – 50 M di atas permukaan laut dengan luas 345,69 KM² atau 28,70% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Majalengka.⁶²

Kabupaten Majalengka memiliki visi “Majalengka makmur”, Makmur secara harfiah yang memiliki makna sejahtera, berkecukupan baik materil maupun spiritual atau tatanan kehidupan yang rakyatnya mendapatkan kebahagiaan jasmani dan rohani sehubungan telah terpenuhi akan

⁶¹ Bapelitbangda Kabupaten Majalengka diunduh melalui website http://bappelitbangda.majalengkakab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=36&Itemid=3

Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka, Buku Kabupaten Majalengka dalam Angka 2018, Majalengka Regency in Figures 2018 hlm 3 -4

⁶²Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka, Buku Kabupaten Majalengka dalam Angka 2018, Majalengka Regency in Figures 2018 hlm 3 -4

kebutuhannya.⁶³ Jumlah pemerintahan terendah di Kabupaten Majalengka berdasarkan satuan lingkungan setempat terdiri dari 2.217 rukun warga/rukun keluarga dan 6.411 rukun tetangga, dengan rasio RT terhadap RW sebesar 4. Secara administrative pada akhir tahun 2017 Kabupaten Majalengka terdiri dari 26 kecamatan dan 343 desa. Dari 343 desa tersebut 330 berstatus desa dan 13 berstatus kelurahan. Bila di lihat dari klasifikasi desanya terdapat 292 Desa Swadaya mula, 34 Desa Swadaya madia, 7 Desa Swakarya mula, 9 Desa Swakarya madia dan 1 Desa Swasembada mula.⁶⁴

Salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Majalengka yaitu Kecamatan Kertajati. Posisi dari Kecamatan Kertajati itu sendiri adalah berada dengan batas-batas wilayah sebelah selatan yaitu berbatasan dengan Kecamatan Kadipaten kemudian pada sebelah barat berbatasan langsung dengan Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang dan Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu. Sedangkan pada sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Jatitujuh, dan di bagian timur berbatasan dengan Kecamatan Dawuan. Untuk Kecamatan Kertajati sendiri memiliki luas 138,36 KM² yang mana terdiri dari 14 Desa Swadaya mula dan terdiri dari 71 rukun warga dan 182 rukun tetangga, juga rasio RT terhadap RW adalah 3.⁶⁵ Jumlah desa tersebut bertambah menjadi 14 desa pada tahun 2011 dengan adanya Desa Sahbandar sebagai pemekaran Desa Mekarjaya.⁶⁶ Dari desa-desa tersebut Desa Sukamulya merupakan desa yang hampir seluruhnya terdampak pembangunan BIJB Kertajati. Selain lahan pertanian di Kecamatan Kertajati ini banyak juga pemukiman warga di desa-desa yang terdampak pembangunan BIJB Kertajati. Penduduk yang datang kedesa lain

⁶³Bapelitbangda kabupaten Majalengka di unduh melalui website http://bappelitbangda.majalengkakab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=36&Itemid=3

⁶⁴Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka, *Buku Kabupaten Majalengka dalam Angka 2018*, Majalengka Regency in Figures 2018 hlm 17

⁶⁵ *Ibid* hlm 9

⁶⁶ *Ibid* hlm 2

maupun yang pindah ke beberapa desa lainnya, menjadi lebih signifikan, dikarenakan adanya pembangunan BIJB Kertajati, bukan hanya pembangunan BIJB Kertajati namun juga dikarenakan adanya pembangunan jalan tol.⁶⁷

Kecamatan Kertajati memiliki jumlah penduduk pada tahun 2017 berdasarkan registrasi yang telah dilakukan adalah 49.364 jiwa, dengan jumlah KK adalah 16.136 kepala keluarga. Dalam hal ketenagakerjaan, Sebagian besar penduduk di Kecamatan Kertajati bermata pencaharian di bidang pertanian. Masyarakat Kecamatan Kertajati mayoritas beragama Islam dan sudah ditunjang dengan adanya sarana dan prasarana peribadatan yang memadai. Bangunan rumah di Kecamatan Kertajati ada yang permanen dan semi permanen, untuk kondisi listrik yang ada memang belum maksimal di setiap desanya. Namun hal ini di rasa mudah untuk pasokan listriknya di Kecamatan Kertajati.

Dari pendapatan pemerintah untuk wilayah Kecamatan Kertajati ini yang didapat dari pajak bumi dan bangunan hanya mencapai 10,24%, hal ini jauh menurun yang mana pada tahun 2016 bisa mencapai target sebesar 11,94%, hal ini dikarenakan lahan di Kertajati yang tergusur oleh kepentingan BIJB Kertajati.⁶⁸ Pembangunan BIJB Kertajati di Kabupaten Majalengka ini telah berdampak pada terkena gusurnya 7 desa yang ada yaitu Desa Kertajati, Desa Kertasari, Desa Sukamulya, Desa Bantarjati, Desa Sukakerta, Desa Mekarmulya dan Desa Babakan.

Dalam data statistik yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka yaitu bahwa kegiatan ekonomi masyarakat Kecamatan Kertajati terlihat semakin maju. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya bangunan tempat tinggal ataupun bangunan tempat usaha

⁶⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka, *Buku Kabupaten Majalengka dalam Angka 2018*, Majalengka Regency in Figures 2018 hlm 9

⁶⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka, *Buku Kecamatan Kertajati dalam angka 2018*, Kertajati Regency in Figures 2018.

yang sudah memadai atau dapat dikatakan permanen dan semakin adanya peningkatan aktivitas ekonomi, Hal ini berjalan seiring dengan adanya jalan tol dan juga pembangunan BIJB Kertajati.

Dalam hal industri kecil dan berbagai kerajinan rumah tangga juga di rasa banyak sekali yang berkembang pada tahun 2017, Seiring dengan kemajuan ekonomi di Kecamatan Kertajati sudah banyak kegiatan bisnis restoran dan kedai makanan serta bisnis perhotelan yang mana hal ini beranjak naik jika dibandingkan dengan tahun 2016 lalu. Selain itu dalam hal akomodasi sarana dan prasarana jalan pun semakin baik seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan kepentingan bandara, hal ini di rasa tidak hanya untuk kepentingan bisnis semata namun untuk kepentingan masyarakat pada keseluruhannya.⁶⁹

Pertumbuhan ekonomi yang semakin berkembang di wilayah Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka ini tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini merupakan hal yang di rasa sebagai dampak positif karena adanya pembangunan BIJB Kertajati, walaupun dari beberapa kalangan menilai bahwa perbaikan ekonomi ini belum terlalu signifikan dirasakan, yang memang dikarenakan semua butuh proses dan dalam tahap terus dikembangkan segala sesuatunya. Berbagai pihak menilai secara positif dan juga beranggapan optimis bahwa kemajuan perekonomian khususnya di wilayah Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka diharapkan akan berdampak kepada kemajuan Indonesia juga secara keseluruhan. Dan juga kesejahteraan masyarakat akan bertambah dengan akan diadakannya Aerocity, Aerocity merupakan pusat bisnis yang akan mendukung kebutuhan Bandara BIJB Kertajati menjadi bandara internasional yang ada di Jawa Barat. Berikut ini adalah lokasi penelitian yang dilakukan.

⁶⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka, *Buku Kecamatan Kertajati dalam angka 2018*, Kertajati Regency in Figures 2018 hlm 88



Gambar 4.1 Kabupaten Majalengka

Sumber: Bapelitbangda Kabupaten Majalengka

4.1.1.2 Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati

Jawa Barat merupakan sebuah provinsi yang memiliki penduduk yang paling besar di Indonesia. ketiadaan infrastruktur bandar udara bertaraf Internasional menjadikan salah satu kendala untuk bisa berkembang lebih maju lagi. Bandara adalah merupakan sebuah pintu masuk dan keluar untuk dapat melakukan berbagai aktifitas yang berhubungan dengan negara lain. Jawa Barat sangat berkepentingan untuk memiliki bandar udara yang berstandar internasional dan bandar

udara yang mampu menampung pesawat-pesawat yang berbadan besar. Sedangkan yang ada sekarang yaitu di Bandung adalah bandara udara Husen Sastra Negara yang mana saat ini di nilai bahwa bandar udara itu sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan sudah tidak dapat terbilang ideal karena memiliki beberapa kendala, salah satunya adalah menumpang di lanud militer.

Selain beberapa hal tersebut bandar udara Husen Sastranegara pun memiliki keterbatasan panjang landas pacu serta kapasitas apron maupun terminal.⁷⁰ Berkaitan dengan masalah tersebut diatas maka pemerintah provinsi Jawa Barat mengembangkan pembangunan bandara BIJB Kertajati di wilayah Kabupaten Majalengka. Bandara BIJB Kertajati terletak sekitar 68 KM dari Bandung. Ditempatkan secara strategis di sekitar area berkembang di Jawa Barat. Akses menuju bandara BIJB Kertajati ini terjamin dengan adanya jalan raya dan kereta api yang menghubungkan Bandung, Kertajati dan Cirebon. Kemudian ada jalan tol Cisumdawu untuk menghubungkan Bandung dan Kertajati. Selain jalan tol tersebut ada juga Jalan tol Cipali yang menghubungkan Kertajati dan kawasan industri Karawang juga jalur langsung menuju pelabuhan Cirebon.⁷¹

Sebelum ditetapkan di wilayah Kabupaten Majalengka ada beberapa pilihan dari pemerintah provinsi Jawa Barat mengenai lokasi bandara yang akan di bangun. Dari beberapa pertimbangan ada beberapa kabupaten yang awalnya menjadi pilihan salah satunya yaitu Karawang, kemudian setelah dilakukan beberapa proses dan evaluasi berikut juga dengan penilaian dari AMDAL, maka diputuskanlah pembangunan bandara di provinsi Jawa Barat adalah di Kabupaten Majalengka tepatnya di wilayah Kecamatan Kertajati.

⁷⁰ Jurnal Perhubungan Udara, Tri Tjahyono dan Eny Yusilawati, Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik, Universitas Indonesia, Tanggal publish 31 Juli 2017

⁷¹ Info Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) <https://bijb.co.id/en/aerocity/>

Pembangunan pada dasarnya mempunyai suatu tujuan yaitu menciptakan adanya kesejahteraan bagi masyarakat pada khususnya dan juga kemajuan bangsa pada umumnya. Pembangunan bandara BIJB Kertajati di bangun di daerah persawahan dan pedesaan seluas 5000 Hektare, dengan kebutuhan yang diperlukan untuk bandara BIJB Kertajati itu sendiri yaitu seluas 1800 Hektare, dan sekitar 3200 Hektare akan dibangun untuk kebutuhan pendukung operasional bandara yaitu aerocity.



Gambar 4.2 Konsep Aerocity Bandara BIJB Kertajati

Sumber : PT BIJB (PERSERODA)

Aerocity merupakan bagian dari pendukung bandara yang bertaraf internasional ini yang merupakan pusat bisnis, dari pengembangan aerocity di wilayah bandara BIJB Kertajati itu diharapkan akan menjadi pemicu berkembangnya bisnis serta kawasan urban lainnya. Aerocity diharapkan mampu membantu meningkatkan kesejahteraan, mengembangkan bisnis lokal bagi masyarakat sekitar, serta diharapkan mampu membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Bandara ini dibangun dengan standar pelayanan internasional dan teknologi terbaru dalam dunia usaha transportasi udara agar siap menjadi pintu masuk menuju pasar ASEAN.⁷² Diharapkan bandara BIJB Kertajati ini menjadi salah satu gerbang masa depan layanan

⁷² Info Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) <https://bijb.co.id/en/aerocity/>

penerbangan di Indonesia melalui konsep yang di bangun yaitu aerocity dan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat yang memiliki potensi besar dalam bidang pariwisata dan bidang pertanian yang di dukung oleh sarana dan prasarana dan jalan tol yang memadai. Walaupun sampai saat ini perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana jalan masih dalam proses dan memerlukan waktu yang cukup lama.

Pusat bisnis aerocity diharapkan mampu untuk memberikan pengaruh terhadap perekonomian yang akan mendukung aktifitas bandara. Arahana pemanfaatan ruang untuk pusat bisnis Aerocity pada wilayah Bandara BIJB Kertajati akan mengembangkan kawasan bandara dengan menganut keserasian antara prinsip keamanan dan prinsip kesejahteraan masyarakat, mengembangkan bandara, kemudian mengintegrasikan dengan pengembangan wilayah yang berada disekitarnya dan juga agar dapat bekerja sama dengan pihak swasta.⁷³

Akses yang akan dilalui masyarakat untuk dapat menjangkau lokasi bandara BIJB Kertajati pun terus dilakukan yang akan memudahkan masyarakat, yaitu melalui rencana pemerintah yang akan memperpanjang jalur kereta cepat Jakarta-Bandung yang di garap oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Hal ini dibuat untuk memudahkan akses masyarakat menuju bandara, Pemerintah ingin menyediakan pilihan alternative jalur menuju bandara, Yakni ke bandara Soekarno-Hatta dan bandara BIJB Kertajati, yang rencananya bahwa Jakarta-Bandung akan menjadi megapolitan, oleh karena itu akan di persiapkan akses jalur Kertajati-Halim dan mungkin ke Bandara Soekarno Hatta.⁷⁴

⁷³ Data pembangunan Kabupaten Majalengka tahun 2012-2016, Pemerintah kabupaten Majalengka melalui website http://bappelitbangda.majalengkakab.go.id/images/datapembangunan/DATA%20PEMBANGUNAN%202012-2016_2.pdf

⁷⁴ Info Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Media Indonesia, 9 Januari 2018 melalui website <https://bijb.co.id/en>

Aksesibilitas pembangunan jalan non tol menuju Bandara BIJB Kertajati ini tengah dalam tahap pelebaran. Penyempurnaan infrastruktur pendukung tersebut dimaksudkan agar masyarakat yang mengakses bandara dari jalur timur dan utara bisa lebih leluasa, mulai dari gerbang tol Kertajati untuk jalan diperluas hingga 30 Meter, dan saat ini sudah dalam proses pembebasan dan pengerjaan fisik. Selain jalan non tol aksesibilitas pendukung berupa tol menuju bandara BIJB Kertajati juga sedang dipersiapkan. Untuk jalan tol ini pembebasan lahan sudah dilakukan tapi fisik belum dikarenakan adanya beberapa ruas yang belum dibebaskan.⁷⁵

Lokasi yang menjadi pertimbangan mengapa dibangun di wilayah Kabupaten Majalengka Kecamatan Kertajati yaitu ada beberapa kriteria yang menjadi pertimbangan. Hal yang menjadi pertimbangan pada saat memutuskan pembangunan bandara adalah kondisi alam yang ada di wilayah kecamatan Kertajati. Seperti yang kita ketahui bahwa daerah ini kondisi alamnya datar tidak berbukit atau gunung, hanya ada satu gunung yaitu gunung cemerai namun kondisinya dinyatakan pasif, hal lain yang menjadi pertimbangan adalah sumber air yang dekat dengan Jatigede, yang selanjutnya yaitu kepadatan tanah yang tangguh dan kondisi tanah yang datar, Selain itu resiko gempa pun sangat diperhitungkan dalam hal ini, serta mudahnya untuk pengisian bahan bakar avtur yang tidak jauh dengan daerah bolangan. Penetapan lokasinya berdasarkan peraturan Menteri Perhubungan No 34 Tahun 2005 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Mei 2005. Permen itu yang menjadi landasan Hukum dalam pembangunan bandara BIJB Kertajati.

Pembangunan bandara BIJB dari sisi darat dan meliputi Pembangunan gedung operasional yang dikerjakan oleh PT Waskita karya sampai saat ini sudah 95%, PT Waskita diberikan tanggung jawab

⁷⁵ Info Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Media Indonesia, 9 Januari 2018 melalui website /<https://bijb.co.id/en>

untuk mengerjakan sarana penunjang operasional bandara, Sedangkan sisi udara dikerjakan langsung kementerian perhubungan seperti runway dan komponen lainnya.⁷⁶



Gambar 4.3 Lokasi Bandara BIJB Kertajati

Sumber : Dinas Perhubungan Jawa Barat

Pembangunan bandara BIJB Kertajati ini sendiri sudah direncanakan sejak era Presiden Megawati Soekarnoputri. Studi kelayakan bandara BIJB Kertajati ini sebenarnya sudah ada sejak 2003, Izin penetapan lokasi pun dilakukan sejak tahun 2005. Kemudian terbit Peraturan menteri yang mengatur tentang pembangunan bandara BIJB Kertajati adalah tercantum pada Peraturan Menteri (Permen). Perhubungan No KM 5 Tahun 2007 tentang Rencana Induk Bandar udara di Kabupaten Majalengka Propinsi Jawa Barat.

Peraturan tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Februari 2007 dan ditandatangani oleh menteri perhubungan pada masa itu yaitu M. Hatta Rajasa. Permen inilah yang mendasari pembangunan bandara

⁷⁶ Info Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati melalui website <https://bijb.co.id/en/>

BIJB Kertajati secara hukum.⁷⁷ Pada saat itu pemerintah provinsi Jawa Barat menyatakan sanggup untuk mendanai sendiri pembangunan bandara tersebut dengan dana APBD, Namun pemerintah provinsi Jawa Barat tak kunjung merealisasikan pembangunan bandara tersebut hingga tahun 2011. Setelah dilakukan peninjauan ulang, ternyata pembangunan bandara BIJB Kertajati membutuhkan alokasi dana dari APBN, Jadi hampir selama 10 tahun proyek bandara ini belum terealisasi.⁷⁸

Penetapan lokasi pertama pada tahun 2005 akan tetapi izin penetapan lokasi di ulang pada tahun 2012 dengan memasukkan kewajiban pendanaan APBD dan APBN. Selama tujuh tahun tidak ada kegiatan fisik apapun, kemudian pekerjaan kembali baru di mulai tahun 2014 untuk pengerjaan pembersihan lahan dan fondasi.⁷⁹ Pada tahun 2015 kembali terbit Peraturan Presiden No 30 Tahun 2015 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum (Infrastruktur), serta PP No.3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang berisi 225 proyek nasional, yang menjadi dasar atas pembangunan bandara tersebut benar-benar dilanjutkannya kembali. Hal ini akan berdampak pada berbagai sektor, khususnya pada alih fungsi lahan atau dalam pembebasan lahannya.

Bandara BIJB Kertajati yang berada di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka Propinsi Jawa Barat, merupakan satu dari empat bandara di Indonesia yang menjadi proyek strategis nasional. Pembangunan infrastruktur yang ada telah disesuaikan dengan perkembangan global, terutama dengan makin pesatnya arus informasi dan teknologi dunia. Untuk itu pembangunan infrastruktur bandara BIJB

⁷⁷ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 5 Tahun 2007 Tentang Rencana Induk Bandar Udara Di Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, Di dapat dari situs http://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2007/km_no_5_tahun_2007.pdf

⁷⁸ Agustianti, *Pembangunan Bandara Kertajati Mangkrak sejak Era Megawati*, CNN Indonesia melalui situs <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180524114909-92-300911/pembangunan-bandara-kertajati-mangkrak-sejak-era-megawati>

⁷⁹ Fiki Ariyanti, *Liputan 6 judul 10 Fakta Menarik soal Bandara kertajati di Majalengka* melalui situs <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3537128/10-fakta-menarik-soal-bandara-kertajati-di-majalengka> tanggal; 24 Mei 2018.

harus mempertimbangkan kebutuhan energinya saat ini dan masa yang akan datang⁸⁰

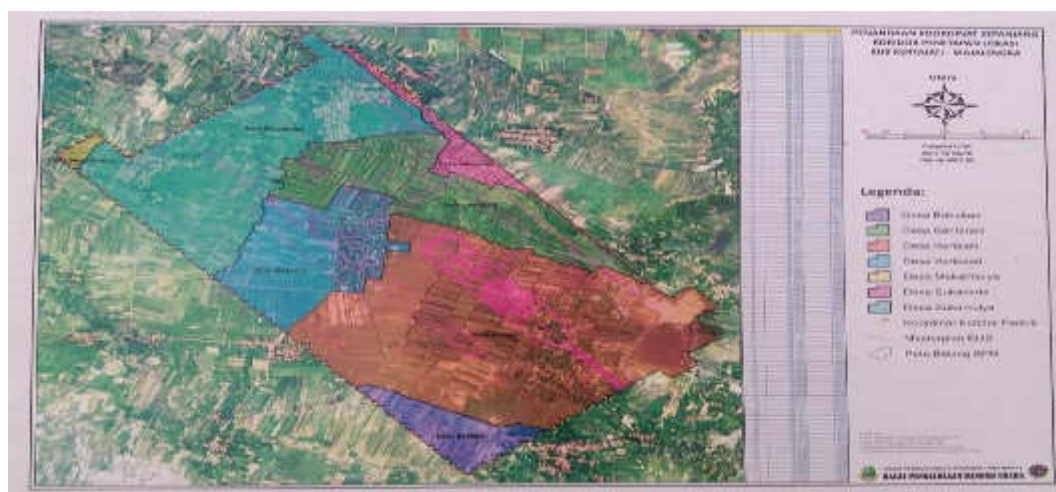
Secara umum pembangunan bandara BIJB Kertajati di wilayah kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka ini merupakan suatu proyek pembangunan yang dapat memberikan keuntungan lebih terhadap Provinsi Jawa Barat. Namun di sisi lain yang terjadi dari pembangunan tersebut adalah memberikan dampak terhadap masyarakat, baik dampak positif maupun dampak negatif khususnya di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat. Pembangunan bandara ini akan memanfaatkan lahan yang memiliki kurang lebih sekitar 1.800 Hektare, dan 3200 Hektare untuk pengembangan pusat bisnis Aerocity sebagai sarana pendukung pembangunan bandara BIJB Kertajati. Lahan ini merupakan lahan pertanian dan juga pemukiman penduduk, Lahan pertanian merupakan lahan yang memang digunakan warga masyarakat sebagai sumber penghidupan warga masyarakat di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka.

Adapun penetapan lokasi dari pembangunan bandara BIJB Kertajati ini tampaknya menimbulkan permasalahan sendiri karena adanya pembebasan lahan yang dialami warga masyarakat yang mata pencahariannya bersumber dari lahan pertanian.⁸¹ Hal ini menjadi suatu dilema tersendiri bagi masyarakat setempat, Di lain sisi ini merupakan pembangunan nasional yang sudah ditetapkan dengan peraturan demi kepentingan umum. Kepentingan umum harus didahulukan daripada kepentingan pribadi, namun disisi lain hal ini membuat masyarakat harus merelakan rumah dan lahan pertaniannya yang terdampak pembangunan bandara BIJB Kertajati. Hal inilah yang timbul dan menjadi permasalahan tersendiri yang melanda masyarakat di kecamatan Kertajati.

⁸⁰ Terdapat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No 3 Tahun 2016 tentang percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

⁸¹ http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/688/jbptunikompp-gdl-widiyawati-34385-5-unikom_p-i.pdf

Pembangunan bandara memerlukan lahan yang tidak sedikit, untuk bandara BIJB Kertajati sendiri membutuhkan lahan seluas 1800 hektare dan 3200 hektare lahan untuk pengembangan aerocity sebagai pendukung bandara BIJB Kertajati. Walaupun dari 1800 hektare tersebut tidak semua lahan pertanian namun juga lahan pemukiman masyarakat setempat. Hal ini menjadikan banyak lahan yang memang digarap untuk pertanian akhirnya harus dimanfaatkan untuk pembangunan bandara. Hal ini memang menjadikan nilai yang positif karena terus berkembangnya pembangunan dan pada sektor lain akan meningkatkan perekonomian warga masyarakat, namun bagi sisi yang lain sejumlah petani yang memanfaatkan lahan pertanian sebagai mata pencahariannya dalam hal ini akan berdampak kepada kebutuhan keahlian dari jenis pekerjaan lain yang harus diikuti sebagai alih pekerjaan yang semula sebagai petani.



Gambar 4.4 Lokasi 7 Desa yang terdampak pembangunan bandara BIJB Kertajati

Sumber : Desa Sukamulya/Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

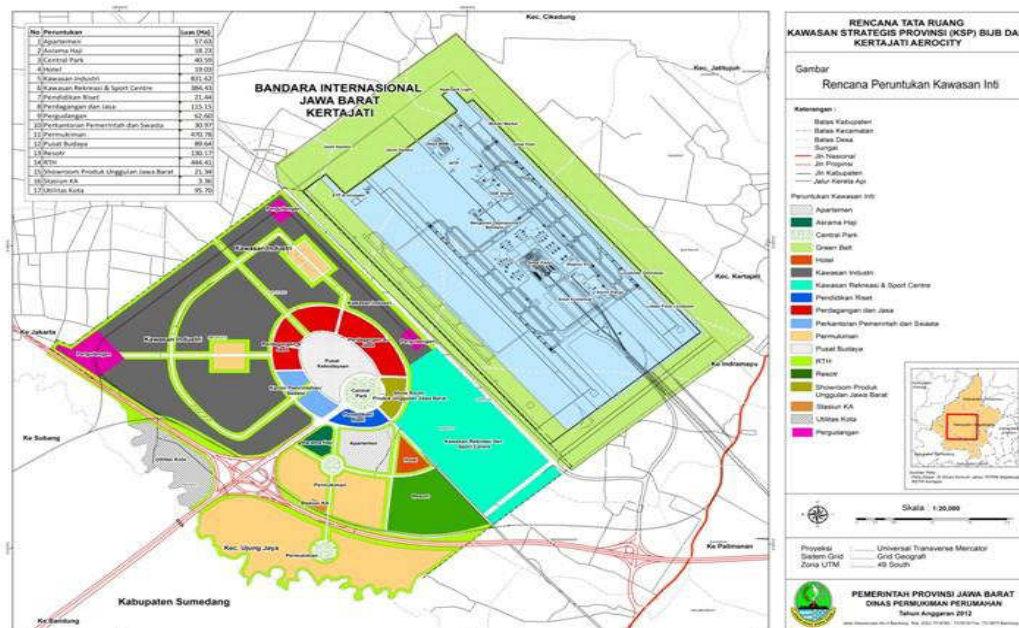
Pembangunan bandara memerlukan 3 tahap dalam pengembangannya, Sedangkan yang baru berjalan saat ini adalah baru tahap pertama, Artinya masih ada 2 tahapan lagi yang harus dipenuhi untuk kepentingan kelengkapan dan fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung sebagai bandara internasional di Jawa Barat. Untuk

pembangunan bandara saat ini sedang dilaksanakan tahapan dalam penyelesaian *runway*, juga untuk fasilitas sisi darat.

Revisi *Masterplan* BIJB Kertajati sesuai KM No.5 Tahun 2007 dan Rencana Teknik Terinci (RTT) sisi darat dalam hal ini telah disahkan oleh Kementerian perhubungan pada Tahun 2014 dan juga tentang Persetujuan AMDAL melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.02.12.05 Tahun 2014, yang berisi tentang Izin lingkungan kegiatan pembangunan BIJB di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat pada tanggal 13 Mei tahun 2014. Untuk proses pembangunan akses menuju tol dan non tol untuk menuju bandara BIJB Kertajati sudah dimulai sejak tahun 2013 lalu.

Pembangunan bandara ini akan menjadi terhambat jika dalam pelaksanaannya tersebut ada yang terkendala, seperti adanya kendala dalam pembebasan lahan yang terjadi sehingga menimbulkan konflik, konflik yang ada seharusnya diselesaikan secara cepat dan tepat agar pembangunan bandara BIJB Kertajati ini benar-benar terlaksana sesuai dengan rencana yang telah di buat. Namun tentunya hal yang diharapkan dalam hal ini, jangan sampai ada masyarakat yang dirugikan dengan adanya pembangunan bandara BIJB Kertajati.

Pada tanggal 17 Nopember 2016 terjadi puncaknya konflik dalam pembebasan lahan untuk kepentingan bandara BIJB Kertajati, namun hingga kini kondisinya sudah lebih kondusif dan terjaga keamanannya. Namun segala hal tetap harus diwaspadai dan sama-sama saling dapat menjaga komunikasi dan tetap mendengarkan keluhan yang disampaikan warga masyarakat yang khususnya terdampak akan pembangunan bandara BIJB Kertajati ini. Masyarakat yang lahannya terkena dampak dari pembangunan bandara BIJB Kertajati ini umumnya memilih untuk pindah kebeberapa desa tetangga yang memang tidak terdampak pembangunan bandara maupun Aerocity.



Gambar 4.5 Master Plan Bandara BIJB Kertajati

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

4.1.1.3 Penggunaan Lahan Pertanian Untuk Pembangunan Bandara BIJB Kertajati

Lahan pertanian merupakan wilayah yang masih banyak terdapat di Kabupaten Majalengka khususnya di Kecamatan Kertajati. Untuk wilayah Kecamatan Kertajati sebagian besar wilayahnya adalah lahan pertanian yang di garap oleh masyarakat sekitar, berdasarkan data statistik wilayah Kecamatan Kertajati dalam angka tahun 2018 disebutkan bahwa produksi padi di wilayah ini pada tahun 2017 mencapai 78.297 ton, produksi ini menurun dibandingkan tahun 2016 lalu yang bisa mencapai 78.493 ton, ada selisih hasil produksi sekitar 204 Ton dalam 1 tahun, hal ini bisa dikatakan sebagai dampak pembangunan bandara yang mana lahan pertanian banyak yang dimanfaatkan untuk bandara sehingga lahan

yang digunakan untuk pertanian pun menurun, sehingga produksi padi dari tahun 2017 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016 lalu.⁸²

Luas lahan sawah yang ada di kecamatan Kertajati hanya sekitar 1.915 Hektare dan produksi padi sawah pada tahun 2017 mencapai 85.803 Ton. Selain tanaman padi di wilayah Kertajati juga lahan yang ada ditanami palawija yaitu diantaranya tanaman jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar, ubi kayu, dan lain-lain. Sedangkan untuk tanaman sayuran ini memproduksi macam-macam sayuran yaitu diantaranya bawang merah, cabe merah, kacang panjang, ketimun dan terong. Selain padi, palawija dan sayuran, ada juga lahan yang ditanami buah-buahan pohon pisang, belimbing, jambu biji, jambu air, jeruk siam, mangga gedong, nangka, papaya, sirsak dan juga sawo.⁸³

Lahan pertanian saat ini sudah semakin sedikit akibat dari pembangunan yang ada. Pembebasan lahan yang akan di gunakan untuk kepentingan bandara ini memang menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi Jawa Barat. Pemerintah pusat bertanggungjawab terhadap pembangunan sisi udara, maka dalam hal ini kewenangan dari provinsi Jawa Barat adalah yang menjadi sisi darat.

Perubahan lahan pertanian yang diperuntukkan bandara BIJB Kertajati terjadi ketika adanya kebijakan pemerintah yang membangun kawasan bandara dan aerocity. Masyarakat yang tadinya tinggal di daerah Kertajati ini yang mayoritas menjadi petani harus siap dengan beralih profesi ke sektor lain. Dampak positif yang dirasakan warga masyarakat sekitar yaitu dengan naiknya harga jual lahan kemudian akan terbukanya lapangan usaha dan peningkatan sarana dan prasarana akan fasilitas umum. Adapun dampak negatif yang dirasakan warga masyarakat adalah pada aspek sosial yaitu penyedia lapangan kerja petani, dari

⁸² Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka, *Buku Kecamatan Kertajati dalam angka 2018*, Kertajati Regency in Figures 2018 . hlm 69

⁸³ *ibid*

aspek ekonomi yaitu penghasilan produksi padi yang mengalami penurunan, serta berkurangnya pendapatan petani.⁸⁴

Lahan pertanian yang peruntukannya berubah seiring dengan di bangunnya Bandara BIJB Kertajati, karena ada kebijakan pemerintah tersebut, menjadikan alih fungsi lahan pertanian akan berdampak kepada kondisi sosial ekonomi yang ada. Hal ini pun jelas akan mempengaruhi dari berbagai aspek kehidupan, salah satunya yaitu akan berkurangnya produksi pangan yang akan menyebabkan ketahanan pangan yang terancam.

Alih fungsi lahan yang tadinya lahan pertanian menjadi non pertanian tidak sepenuhnya alamiah, namun seperti yang terjadi di Kecamatan Kertajati ini lahan pertanian beralih fungsi dikarenakan proses kebijakan pemerintah baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang kini terjadi di wilayah kertajati akan berdampak terhadap kehidupan rumah tangga dari para petani di Kertajati itu sendiri.

Adapun yang merupakan implikasi dari pembangunan itu sendiri adalah banyaknya alih fungsi lahan dalam hal ini lahan pertanian yang kemudian dijadikan atau dialihkan kesektor lainnya, hal inilah yang kerap terjadi di Indonesia sebagai dampak dari proses pembangunan yang ada sebagai negara yang sedang berkembang. Lahan pertanian milik warga masyarakat yang dipergunakan untuk bandara BIJB Kertajati ini telah di bebaskan, dengan tim appraisal yang menilai harga dari lahan tersebut, tidak hanya lahan saja yang di nilai oleh tim *appraisal* namun juga beserta

⁸⁴ Yayat Hidayat, *Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Rumah Tangga Petani (Studi Kasus Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka)*, Tesis pada Program Studi Ekonomi dan Sumberdaya Lingkungan Institut Pertanian Bogor Agustus 2017

pohon dan apapun tanaman serta bangunan yang berada di atasnya mendapatkan penggantian oleh pemerintah.⁸⁵

Warga masyarakat yang lahan pertaniannya terkena gusur dan telah dibayar oleh pemerintah maka uang hasil dari pembebasan lahan tersebut dibelikan kembali lahan pertanian di wilayah lain agar tetap dapat bertani sebagai mata pencaharian warga lokal. Warga masyarakat yang memiliki lahan pertanian yang luas serta telah mendapatkan ganti rugi yang besar dari pemerintah dimanfaatkan kembali untuk berbagai jenis kegiatan yang lebih produktif salah satunya yaitu seperti sewa lahan pertanian dan juga sebagai modal usaha lain di luar dari bidang pertanian, selain dipergunakan untuk yang bersifat produktif namun kebanyakan juga menggunakannya untuk kepentingan yang bersifat konsumtif. Ada juga warga masyarakat yang pemanfaatan uang ganti rugi dari pemerintah itu dimanfaatkan untuk kepentingan yang konsumtif saja seperti membeli kendaraan, membeli perabotan rumah tangga yang baru dan untuk biaya kehidupan sehari-hari.⁸⁶

Di Kecamatan Kertajati salah satu yang desanya hampir seluruhnya terdampak pembangunan adalah Desa Sukamulya. Desa Sukamulya ini merupakan desa terakhir yang sampai saat ini masih belum terbebaskan semua, Sedangkan untuk desa yang lainnya semua sudah dibebaskan untuk kepentingan pembangunan bandara. Warga masyarakat yang sudah pindah rata-rata memang mereka pindah ke lokasi yang masih di wilayah Kabupaten Majalengka. Ada yang pindah ke desa tetangga yang memang tidak terdampak pembangunan bandara. Untuk Desa Sukamulya sendiri dalam hal lahan pertanian yaitu tanah sawah tadah

⁸⁵ Appraisal adalah suatu penilaian terhadap sebuah property dengan cara di estimasi oleh lembaga resmi, yang bertugas meninjau langsung lokasi property dilapangan dan mengestimasi harganya untuk selanjutnya dibuat laporan.

www.kjpp-akr.co.id

⁸⁶ Yayat Hidayat, *Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Rumah Tangga Petani (Studi Kasus Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka)*, Tesis pada Program Studi Ekonomi dan Sumberdaya Lingkungan Institut Pertanian Bogor Agustus 2017

hujan yang mana dalam data statistik Kabupaten Majalengka tahun 2018 disebutkan bahwa luasnya mencapai 618,261 Hektare.⁸⁷ Desa Sukamulya merupakan benteng terakhir yang dipertahankan oleh sebagian warganya karena masih ada beberapa hal yang belum terjadinya kesepakatan. Memang jumlahnya sudah minoritas, menurut data yang di dapat dari desa Sukamulya bahwa sampai dengan tahun 2018 ini hanya sekitar 50 KK lagi yang masih menunggu dan belum bersedia lahannya untuk di bebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan bandara.

Sebelum membahas mengenai data penelitian yang mendalam di wilayah Kecamatan Kertajati yang di dapat melalui wawancara, maka peneliti akan memaparkan berbagai kronologis dari konflik yang terjadi di wilayah Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka khususnya di Desa Sukamulya. Dalam pengambilan data lapangan, maka peneliti menetapkan beberapa pihak yang memang memiliki keterkaitan erat dengan pembangunan bandara BIJB Kertajati dan konflik yang mewarnainya.

4.1.2 Konflik Pembebasan Lahan Pertanian untuk Pembangunan Bandara BIJB Kertajati

Pembangunan infrastruktur berfungsi sebagai roda penggerak laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah untuk meningkatkan taraf kehidupan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat, dan kemajuan bangsa dalam suatu negara. Pembangunan Infrastruktur mempunyai peran yang sangat penting di dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Pembangunan Infrastruktur yang sedang digalakkan oleh pemerintah salah satunya adalah pembangunan bandara. Pembangunan bandara BIJB Kertajati menjadi salah satu proyek strategis nasional. Hal ini

⁸⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka, *Buku Kecamatan Kertajati dalam angka 2018*, Kertajati Regency in Figures 2018 . hlm 73

tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah maka pada umumnya selalu ada pihak-pihak yang menyetujui dan menolak kebijakan. Seperti Pembangunan bandara BIJB Kertajati ini dengan adanya pembebasan lahan untuk pemenuhan kebutuhan lahan bandara, ada beberapa lahan perkebunan dan lahan pertanian yang selama ini menjadi sumber utama penghasilan warga lokal. Tidak hanya lahan pertanian dan perkebunan saja yang terdampak pembangunan bandara BIJB Kertajati ini, namun pemukiman warga masyarakat sekitar pun terdampak. Warga masyarakat yang telah turun temurun tinggal di wilayah setempat harus merelakan tempat tinggalnya di gusur untuk kepentingan pembangunan yang menjadi proyek strategis nasional. Selain itu perubahan alih fungsi lahan yang tadinya pertanian setelah terdampak penggusuran tersebut mengalami perubahan status penggunaan lahan, yang tidak dapat dipungkiri akan menyebabkan dampak negatif terhadap aspek ekonomi warga lokal.

Konflik yang berkenaan dengan pembangunan kerap kali terjadi di berbagai kebijakan pembangunan yang melibatkan pemerintah dalam hal pembebasan lahan, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pembangunan untuk kepentingan umum harus didahulukan dan negara berhak atas hal tersebut, sebagaimana Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 33 ayat 3 yang berbunyi:

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat.

Dari UUD tersebut diatas jelas bahwa lahan yang diperuntukkan untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat berada di bawah kekuasaan negara dan dalam hal ini jika akan dipergunakan oleh negara maka masyarakat harus bersedia untuk mendukung pembangunan demi

kepentingan umum, Namun dalam kondisi tersebut segala hal dalam tahapan-tahapan pembebasan lahan harus dipenuhi agar tidak merugikan masyarakat yang lahannya akan dipergunakan untuk pembangunan. Ketika hak-hak masyarakat sudah terpenuhi terhadap lahan yang menjadi miliknya dibebaskan dengan prosedur yang benar, maka konflik tidak akan terjadi.

Mata pencaharian penduduk Kecamatan Kertajati Desa Sukamulya umumnya bertani, mereka menggarap lahan milik sendiri maupun menggarap lahan milik orang lain yang upahnya sudah disepakati bersama. Melalui wawancara dengan salah satu masyarakat Desa Sukamulya, yang menyatakan bahwa:

“Untuk upah buruh di desa ini dihitung persetengah hari, atau dihitung pada saat mulai menggarap yaitu dari jam 6 pagi sampai adzan dhuhur, dengan perhitungan upah pembayaran adalah Rp.80.000, di samping upah tersebut juga diberikan 1 bungkus rokok seharga Rp. 12.000, namun makan siang memang tidak disediakan karena hanya sampai setengah hari, jadi bel pulang petani di desa sukamulya itu ya pada saat terdengar adzan atau bedug dhuhur.” (Wawancara, 27 September 2018)

Menurut warga lokal, dari penghasilan sebagai petani penggarap lahan pertanian milik orang lain sudah merasa tercukupi dan sejahtera karena dengan adanya lahan pertanian mereka bisa mendapatkan pemasukan setiap hari selain dari hasil panen yang memang menghasilkan. Warga masyarakat merasa sangat dirugikan, karena untuk lahan pertanian di Desa Sukamulya termasuk lahan yang sangat baik untuk lahan bertani, Walaupun kondisi lahan merupakan lahan tadah hujan. Ketika musim penghujan tiba masyarakat dapat menggarap lahannya, namun ada beberapa lahan warga yang kesulitan mendapat sumber air ketika musim kemarau tiba, dan juga harus mengeluarkan biaya yang cukup besar jika ingin mendapatkan sumber air.

Warga masyarakat menjadikan lahan pertanian sebagai lahan mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup, hal ini menjadi

kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat jika lahan pertanian dan lahan pemukiman mereka harus tergusur akibat dampak adanya pembangunan bandara BIJB Kertajati. Kekhawatiran ini beralasan karena pekerjaan mayoritas warga Desa Sukamulya yang tadinya petani maka harus beralih ke profesi lain. dan hal ini dirasa bukan sesuatu yang mudah karena harus memulai kembali usaha dalam bidang lain diluar dari bertani dan menggarap lahan.

Dalam proses pembangunan bandara BIJB Kertajati menyisakan konflik, walaupun sampai saat ini pembangunan tetap dilaksanakan dan di prioritaskan dengan kondisi dan kepentingan yang ada, konflik yang terjadi ini menyebabkan pembangunan bandara BIJB Kertajati menjadi sedikit terhambat yang dapat menyebabkan target operasional bandara akan mengalami keterlambatan jika hal ini belum dapat diselesaikan dengan baik bagi pemilik lahan maupun pemerintah. Terutama dengan perpanjangan *runway* yang membutuhkan 3500 Meter agar dapat memfasilitasi pesawat berbadan besar. Segala sesuatu yang dapat menimbulkan konflik disebut sebagai faktor konflik, baik dalam skala yang kecil maupun dalam skala yang besar dan hal ini dapat menimbulkan konflik yang berkepanjangan jika tidak dideteksi dari awal penyebab konflik tersebut. Faktor konflik ini beraneka ragam, bisa dari hal yang sangat mendasar sampai kepada hal yang dianggap sepele atau dianggap biasa saja. Ketika individu atau masyarakat sudah merasa bahwa hak-haknya diabaikan dan ketidakadilan yang di dapat maka hal inilah bisa menjadi salah satu faktor dari penyebab konflik.

Konflik yang terjadi di Desa Sukamulya memang dikarenakan warga masyarakat desa ini yang kebanyakan mempertahankan desa mereka, dan menolak untuk di lakukan pengukuran oleh pihak BPN sebagai awal mula dalam tahapan penggusuran, dan desa ini menjadi benteng terakhir setelah desa-desa di sekitarnya sudah rata dengan tanah. Desa-desa lain yang terdampak penggusuran secara bertahap uang kompensasinya telah

di ganti oleh pemerintah dengan berbagai tahapan yang ada. Tanah yang di ganti berikut bangunan dan juga pohon-pohon yang ada di atasnya.

Desa-desanya lain di Kecamatan Kertajati memang tidak terjadi bentrokan, pada awal mula pembebasan berjalan dengan lancar dan sudah banyak yang pindah ke desa-desa tetangga, Sebagaimana wawancara yang dilakukan dengan bapak Bambang Nurdiansyah yang kesehariannya mengajar di SMKN 1 Kertajati yang merupakan masyarakat Desa Sukamulya menyatakan bahwa :

“Kalau untuk desa lain yang tergusur mereka hanya pasrah saja dengan adanya pengusuran jadi dari desa mereka itu tidak ada yang menjadi penggerak untuk melakukan penolakan, artinya setuju-setuju saja dengan kompensasi yang diberikan oleh pemerintah. tapi berbeda halnya dengan Desa Sukamulya yang memang ada penggerak untuk melakukan pertahanan terhadap Desa Sukamulya agar tidak menjadi Desa yang ikut tergusur juga oleh pemerintah” (Wawancara, 27 September 2018)

Dalam Pengukuran yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini pihak BPN melibatkan kurang lebih 2000 personel yang berasal dari Polda Jawa Barat, Polres Majalengka, TNI dan Satpol PP, banyaknya personel dimaksudkan untuk mengamankan pelaksanaan pengukuran tersebut sehubungan dengan masih adanya penolakan dari sejumlah warga di Desa Sukamulya yang sudah berlangsung sejak lama, yang menurut sebagian warga pembangunan Bandara BIJB Kertajati tersebut merugikan warga soal ganti rugi lahan dan rumah yang tidak sesuai, dan tidak ada komunikasi atau sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat. Kemudian terjadilah keributan antara warga masyarakat baik yang kontra maupun yang pro dengan personel gabungan yang diterjunkan tersebut. Namun dalam kondisi tersebut terjadi pula kesalahpahaman antara warga yang pro dan kontra, dilain sisi warga masyarakat yang pro ingin segera dilakukan pengukuran sedangkan masyarakat yang kontra

berusaha mencegah dan menghalang-halangi pengukuran yang akan dilakukan.

Dari penelitian yang dilakukan di peroleh data bahwa terdapat Sembilan tuntutan warga masyarakat, adapun tuntutan tersebut telah disampaikan kepada pemerintahan desa setempat untuk dilanjutkan kepada pemerintahan daerah agar bagi masyarakat yang saat ini masih kontra mendapat perhatian dari pemerintah, walaupun sampai saat ini masyarakat yang kontra sudah merupakan minoritas diantara warga masyarakat yang sudah lebih banyak yang pro terhadap pembebasan lahan pertanian ini, dan saat ini sedang menunggu pembayaran yang dilakukan pemerintah terhadap lahan pertaniannya yang tekah selesai dengan berbagai prosedur dan pemberkasan yang dibutuhkan.

Adapun Sembilan tuntutan warga masyarakat yang saat ini masih kontra adalah :

1. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemkab Majalengka harus menjamin bahwa seluruh tahapan proses pengadaan tanah untuk kepentingan Bandar Udara BIJB harus dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang -undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Pemerintah harus menjamin tidak ada intimidasi yang dilakukan oleh pihak manapun dalam proses pengadaan tanah di Desa Sukamulya untuk kepentingan BIJB .
3. Pemerintah diharapkan lebih sensitif memperhatikan kesejahteraan rakyatnya secara menyeluruh tidak bersifat sepihak. Sebuah proyek pembangunan tanpa keadilan akan melahirkan kesejahteraan yang bersifat semu dan memperlebar jurang antara yang kaya dan yang miskin.
4. Jaminan kepastian penggantian atas hak milik tanah, tanaman dan bangunan yang benar -benar memberikan keuntungan yang

maksimal bagi masyarakat. Penetapan harga penggantian untuk tanah yang tergusur harus memenuhi rasa keadilan dan layak serta tidak merugikan pemilik lahan. Berdasarkan kesepakatan warga, dengan mengacu ke perumahan umum (Perum) yang paling dekat yaitu di perum sawala kadipaten, harga tanah di perum tersebut adalah Rp. 1.500.000,00 s/d Rp. 2.500.000,00/m² (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah Sampai Dengan Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah Permeter Persegi).sedangkan harga bangunan adalah Rp. 3.000.000 /m² (Tiga Juta Rupiah Permeter Persegi)

5. Pembebasan lahan di Desa Sukamulya dilakukan secara menyeluruh dengan maksud agar masyarakat dapat berkumpul kembali di suatu tempat seperti sekarang sehingga nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan dan gotong royong yang selama ini sudah terbangun tidak hilang atau rusak begitu saja.
6. Penetapan Lokasi untuk pemindahan Desa Sukamulya (melalui relokasi swadana) harus melibatkan musyawarah dan mufakat dari masyarakat Desa Sukamulya.
7. Ketersediaan Fasilitas umum dan fasilitas sosial di tempat baru yang akan dijadikan pemukiman harus disediakan oleh pemerintah.
8. Jaminan hukum Kepastian tentang Status Desa Sukamulya tidak hilang artinya Desa Sukamulya harus tetap lestari.
9. Relokasi yang dimaksud warga adalah relokasi swadana, dan pemerintah harus menjamin kemudahan pengurusan legalitas kepemilikan lahan.

Dari tuntutan yang diminta oleh warga masyarakat yang kontra, sampai saat ini memang belum dapat direalisasikan, Namun demikian pembangunan bandara BIJB Kertajati masih terus dilanjutkan.

Puncak Konflik terjadi pada tanggal 17 Nopember 2016 yang terjadi pada saat pihak BPN melakukan pengukuran tidak hanya terjadi pada masyarakat dengan aparat saja, namun juga masyarakat yang kontra dan masyarakat yang pro. Berdasarkan data yang diperoleh masyarakat yang

kontra dan masyarakat yang pro perbandinganya adalah 60 persen dan 40 persen, lebih banyak masyarakat yang kontra dibandingkan dengan yang masyarakat yang pro. Kondisi ini memicu konflik dimana pengukuran tetap dilaksanakan kendati pihak masyarakat yang kontra masih lebih banyak dibandingkan dengan pihak yang pro. Masyarakat yang pro mendukung sepenuhnya upaya pengukuran yang dilakukan pada saat itu sedangkan sebaliknya dengan masyarakat yang kontra. Masyarakat yang pro menuntut agar tidak adanya intimidasi yang dilakukan masyarakat yang kontra kepada masyarakat yang memang sudah menyetujui lahannya untuk dibebaskan dengan ketentuan dari pemerintah.

4.1.2.1 Faktor Struktural Konflik Pembebasan Lahan di Kecamatan Kertajati

Secara struktural konflik yang terjadi di Desa Sukamulya tidak serta merta terjadi begitu saja. Hal ini bermula ketika pada tahun 2004, dimana pada waktu itu secara sepihak dari adanya penandatanganan surat pernyataan pada tanggal 14 Oktober 2004 yang menyatakan bahwa seluruh warga masyarakat Kecamatan Kertajati mendukung sepenuhnya atas rencana pembangunan Bandara BIJB Kertajati seluas 5000 hektar yang terdiri dari 1800 Hektare untuk pembangunan bandara dan 3200 hektare untuk pusat pengembangan bisnis yang disebut dengan aerocity oleh 11 Pa kuwu.⁸⁸

Disurat tersebut dinyatakan bahwa seluruh Kepala Keluarga yang ada di wilayah Kecamatan Kertajati menyetujui bahwa lahannya akan dipergunakan untuk kepentingan bandara BIJB Kertajati, Namun Pada kenyataannya dilapangan hanya terdapat 300 KK yang mendukung pembangunan Bandara BIJB Kertajati dan sementara selebihnya menolak.⁸⁹ Dalam surat pernyataan tersebut dinyatakan bahwa siap

⁸⁸ Pa kuwu adalah sebutan untuk bapak yang menjabat sebagai Kepala Desa di sebagian wilayah Jawa Barat termasuk wilayah Kabupaten Majalengka

⁸⁹ Sumber didapat melalui Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang di unggah melalui situs <http://www.kpa.or.id/news/blog/warga-sukamulya-menolak-pembangunan-bijb/>

mendukung dan membebaskan tanah, rumah dan lain-lain untuk pembangunan bandara, namun pada kenyataannya, Untuk warga Desa Sukamulya sendiri tidak pernah dilibatkan musyawarah atau sosialisasi secara mendetail berkenaan dengan masalah tersebut.

Setelah surat pernyataan tersebut ditandatangani kemudian dilakukanlah analisis dampak lingkungan atau AMDAL, dalam hasil analisis yang dilakukan tersebut dinyatakan bahwa lahan yang berada di Desa Sukamulya adalah lahan tandus. dengan gabah kering giling sebanyak 6 kwintal/hektare, Padahal data dari Dinas Pertanian Kabupaten Majalengka pada tahun 2005 dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka adalah sebanyak 52,35 Kwintal perhektare.⁹⁰

Selain itu dalam pembebasan lahan untuk kepentingan bandara ini belum dilakukan semua pembayaran dikarenakan masih ada kesalahan dalam ukuran yang dilakukan pihak BPN. Sebagaimana wawancara dengan Bapak Letkol Arm Novi Herdian, S.H., M. selaku Dandim Kabupaten Majalengka yang menyatakan:

*“Saya dan pa kapolres ikut menekan kepada pihak BPN, karena beberapa hari lagi akan tutup tahun namun masih banyak kesalahan ukuran tanah milik warga masyarakat, hasil dari tim appraisal angkanya muncul tapi ya itu tadi ukuran masih salah dan angka keluarnya pun tidak masuk akal. masyarakat hanya di adakan pilihan mau atau tidak, mau atau konsinyasi artinya diserahkan keranah hukum, kita harus perdulilah dengan kondisi ini, kan kasihan masyarakat dalam hal ini. jika masyarakat mau ya di terima namun jika merasa tidak puas masuk kepengadilan, urusan hukum itu kan mahal sekali”
(Wawancara , 27 September 2018)*

Dalam Pembangunan Bandara BIJB Kertajati terjadi dua kelompok masyarakat , yaitu masyarakat yang pro dan masyarakat yang kontra. masyarakat yang pro menyetujui dengan di gusurnya lahan pertanian dan

⁹⁰ Lembaga Bantuan Hukum provinsi Jawa Barat dalam buku catatan Akhr tahun 2016 hlm 50

pemukiman rumah tinggal yang mereka tempati dengan harga yang di berikan oleh pemerintah, sedangkan kelompok kedua yaitu kelompok masyarakat yang kontra dengan adanya pembangunan bandara BIJB Kertajati, untuk masyarakat yang kontra memiliki alasan tersendiri mengapa tidak mendukung program pemerintah ini.

Pembangunan BIJB Kertajati menjadi tersendat dengan adanya masyarakat yang kontra, Selain tidak berkenanya lahan pertanian dan tempat tinggalnya dilakukan pengukuran namun ternyata adanya intimidasi yang dilakukan oleh masyarakat yang kontra kepada masyarakat yang pro yang selalu menghalang-halangi jika ada pengukuran yang akan dilaksanakan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan yang di kutip oleh Bapak Aminudin, S.Sos., M.M yang menjabat sebagai Camat Kertajati pada saat wawancara yang dilakukan, menyatakan bahwa:

“Pada saat bulan Nopember itu hendak dilakukan pengukuran kepada lahan warga yang sudah pro, namun warga masyarakat yang masih kontra hendak menghalang-halangi pengukuran lahan milik warga yang pro dan berupaya untuk mengintimidasi, padahal kami dengan BPN dan dengan bantuan aparat mengukur kepada yang pro saja, namun tetap dihalang-halangi” (Wawancara, 26 September 2018)

Keinginan harga yang diminta oleh masyarakat yang kontra juga tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Pernyataan ini diperkuat oleh bapak Isya selaku Intel kodim yang bertugas dilapangan menyatakan bahwa:

“Untuk warga yang belum mau tanahnya di ukur itu sebenarnya meminta harga yang tidak realistis, harga yang diminta sama dengan harga jakarta, kalau dimajalengkan hitungannya memang perbata, tapi masyarakat ini meminta harga 1.500.000,00 s/d Rp. 2.500.000,00 / m² sedangkan harga bangunan adalah Rp. 3.000.000 /m².. kan sudah ada tim appraisal yang menilai,

jadi tidak bisa menentukan sendiri.” (Wawancara, 24 September 2018)

Dengan tuntutan harga yang diinginkan ini menjadi satu hal yang mendorong masyarakat yang kontra untuk tetap mempertahankan lahan miliknya dan tidak bersedia untuk diukur oleh Pihak BPN untuk pembangunan bandara BIJB Kertajati. Seperti juga yang diungkapkan oleh Pasi Intel Kodim bapak Dedi Kusnadi dalam wawancara yang dikutip menyatakan bahwa:

“Masyarakat terbagi menjadi dua yaitu masyarakat yang pro dan kontra, masyarakat yang pro ingin segera lahannya dibayarkan oleh pemerintah sedangkan masyarakat yang kontra masih belum mau dilakukan pengukuran, dan juga karena belum ada kesepakatan harga yang diinginkan” (Wawancara, 27 September 2018)

Begitu pun dengan pihak Badan Pertanahan Nasional ketika diwawancarai perihal pengadaan tanah dan prosedur pembayaran menyatakan bahwa:

“Untuk nilai berapa-berapanya memang pihak BPN tidak bisa menentukan karena yang tahu itu tim appraisal, yaitu lembaga independen yang menilai, jadi memang tidak bisa seenaknya sendiri untuk menentukan harga. dan pihak BPN hanya memfasilitasi agar keperluan untuk lahan pembangunan bisa dilaksanakan” (Wawancara.25 September 2018)

Harga yang dituntut oleh warga yang masih kontra ini saat ini adalah merupakan salah satu dari 9 tuntutan yang disampaikan oleh warga yang kontra, dan menyatakan bahwa jika tuntutan warga desa Sukamulya tersebut diatas belum dipenuhi maka seluruh proses pengadaan tanah tidak boleh dilakukan.

Dari faktor struktural dalam konflik yang terjadi tahun 2016 yaitu dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa tidak adanya komunikasi dan sosialisasi yang baik antara pemerintah daerah dan masyarakat, adanya

ketidaksesuaian kondisi yang dilaporkan dan kondisi yang sebenarnya dilapangan, dengan adanya keputusan sepihak tanpa melibatkan masyarakat yang memiliki lahan pertanian, Kemudian hal lain yang terjadi yaitu adanya intimidasi dan tindakan dilakukan oleh warga yang kontra kepada warga yang pro.

Kesalahan dalam penghitungan luas lahan masih terjadi, sehingga mereka harus mengajukan keberatan terhadap luas lahan yang tidak sesuai, yang dalam hal ini akan kembali mengulur waktu untuk bisa segera pindah dari lokasi yang terdampak bandara. Warga masyarakat enggan untuk pindah dari desa, dikarenakan mereka merasa bahwa ini tanah leluhur yang harus dijaga kelestariannya dan ada faktor sejarah didalamnya, karena desa dibangun oleh para pendahulu mereka dengan darah dan air mata sehingga keinginan untuk tetap mempertahankan desa sangat kuat

Di sisi lain bagi warga yang kontra harga yang diberikan pemerintah tidak sesuai dengan harga beli lahan kembali di wilayah sekitarnya sehingga apabila dibebaskan oleh pemerintah maka mereka tidak mendapatkan kembali lahan yang luasnya sama dengan yang mereka miliki sebelumnya, dan uang penggantian yang di berikan pemerintah tidak cukup untuk digunakan membangun rumah dengan luas yang sama seperti sebelum adanya penggusuran lahan dan pemukiman.

4.1.2.2 Faktor Pemicu/*Trigger* dalam Konflik Pembebasan Lahan di Kecamatan Kertajati.

Proses pengukuran yang dilakukan berakhir ricuh. Ini merupakan puncaknya dari beberapa konflik yang terjadi sebelumnya. Seperti salah satu contoh yang terjadi pada tanggal 13 Oktober 2015 ada beberapa warga yang dengan sengaja menghentikan aktivitas pembangunan BIJB, mereka meminta kepada pihak kontraktor untuk :1). Memberikan uang debu untuk warga di Desa kertajati, 2). Memberikan kompensasi debu tanaman palawija atau pertanian,3). Memperbaiki akses jalan dari

landasan sampai dengan ke desa selama jalan belum digunakan untuk pembangunan landasan,4). Memberikan kesempatan kepada warga desa sukamulya untuk dapat bekerja di proyek pembangunan bandara tersebut. Dalam tuntutan tersebut warga menghimbau apabila belum terealisasi tuntutan warga tersebut maka tidak boleh ada aktifitas pembangunan, namun sebaliknya apabila sudah terealisasi maka pihak perusahaan pengembang boleh bekerja lagi melanjutkan pembangunan bandara BIJB Kertajati.

Menurut data yang diperoleh melalui laporan harian kesbangpol kabupaten Majalengka, bahwa pada saat pengukuran terjadi di Desa Sukamulya yang dilakukan pada tanggal 17 Nopember 2016 oleh pihak BPN selaku instansi yang menangani pengadaan tanah untuk pembangunan dan Biro aset provinsi Jawa Barat memang sudah dihalang-halangi oleh warga yang kontra. Pengukuran melibatkan pihak keamanan karena untuk melindungi aset negara yang ada di wilayah tersebut dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Pengukuran dilaksanakan dengan mengikutsertakan kurang lebih 2000 anggota gabungan yang terdiri dari TNI Kodim, kepolisian dan Satpol PP untuk mengamankan jalannya pengukuran. Pengukuran tersebut telah disosialisasikan dan akan dilakukan terlebih dahulu kepada warga masyarakat yang sudah bersedia lahannya untuk dibebaskan. Dalam wawancara yang dilakukan dengan kepala bagian ketertiban umum Satpol PP yang mendampingi BPN dalam melakukan pengukuran lahan menyatakan bahwa :

“Pengukuran biasanya memang melibatkan aparat keamanan karena memang sudah seperti satu tim dan selalu di koordinasikan untuk kegiatan tersebut, kan tidak mungkin pengukuran berjalan sendiri, kalau dari satpol PP ada kurang lebih 200 personil yang diikutsertakan. (Wawancara, 25 September 2018)

Aparat keamanan juga telah dipersiapkan dan terjadi penembakan gas air mata terhadap warga, yang memang bersikukuh untuk menolak pengukuran lahan kendati sudah melakukan negosiasi yang cukup alot dengan petugas. Penembakan gas air mata dilakukan sudah dengan melalui SOP yang berlaku dilapangan, dan untuk menjaga dan menghalau masaa memasuki asset negara dan merusaknya. Hal ini diperkuat dengan adanya wawancara yang dikutip oleh Dandim 0617 Majalengka yang menyatakan bahwa :

“Kami dari TNI mempunyai tugas dan perintah bahwa harus mensukseskan pembangunan dan melindungi asset negara jangan sampai dirusak warga, karena jika sudah kondisi panas dan warga tidak terkendali akhirnya menjadi anarkis dan dapat merusak segala sesuatu yang ada. dan kami menjaga hal tersebut supaya tidak terjadi, namun tetap juga harus melindungi masyarakat yang ada. tentunya dengan segala sesuatu yang sesuai prosedur. dan memang hal ini sudah di prediksi dari awal bahwa banyak warga yang akan menghalang-halangi pengukuran” (Wawancara, 10 Oktober 2018)

Dari data yang diperoleh melalui kesbangpol Majalengka pada saat tim pengukuran tiba di lokasi wilayah Desa Sukamulya, Warga masyarakat telah berkumpul dan membentuk kelompok, yang terdiri dari Masyarakat yang kontra kurang lebih 350 orang, Gabungan masyarakat sukamulya dan kertasari, sebagian dari warga sukaresmi, dan dayak Indramayu yang mana mereka mempersenjatai diri dengan ketapel yang senjatanya adalah berupa baut yang berujung runcing, senapan angin, bambu runcing, batu, alat-alat pertanian lainnya dan petasan.

Dengan adanya rencana pengukuran tersebut massa yang kontra melakukan siaga satu dalam rangka mengantisipasi pengukuran dengan mempersenjatai diri. Dalam wawancara yang dikutip oleh kepala bagian ketertiban umum Kabupaten Majalengka menyatakan bahwa :

“Kebanyakan yang didapat dilapangan bahwa yang melakukan demo dan kumpul-kumpul tersebut kebanyakan

bukan dari warga Sukamulya sendiri, melainkan adanya orang suruhan atau orang sewaan seperti dayak indramayu yang ikut menjadi pemicu kericuhan” (Wawancara, 25 September 2018)

Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Kapolsek Kertajati kabupaten Majalengka yang menyatakan bahwa:

“Pendemo ada yang bukan warga asli desa Sukamulya melainkan warga yang datang dari luar dan ada intervensi yang berasal dari perbatasan indramayu karena bahasanya juga berbeda, dan mayoritas pedagang, dan masyarakat juga banyak disusupi oleh LSM, ” (Wawancara, 27 September 2018.

Sebelum bentrokan terjadi pada siang hari dilakukan upaya untuk musyawarah terlebih dahulu yang dilakukan pada pagi harinya, namun ternyata musyawarah yang berlangsung tidak terjadi kesepakatan yang diinginkan warga masyarakat. Kemudian warga masyarakat yang sudah berkumpul semakin anarkis dan melemparkan batu serta menembakkan ketapel dengan baut yang diruncingkan sebagai senjatanya, maka bentrokan pun terjadi tanpa bisa dihindarkan lagi dan mengakibatkan adanya 3 orang warga yang diamankan oleh pihak kepolisian.

Dari data yang diperoleh dan juga berdasarkan beberapa wawancara yang dilakukan maka diketahui bahwa yang menjadi pemicu sehingga menjadi puncak konflik pada tanggal 17 Nopember 2016 yang terjadi di Desa Sukamulya yaitu adanya pengukuran yang dilaksanakan oleh pihak BPN dan Biro Aset yang menyertakan ribuan aparat keamanan ke Desa Sukamulya, Pada hal masyarakat merasa bahwa apa yang dilakukan tidak disosialisasikan terlebih dahulu dan dilakukan dengan sewenang-wenang, dan tidak ada kejelasan mengenai harga yang disepakati namun tiba-tiba pengukuran kembali dilakukan dengan melibatkan ribuan aparat keamanan yang juga menembakkan gas air mata kearah warga yang sedang berkumpul dan dilakukan oleh aparat untuk menghalau massa sehingga banyak warga dan aparat pun mengalami luka-luka ringan. Ada

1 orang warga yang dipukul pada saat warga menghalang-halangi pengukuran.

Selain kondisi tersebut diatas, ada indikasi bahwa pemicu bentrokan yang terjadi di Desa Sukamulya juga karena pada saat itu massa di susupi oleh berbagai pihak yang menambah suasana tidak kondusif yaitu warga dari perbatasan daerah tersebut yaitu dayak indramayu. Dayak Indramayu yang merupakan warga di luar dari Desa Sukamulya yang ikut bergabung kedalam kelompok massa. Belakangan diketahui bahwa kelompok-kelompok massa tersebut yang menghadang aparat untuk melakukan pengukuran bukan merupakan warga pemilik lahan yang akan diukur oleh pihak BPN.

4.1.2.3 Faktor Pendorong atau Akselerator Konflik Pembebasan Lahan di Kecamatan Kertajati

Pembangunan Bandara BIJB Kertajati selain tersendat dengan adanya masyarakat yang kontra dan belum mau dilakukan pengukuran namun ternyata konflik juga bertambah dengan adanya keterlambatan dalam pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah sehingga masyarakat yang pro belum bisa pindah dan mencari lokasi yang baru. Seperti wawancara yang dikutip dari Kepala kesbangpol Kabupaten majalengka :

*“Sekarang yang saya ketahui memang sudah kondusif namun banyak juga masyarakat yang tanahnya sudah diukur namun belum juga ada pembayaran, sepertinya memang bertahap sesuai kebutuhan apa dulu yang diprioritaskan oleh pemerintah untuk bandara tersebut.”
(Wawancara, September 2018)*

Dalam beberapa kejadian keterlambatan ini menjadi pendorong kepada warga yang pro untuk berpihak kepada masyarakat yang kontra dikarenakan kekecewaannya kepada pemerintah. Adapun keterlambatan pembayaran lahan milik warga masyarakat tersebut yang dilakukan pemerintah dikarenakan adanya proses pelimpahan seluruh berkas yang dilakukan oleh Dishub Provinsi Jawa Barat kepada Biro Pengelolaan

barang dan Aset provinsi Jawa Barat, yang mana Leading sektor pembangunan bandara BIJB Kertajati telah berada di Biro Aset dan hal ini mengakibatkan proses pembayaran menjadi tersendat. Hal tersebut disampaikan dalam rapat pada tanggal 10 Mei 2016 bertempat di Gedung Yudha Karya Abdi Negara Pemuda di Kabupaten Majalengka, yang dipimpin oleh bapak bupati pada saat itu H. Sutrisno, S.E., M.Si.

Kekecewaan masyarakat dikarenakan pemerintah belum melaksanakan pembayaran di sampaikan melalui orasi unjuk rasa yang diikuti kurang lebih 350 orang yang dilaksanakan sebelum bentrokan terjadi yaitu pada tanggal 22 Februari 2016 bertempat di gedung PCNU Kabupaten Majalengka. Dalam orasi unjuk rasa tersebut tuntutan yang disampaikan yaitu : 1) Masyarakat mengeluhkan lambannya pembayaran yang dilakukan dari pihak BPN sehingga masyarakat yang pro BIJB merasa dirugikan, 2) Masyarakat menuntut pembayaran yang sudah dijanjikan agar segera terealisasi dalam waktu dekat, 3) Usut habis okum yang melakukan intimidasi kepada warga yang pro BIJB. Orasi unjuk rasa ini dilakukan di gedung DPRD Kabupaten Majalengka dengan menggunakan kendaraan roda empat sebanyak 28 unit, dan roda 2 sebanyak 25 unit kemudian massa bergerak menuju pendopo Kabupaten Majalengka.

Dari tuntutan warga tersebut pada kesempatan yang sama kepala BPN memberikan tanggapan bahwa adanya pengalihan pembayaran dari Dishub Provinsi Jawa Barat dan biro aset serta kepala BPN siap melaksanakan perintah apabila sudah ada kuasa dari biro aset. Dalam pertemuan tersebut juga sekretaris daerah yang menjabat pada saat itu menghimbau kepada masyarakat yang lahannya telah dibebaskan dan menerima uang ganti rugi sebaiknya jangan dipergunakan untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif saja namun harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kebutuhan pembelian lahan kembali dan juga pembangunan rumah tinggal terlebih dahulu.

Warga masyarakat yang telah mendapat ganti rugi dari pemerintah banyak yang menggunakan uang penggantian ke hal-hal lain yang bersifat konsumtif seperti membeli kendaraan baru, baik motor maupun mobil serta perabotan rumah tangga baru. Pembelian alat-alat rumah tangga yang baru didapat dengan alasan bahwa jika rumah baru lebih maka akan lebih enak jika perabotan rumahnya juga baru. Hal inilah yang mendorong warga masyarakat memprioritaskan ke hal yang bersifat konsumtif, inilah yang sangat disayangkan sehingga pembelian lahan pertanian kembali tidak dapat sesuai dengan luas semula dikarenakan uang yang di dapat dari hasil penggantian sudah terlebih dahulu dipergunakan untuk keperluan lainnya.

Selain faktor-faktor tersebut diatas, isu rumah hantu yang tidak dibayarkan oleh pemerintah juga menjadikan faktor pendorong terjadinya konflik yang terjadi semakin kompleks. Rumah hantu adalah rumah semi permanen yang dibangun dengan papan dan setengah tembok yang didirikan diatas lahan milik warga dengan maksud dan tujuan agar mendapatkan pembayaran ganti rugi yang lebih besar dari pemerintah, karena tanah, bangunan dan tanaman akan diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam hal ini rumah hantu merupakan rumah yang memang sengaja di bangun oleh warga dengan bahan yang sangat sederhana. Rumah hantu yang didirikan kisaran harganya berbeda-beda. Seperti yang diungkapkan oleh narasumber masyarakat Desa Sukamulya dalam wawancara di kutip :

“Banyak warga yang mendirikan rumah hantu, termasuk saya. karena waktu itu banyak orang bilang akan diganti oleh pemerintah, rumah hantu yang saya bangun hampir 15 juta, ada juga orang-orang yang buat 12 jutaan, jadi beda-beda. rumah jadi-jadian nempel aja ini sama rumah, padahal tidak diisi dan tidak ada apa-apa, tapi sekarang katanya tidak diganti, makanya saya rugi juga. waktu itu nyuruh orang untuk bangunnya.” (Wawancara, 16 Oktober 2018)

Berkenaan dengan fenomena rumah hantu yang terjadi di Desa Sukamulya ini juga dikutip wawancara kepada kepala desa Sukamulya yang menyatakan bahwa :

*“Rumah hantu adalah bentuk rumah tapi tidak di huni dan sengaja di bangun untuk mendapatkan penggantian lebih dari pemerintah, namun sekarang sudah tidak dibayarkan, kerana merugikan pemerintah juga yang memang rumah benar-benar ditinggali itulah yang dibayarkan.”
(Wawancara, 27 September 2018)*

Rumah hantu yang didirikan warga bukan hanya berada di tengah lahan pertanian atau perkebunan di Desa Sukamulya, namun rumah hantu ini juga ada yang didirikan hanya sekedar menempel dengan rumah utama, atau didirikan dibelakang rumah atau halaman rumah warga tanpa bisa dipergunakan. Rumah hantu ini di bangun di atas lahan pertanian dan hanya berupa bangunan semi permanen yang dibangun dengan modal cukup besar, dengan maksud akan mendapatkan keuntungan dalam penggantian uang ganti rugi. Seperti yang dinyatakan oleh kepala kesbangpol pada wawancara yang dikutip menyatakan bahwa :

*“Bangunan rumah hantu itu menjadi hal yang menggiurkan yang diharapkan akan dibayarkan oleh pemerintah, misalnya dari modal 12 juta yang dikeluarkan bisa jadi 60 juta, dan rata-rata rumah itu hanya titipan, Jadi ada permainan warga masyarakat itu sendiri”
(Wawancara, 24 September 2018)”*

Desa Sukamulya merupakan benteng terakhir dalam pertahanan dari dampaknya penggusuran lahan untuk kepentingan bandara BIJB Kertajati. Untuk desa lain hampir semua sudah dibebaskan untuk pembangunan bandara walaupun belum semua termanfaatkan untuk bangunan bandara, dikarenakan ada beberapa prioritas yang diutamakan dalam pembangunan untuk memenuhi standar penerbangan internasional yang dicanangkan pemerintah.

Senada dengan yang dinyatakan oleh kepala Bapelitbangda Majalengka yang berkenaan dengan fenomena rumah hantu, dalam kutipan wawancara menyatakan bahwa :

“Rumah hantu ini di bangun oleh oknum dan dibangun diatas tanah warga. Untuk sekarang ini rumah hantu yang berada diatas lahan warga tidak diganti, contohnya waktu ada pembebasan yang 500 meter untuk runway tidak diganti lagi dan hal ini menjadi salah satu yang mendorong konflik muncul kembali kepermukaan.” (Wawancara, 12 Oktober 2018)

Selain itu dengan adanya pembebasan lahan yang terjadi di pembangunan bandara BIJB Kertajati yaitu timbulnya spekulasi-spekulasi yang memanfaatkan kondisi ini sehingga harga jual tanah di wilayah kertajati dan sekitarnya mengalami kenaikan yang cukup tinggi, dan mengakibatkan daya beli masyarakat yang terdampak pembangunan menjadi kesulitan. Seperti yang dikutip dalam wawancara dengan kepala Bapelitbangda yang menyatakan bahwa :

“Seharusnya dari dana dan kebijakan yang ada dipetakan road mapnya dulu jadi harus jelas, harusnya dipisahkan road mapnya yang mana dan disesuaikan dengan kemampuan dana yang ada sesuai master plan yang ada. Jika tidak dilakukan perbatasan maka akan ada spekulasi yang masuk memanfaatkan tanah ini, dan menjadi pemicu konflik spekulasi ini, dan kalau tidak segera dibayarkan akan terjadi konflik lagi.” (Wawancara, 12 Oktober 2018)

Hal serupa juga disampaikan oleh direktur Lembaga Bantuan Hukum kabupaten Majalengka yang dikutip dalam wawancara menyatakan bahwa:

“Warga sekitar kurang paham hukum, apalagi hukum pertanahan, maupun hukum lainnya yang kemudian muncullah spekulasi-spekulasi dan investor yang memanfaatkan kondisi ini. dan dikarenakan juga jeda antara rencana akan dibangun bandara dengan mulainya pengukuran dan pembangunan terlalu lama sehingga banyak spekulasi dadakan yang muncul.” (Wawancara, 20 September 2018)

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor pendorong konflik yang terjadi di wilayah bandara BIJB Kertajati khususnya di Desa Sukamulya diakibatkan oleh adanya keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah yang terkait dengan lahan masyarakat pro dan sudah di ukur serta dilengkapi pemberkasannya, namun pembayaran belum juga teralisasi. Karena kekecewaan terhadap pemerintah ini maka warga yang pro mulai mendukung masyarakat yang kontra untuk tetap mempertahankan lahannya, dikarenakan pembayaran yang belum direalisasikan tersebut. Maka warga masyarakat merasa dirugikan karena bagi warga yang ingin segera pindah ke wilayah lain belum dapat melakukan hal tersebut dikarenakan pembayaran yang belum dipenuhi oleh pemerintah. Sedangkan harga yang ditawarkan di wilayah lain makin lama makin tinggi sehingga ada kekhawatiran dari sebagian masyarakat bahwa uang yang dibayarkan pemerintah tidak cukup untuk kembali membeli lahan baik untuk rumah maupun lahan garapan untuk pertanian sebagai mata pencahariannya.

Kemudian selain itu juga adanya permainan orang-orang tertentu yang sebelum ada sosialisasi memanfaatkan ketidaktahuan warga. Ada ketimpangan nilai harga jual, dan banyaknya rumah hantu yang didirikan warga dengan maksud-maksud tertentu, yaitu spekulasi-spekulasi yang memanfaatkan kondisi dengan menawarkan harga tanah kepada investor dengan harga tinggi sehingga akan berdampak kepada harga tanah disekitarnya yang membuat warga masyarakat yang terdampak bandara tidak dapat membeli kembali lahan untuk relokasi mandiri setelah tergusur oleh pembangunan bandara BIJB Kertajati.

Adanya rumah hantu ini merugikan pemerintah. Rumah hantu sempat terbayarkan pada tahap pertama, namun kemudian muncullah ratusan rumah hantu lainnya, yang tidak hanya warga sekitar yang mendirikan namun juga banyak orang yang dari luar yang bekerja sama dengan pemilik lahan untuk numpang membangun rumah hantu dengan

harapan bangunan rumah hantu tersebut dibayarkan oleh pemerintah.

Namun akhirnya diputuskan bahwa rumah hantu tidak akan dibayar lagi, dikarenakan hal ini sangat merugikan pemerintah. Banyak warga yang menyayangkan rumah hantu yang tidak dibayarkan oleh pemerintah dikarenakan pembangunan rumah hantu ini memerlukan modal yang cukup besar. Langkah yang diambil pemerintah untuk tidak membayar rumah hantu tersebut dikarenakan sudah menyalahi aturan yang ada, dan karena ada oknum-oknum yang memanfaatkan ini untuk mengambil keuntungan dengan didirikannya rumah hantu yang jelas-jelas hal ini dapat merugikan pemerintah. Seperti kutipan wawancara dengan Lembaga Bantuan Hukum kabupaten Majalengka yang menyatakan bahwa:

“konflik yang terjadi salah satunya adalah rumah hantu, rumah hantu ini rumah kosong yang sengaja dibuat untuk menaikkan harga jual karena harga bangunan lebih tinggi ketika mendapat kompensasi dari pemerintah. rumah hantu ini banyak juga investor yang bermain didalamnya, kerjasamad dengan pemilik lahan. Rumah hantu itu rumah tanpa lantai apalagi listrik, maka hal ini pemerintah tidak mau bayar, karena pada saat pengukuran tidak ada rumah tapi koq setelah menghitung asset rumah ini ada dan dimasukkan, dan ini merugikan pemerintah, makanya sekarang tidak dibayarkan.” (Wawancara, Kamis 20 September 2018)

4.1.3 Resolusi Konflik Pembebasan Lahan Pertanian untuk Pembangunan Bandara BIJB Kertajati

Konflik yang terjadi pada tanggal 17 Nopember 2016 menyisakan memori tersendiri bagi warga masyarakat Desa Sukamulya, hal ini menjadikan trauma mendalam yang dirasakan oleh warga masyarakat. Upaya yang dilakukan berbagai pihak terkait hal ini terus dilakukan, tidak terkecuali dari aparat keamanan yang hingga kini masih terus memantau situasi yang ada. Seperti yang dikemukakan oleh Dandim 0617 Majalengka dalam suatu wawancara yang dikutip menyatakan bahwa :

*“Saya menyerahkan kepada unit intel untuk menciptakan kondisi dan komunikasi sedini mungkin, saya tempatkan anggota saya untuk coba menggali aspirasi dari masyarakat itu apa dan bagaimana, agar saya di infokan.”
(Wawancara, 17 Oktober 2018)*

Bentrokan yang terjadi pada tanggal 17 Nopember 2016 pada saat itu menyebabkan perempuan dan anak-anak di Desa Sukamulya banyak yang diungsikan dahulu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Aparat keamanan masih berjaga-jaga dan disiagakan di lokasi kejadian sampai kurang lebih 3 hari setelah kejadian, karena dikhawatirkan bentrokan akan kembali terjadi. Warga masyarakat sudah mulai kondusif walaupun masih banyak yang berkumpul di balai desa menunggu upaya lain yang bisa dilakukan dalam meredam konflik agar tidak berkepanjangan.

Selain cipta kondisi damai yang dilakukan aparat keamanan khususnya Kodim dalam hal ini, Namun juga dilakukan pendekatan yang dilakukan secara persuasif kepada masyarakat dan melakukan upaya untuk mendorong pihak terkait agar memfasilitasi segala kebutuhan warga masyarakat. Misalnya saja kebutuhan akan perbaikan jalan. Kodim mendengarkan aspirasi masyarakat dan mencoba menjembatani hal tersebut dan mencoba memahami situasi serta kondisi yang telah dikomunikasikan sehingga tidak terjadi hal-hal yang dikhawatirkan dan akan terciptanya lingkungan yang kondusif demi kenyamanan masyarakat khususnya di Desa Sukamulya.

4.1.3.1 Mediasi Dalam Upaya Pembebasan Lahan Pertanian untuk Pembangunan Bandara BIJB Kertajati.

Bentrokan yang terjadi pada tanggal 17 Nopember 2016 bermula kurang lebih pukul 12.30 dan berakhir pukul 17.00. WIB. Ini terjadi ketika massa sudah mulai terdesak dan kembali berkumpul di balai desa. Setelah massa mulai kondusif lagi maka aparat keamanan menarik mundur pasukannya, Namun masih banyak aparat keamanan yang

ditempatkan dan disiagakan dilokasi kejadian untuk menjaga lingkungan agar tidak kembali terjadi bentrokan. Setelah kejadian tersebut ada upaya mediasi yang dilakukan melalui kunjungan dua orang staf kepresidenan ke Desa Sukamulya pada tanggal 19 Nopember 2016, Untuk menemui warga masyarakat, baik masyarakat yang pro maupun masyarakat yang kontra dan dihadiri pula oleh Intel kodim, Danramil Kertajati, Kapolres, Perwakilan BPN, Kapolsek dan berikut jajarannya. Pertemuan tersebut dilaksanakan di Balai Desa Sukamulya.

Ada beberapa keinginan yang disampaikan baik dari masyarakat yang kontra maupun masyarakat yang pro, masyarakat yang pro menginginkan agar di Desa Sukamulya dibuatkan semacam pos keamanan untuk mencegah adanya intimidasi lanjutan yang dilakukan oleh masyarakat yang kontra, kemudian disampaikan pula keinginan agar pembayaran terhadap uang ganti rugi kepada mereka dilaksanakan sekaligus dan secepatnya agar dapat segera relokasi secara mandiri.

Dalam pertemuan tersebut warga masyarakat yang kontra pun menyampaikan beberapa keinginan yaitu agar pihak keamanan yang masih disiagakan berada di Desa Sukamulya ditarik secepatnya, Selain itu masyarakat yang kontra pun menyampaikan agar warga sukamulya yang diamankan beberapa waktu lalu agar dibebaskan sehingga dapat berkumpul kembali bersama keluarganya. Kemudian di saat yang sama juga disampaikan bahwa sebagian masyarakat Desa Sukamulya menginginkan adanya jaminan kepastian relokasi dan juga ada jaminan kesejahteraan warga Desa Sukamulya dengan adanya pembangunan BIJB. Selain itu warga masyarakat yang kontra menyampaikan agar adanya jaminan bahwa Desa Sukamulya tidak hilang dalam arti harus tetap lestari.

Adapun tanggapan dari staf kepresidenan menyampaikan bahwa diantara masyarakat yang pro dan kontra harus saling menjaga agar

jangan sampai ada lagi warga masyarakat yang merasa terancam. Kemudian diantara masyarakat yang pro dan kontra bersama-sama harus bisa saling menahan diri untuk menciptakan suasana lingkungan dan situasi kondisi yang nyaman, dan meminta kepada warga Desa Sukamulya untuk selalu berkoordinasi dengan pihak keamanan setempat jika ada hal-hal yang dirasa tidak sesuai, dengan selalu mengutamakan komunikasi yang baik, dan dengan kepala dingin jangan mudah terpancing oleh emosi sesaat yang akhirnya akan merugikan semua pihak.

Sebagaimana Wawancara yang dikutip oleh Kapolsek Kecamatan kertajati, menyatakan bahwa :

“ Memang waktu itu ada dari Staf kepresidenan, sama-sama ngobrol jelaskan panjang lebar dan saya menjelaskan niat sebenarnya. dan juga aparat di lapangan kan memang sudah pakai SOP jadi tidak ada merekayasa semua. Kemudian diajak berembuk bareng dengan masyarakat, baik yang pro dan yang kontra. Setelah semua dijelaskan sudah ada clear dan tidak ada pelanggaran. Polisi hanya dibekali pentungan dan gas airmata saja karena memang semata-mata untuk melindungi diri.” (Wawancara, 27 September 2018)

Mediasi dilakukan setelah kejadian ini yang melibatkan Staf kepresidenan, Hal ini dilakukan mengingat ada kedekatan secara emosional dengan warga Desa Sukamulya dan juga dikarenakan ada bantuan dari Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) yang menjembatani pertemuan tersebut. Mediasi dinyatakan berjalan dengan baik ketika ada kesepakatan untuk ditarik mundurnya aparat keamanan yang disiagakan dilokasi kejadian, hal ini mengurangi kecemasan dan ketakutan warga terutama wanita dan anak-anak dengan banyaknya aparat yang masih berjaga-jaga di lokasi kejadian.

Selain itu disepakati pula bahwa masyarakat yang pro dan kontra harus tetap berkewajiban menjaga lingkungan yang kondusif agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan untuk sementara pengukuran dihentikan sampai batas waktu yang belum ditetapkan. Setelah pertemuan yang dilakukan di balai desa tersebut, maka kemudian beberapa perwakilan masyarakat diundang kembali secara khusus di kantor staf kepresidenan untuk mendengarkan aspirasi dari masyarakat setempat, walaupun pada kenyataannya sampai saat ini belum ada tindak lanjut yang lebih mendalam terkait dengan perkembangan hal tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa upaya mediasi yang dilakukan pihak ketiga sangat dibutuhkan dalam membantu menyelesaikan konflik yang terjadi, yaitu dengan sama-sama mendengarkan dan menyatakan pendapatnya serta keinginan yang dirasa dari masing-masing pihak yang sedang berkonflik. Upaya mediasi yang dilakukan pada tanggal 19 Nopember 2016 ini mampu meredam kondisi yang ada. Selain itu cipta kondisi yang dilakukan Kodim di nilai sangat berhasil melalui pendekatan secara persuasif dalam mendengar keluhan dan keinginan warga menjadikan upaya penanganan konflik menjadi lebih baik dan kemudian aspirasi dan keluhan warga masyarakat sebisa mungkin dijembatani kepada pihak yang terkait, agar pemenuhan keinginan yang dapat diterima bisa direalisasikan oleh pihak yang berkepentingan didalamnya.

4.1.3.3 Upaya menciptakan perdamaian (*Peace making*) dengan Penguatan Masyarakat lokal dalam Struktur Ekonomi sebagai Upaya Resolusi Konflik

Berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah daerah setempat dalam penanganan pasca konflik agar tidak terjadi konflik yang lebih besar lagi terkait dengan kondisi ekonomi yang ada di wilayah kabupaten majalengka. Terutama instansi Bapelitbangda beserta pemerintahan daerah Majalengka yang sedang berusaha untuk memperkuat struktur

ekonomi masyarakat agar tidak terjadi selisih yang terlalu jauh antara masyarakat yang kaya dengan masyarakat yang kurang mampu, hal ini dilakukan sebagai persiapan masyarakat Kabupaten Majalengka pada umumnya. dalam menghadapi pembangunan yang semakin pesat dengan adanya bandara BIJB Kertajati. Sebagaimana wawancara yang dikutip oleh Kepala Bapelitbangda Kabupaten Majalengka, yang menyatakan bahwa:

“Dengan rencana yang sedang dilakukan oleh bapelitbangda ini, dilakukan upaya dalam membangun struktur ekonomi yang kuat, dan kami sangat khawatir jika tidak mampu memenuhi infrastuktur yang ada, karena mau tidak mau kami harus siap dengan segala kondisi yang ada dengan adanya bandar.”
(Wawancara, 12 Oktober 2018)

Struktur ekonomi yang kuat akan menyeimbangi disparitas pendapatan yang ada agar disparitas pendapatan tidak semakin jauh antara masyarakat yang kaya dengan masyarakat yang kurang mampu. Salah satunya dengan mengembangkan topografi wilayah yang masih bagus kemudian membuka peluang untuk masyarakat agar bisa memiliki konsep untuk mengalihkan profesi ke bidang jasa dan perdagangan, dan juga pengembangan pariwisata sebagai lokomotif ekonomi tapi dengan konsep yang bukan pariwisata padat modal, melainkan berbasis kemasyarakatan, serta memberdayakan wilayah pemukiman penduduk sebagai tempat-tempat penginapan karena wilayah alam yang cukup bagus. Diharapkan dengan mengurangi disparitas pendapatan maka segala pemicu konflik yang terjadi akan berkurang.

Pemerintah akan berupaya untuk tidak membuka kembali ruang untuk industri, karena secara ekonomi, industri ini tidak menguntungkan bagi masyarakat lokal, karena masyarakat belum siap bersaing untuk memenuhi standar formal tenaga kerja untuk industri tersebut, karena rata-rata pendidikan masih rendah. Pemerintah terus melakukan upaya

perbaikan dalam bidang pendidikan agar masyarakat lebih siap lagi dalam bersaing untuk memperbaiki kehidupan perekonomiannya, selain itu penguatan dalam bidang pendidikan menjadi prioritas pula dikarenakan jika pendidikan rata-rata baik maka peluang pekerjaan yang lebih baik pun dapat di raih, sehingga pendapatan akan bertambah seiring dengan pekerjaan yang didapatkan, dan hal ini akan menumbuhkan ekonomi yang lebih baik lagi dalam mengikuti perkembangan pembangunan di wilayah Kabupaten Majalengka.

Dengan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dalam hal ini ada upaya pemerintah dalam menciptakan perdamaian di masyarakat untuk dapat memperkuat struktur ekonomi masyarakat yang sangat berdampak kepada pembangunan bandara. Dengan banyaknya pendatang yang akan memadati wilayah Majalengka dengan pusat bisnis yang mulai dikembangkan. Untuk itu pemerintah sedang berupaya menjaga kekuatan dalam bidang ekonomi, hal tersebut agar masyarakat lokal di Majalengka akan kuat menghadapi persaingan global yang semakin kompleks. Struktur ekonomi akan diupayakan untuk di bentuk yaitu dalam bidang perdagangan, bidang jasa maupun pengembangan pariwisata yang sangat menjanjikan di wilayah Majalengka, Karena jika pariwisata ini dimanfaatkan dengan baik tentunya dengan beberapa fasilitas yang ada dan berhubungan dengan penginapan yang konsepnya bukan lagi hotel melainkan perumahan penduduk yang akan dijadikan tempat penginapan. Maka dalam segi pariwisata diyakini hal ini akan berkembang pesat dengan kemudahan-kemudahan dalam sarana transportasi yang ada. Hal ini sedang diusahakan oleh pemerintah daerah agar terciptanya kondisi ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat Kabupaten Majalengka.

4.1.3.2 Pendekatan *Local Wisdom* dalam upaya penyelesaian konflik dimasyarakat Desa Sukamulya

Secara umum warga Desa Sukamulya merupakan warga masyarakat yang sangat menghindari konflik. Kehidupan warga desa sudah selaras dengan berbagai aktifitas yang dilakukan setiap harinya. Rata-rata warga desa Sukamulya memiliki hubungan kekerabatan sangat erat dengan sesamanya. Kehidupan sebelum bentrokan terjadi memiliki nilai sosial dan komunikasi yang baik dikesehariannya. Dengan adanya bentrokan yang terjadi pada tanggal 17 Nopember 2016 sangat mengganggu kehidupan warga dikarenakan hal ini bukanlah merupakan keinginan warga desa Sukamulya. Atas kejadian tersebut masing-masing kelompok memiliki kecurigaan-kecurigaan satu sama lainnya.

Warga Desa Sukamulya memiliki perbedaan pandangan dan perbedaan keputusan dalam menyikapi pembangunan bandara. Pada saat mulai ada pembangunan bandara dan juga bentrokan tanggal 17 Nopember 2016 belum terjadi, masyarakat memang sudah terbagi menjadi dua kelompok, yaitu masyarakat kelompok yang pro dan masyarakat kelompok yang kontra. Sebagaimana wawancara yang dikutip oleh Kepala desa Sukamulya, menyatakan bahwa :

“Dalam pembangunan bandara ini memang masyarakat ingin harga tinggi, dari kebijakan pemerintah yang ada wajar saja jika ada pro dan kontra yang terjadi dimasyarakat, masyarakat merasa merasa tidak puas dengan jumlah penggantian dari pemerintah, Karena memang warga sudah enak tinggal di sini dan sudah dari bertahun-tahun lalu orang tua semua tinggal di desa ini, Dalam hal ini ada beberapa yang berkeberatan dengan pembebasan ini dan merasa di rugikan.”(Wawancara, 27 September 2018)

Dengan adanya kejadian bentrokan pada tanggal 17 Nopember 2016 membuat kondisi yang semula tenteram dan nyaman menjadi sedikit terusik dikarenakan kondisi tersebut. Untuk mengembalikan kondisi

semula memang tidak mudah, namun beberapa upaya dilakukan oleh perangkat desa dan didukung oleh kepala dusun setempat yang membawa warga masyarakat sedikit demi sedikit kembali ke kondisi sebelum bentrokan terjadi. Walaupun kondisinya saat ini masih ada kelompok yang pro dan yang kontra, hal ini dijadikan sebagai pilihan atas kesediaannya untuk menyetujui ataupun tidak dalam pembebasan yang dilakukan pemerintah terhadap lahan pertaniannya. Upaya yang dilakukan salah satunya adalah tetap menggunakan adat istiadat di desa setempat dalam berbagai kegiatan yang sifatnya mengutamakan rasa kebersamaan. Dan hal ini memang sudah dijalankan sebelum kejadian bentrokan, Namun kegiatan ini lebih diprioritaskan pasca bentrokan terjadi agar terhindarkannya warga masyarakat menjadi saling curiga mencurigai antar sesamanya. Pada saat kegiatan berlangsung warga masyarakat yang pro dan kontra berbaur menjadi satu dan saling bicara, tanpa ada saling curiga untuk tetap menjaga kebersamaan.

Kondisi warga masyarakat sendiri sampai saat ini, diperkirakan yang kontra masih sekitar 50 kepala keluarga, namun masyarakat kontra saat ini sudah tidak menghalang-halangi pengukuran kembali terhadap warga masyarakat yang memutuskan untuk setuju dengan penggusuran dan pembebasan lahan pertaniannya yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan pembangunan bandara. Warga masyarakat untuk sekarang ini lebih kepada saling menghargai keputusan yang diambil oleh masing-masing kepala keluarga. Untuk masyarakat yang kontra menurut kepala desa dan perangkat desa pada saat dilakukan wawancara di dapat keterangan bahwa warga masyarakat yang masih kontra terdata sekitar kurang lebih 50 Kepala Keluarga yang sampai saat ini masih enggan lahannya untuk dibebaskan, dalam hal ini kepala desa sangat menghargai keputusan dan keinginan warganya baik yang pro maupun yang kontra.

Kepala desa beserta perangkat desa untuk saat ini lebih mengedepankan pembicaraan secara persuasif dan mendengar keluhan-

keluhan warga, ketika ada warga yang kontra ingin bertemu jam berapapun kepala desa tetap mengikuti keinginan warga tersebut. Dalam pertemuan tersebut disampaikan aspirasi dan keluhannya terkait dengan penggusuran lahan dan juga terkait dengan pembayaran yang masih belum dilaksanakan sepenuhnya. Setelah mendengarkan keluhan warga desanya maka kepala desa akan meneruskan kembali kepada pihak-pihak yang terkait dengan apa yang menjadi inti pembicaraan dalam pertemuan tersebut.

Selain itu kearifan lokal atau *local wisdom* di Desa Sukamulya yang ada dijalankan lebih intensif lagi. Setelah kejadian tanggal 17 Nopember 2018 kondisi menciptakan perdamaian melalui kearifan lokal ini semakin diperkuat diantaranya dengan adanya kegiatan warga masyarakat yang melakukan sholat istighosah berjamaah setiap malam jumat, hal ini dipimpin oleh tokoh agama di Desa Sukamulya. Selain melakukan sholat istighosah setiap malam jumat juga selalu diberikan siraman rohani kepada warga desa setelah sholat selesai dilaksanakan, Di dalam siraman rohani yang dilakukan oleh tokoh agama setempat selalu ditekankan tentang kesabaran dan hal-hal positif lainnya untuk dapat selalu berprasangka baik terhadap sesama. Sebagaimana wawancara yang dikutip kepada masyarakat Desa Sukamulya yang menyatakan bahwa:

“Setiap malam jumat ada sholat istighosah dimasjid, rata-rata jamaahnya banyak juga, ada bapak-bapak dan ibu-ibu juga, setelah itu ada ceramah dari pa ustad yang biasa mengisi pengajian disini, kalau ceramahnya sih tentang banyak hal salah satunya bersabar dengan kondisi sekarang, serahkan sama Allah atas segala kejadian, ikhlas intinya sih.” (Wawancara, 16 Oktober 2018)

Selain kegiatan sholat istighosah yang dilaksanakan setiap malam jumat, ada juga kegiatan lain yang dilakukan yaitu aktifitas tahunan yang dilaksanakan oleh seluruh warga masyarakat Desa Sukamulya yang menjadi kearifan lokal atau *local wisdom* yaitu dilakukannya acara

Suraan, Sedekah Bumi atau di sebut gaur bumi, Munjungan atau ziarah kemakam sesepuh desa, Mapag Sri serta kegiatan keagamaan lainnya seperti Peringatan Nuzulul Qur'an, Isra Miraj dan Maulid Nabi. Kegiatan ini sudah terjadwal di desa setiap tahunnya dan diinformasikan kepada kepala dusun setempat dan masyarakat secara keseluruhan. Kondisi ini dilakukan agar tetap terjaga suasana lingkungan yang kondusif pasca konflik terjadi agar warga masyarakat diberikan rasa kenyamanan dan rasa tenteram karena dapat melakukan aktifitas dengan aman dan dapat berinteraksi dengan sesama masyarakat baik yang pro maupun yang kontra.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa kearifan lokal atau *local wisdom* yang ada di Desa Sukamulya sangat membantu dalam berinteraksi antara sesama warga desa, serta dapat membentuk pola berpikir pada masyarakat setempat yang diliputi oleh kebijaksanaan dan bernilai positif dari kegiatan ini yang dilakukan tanpa adanya paksaan. Hal ini diikuti dan diyakini oleh seluruh anggota masyarakat di wilayah tersebut. Kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun ini bermacam-macam bentuk dan maksudnya serta memiliki tata nilai atau perilaku kehidupan masyarakat di Desa Sukamulya, yang akan memiliki dampak positif dan memiliki nilai kesinambungan bagi berbagai generasi ke generasi yang ada di masyarakat tersebut.

Dengan kegiatan yang menerapkan kearifan lokal atau *local wisdom* di wilayah tersebut diharapkan mampu menciptakan perdamaian pasca bentrokan terjadi dan menciptakan suasana yang kondusif, penuh kebersamaan serta menghilangkan jarak yang terjadi antara warga masyarakat yang pro dan warga masyarakat yang kontra, sehingga hal ini akan membawa dampak yang sangat baik terhadap kehidupan warga masyarakat dalam menjaga dan menciptakan kondisi semula sebelum bentrokan terjadi. Para perangkat desa dan masyarakat optimis selama

Desa Sukamulya masih ada maka hal ini akan terus dilakukan sambil menunggu keputusan dari pemerintah terkait lahan pertanian dan pemukimannya yang terdampak pembangunan bandara BIJB Kertajati

4.2. Pembahasan

Di dalam pembahasan ini tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran umum yang jelas serta konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif dibutuhkan pembahasan dan penjelasan yang sistematis dan rinci, Oleh karena itu peneliti berusaha mendapatkan data secara faktual dan interpretasi dilapangan tanpa adanya unsur subjektif dari peneliti. Pada sub bab ini peneliti mengaitkan hasil kesimpulan dari data temuan selama penelitian berlangsung dilapangan dengan berdasarkan teori-teori yang dipergunakan dalam menganalisis konflik serta resolusi konflik yang telah dilakukan dalam upaya menciptakan perdamaian.

Dalam Undang-Undang No 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial pasal 1 *point* 2 dinyatakan bahwa :

Penanganan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sudah terjadi konflik dan pemulihan pasca konflik”.

Dalam Undang-Undang jelas disebutkan terkait dengan penangan konflik yang ada, untuk itu dalam pembahasan ini dilakukan analisis konflik dan resolusi konflik berdasarkan data penelitian yang telah diperoleh guna mengetahui akar permasalahan dan penyelesaiannya sesuai dengan Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial ini.

Sesuai yang tertera di pasal 3 dalam Undang-undang Penanganan Konflik sosial yang tertuang dalam pasal 3 disebutkan bahwa: Tujuan dari penangan konflik ini adalah: (a) menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai dan sejahtera, (b) Memelihara kondisi damai dan

harmonis dalam hubungan kemasyarakatan, (c) meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, (d) memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan, (e) melindungi jiwa, harta benda serta sarana dan prasarana umum, (f) Memberikan perlindungan dan Pemenuhan hak korban, dan (g) memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum. untuk itu penanganan konflik jelas sangat di perlukan dengan tujuan yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Penangan Konflik sosial, agar konflik yang ada tidak semakin membesar dan menimbulkan korban jiwa.

4.2.1 Analisis Penyebab Terjadinya Konflik Pembebasan Lahan Pertanian untuk Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka

Pembangunan memiliki dampak negatif dan dampak positif, dampak negatif dengan adanya pembangunan yaitu adanya perubahan lingkungan yang terjadi di wilayah pembangunan. Perubahan yang terjadi ditimbulkan karena dalam pembangunan yang sudah pasti akan membutuhkan lahan, baik lahan pertanian, perkebunan atau bahkan lahan pemukiman yang akan terdampak dan dimanfaatkan untuk pembangunan tersebut.

Selain dampak negatif ada pula dampak positif dalam pembangunan, Negara yang sedang berkembang ditandai dengan pembangunan yang berkesinambungan. Tujuan utama pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan serta manfaat sosial ekonomi didalamnya. Dampak negatif ini tidak bisa dihindarkan karena dalam pembangunan tersebut pasti ada hal yang harus didahulukan, Terlebih dengan pembangunan yang diperuntukkan kebutuhannya demi kepentingan umum.

Konflik yang terjadi di kecamatan kertajati khususnya di Desa Sukamulya ini berdampak kepada terhambatnya upaya percepatan pembangunan proyek strategis nasional yang dicanangkan oleh pemerintah. Konflik yang terjadi menyebabkan pembangunan khususnya

runway menjadi sedikit terhambat di tahun 2016 tersebut. Walaupun sampai saat ini pembangunan terus dilakukan secara bertahap dan tetap menentukan hal yang menjadi prioritas dalam pembangunan.

Konflik yang terjadi di wilayah Kertajati khususnya di Desa Sukamulya, melibatkan pemerintah dan komponen masyarakat. Masyarakat yang terlibat konflik pun terbagi menjadi dua yaitu masyarakat yang pro dan masyarakat yang kontra. Masyarakat yang pro adalah masyarakat yang bersedia lahan pertanian dan pemukimannya dijadikan pembangunan bandara BIJB Kertajati dan menerima harga penggantian yang diberikan oleh pemerintah, sedangkan masyarakat yang kontra adalah masyarakat yang tidak bersedia lahan pertanian dan lahan pemukimannya digunakan untuk pembangunan bandara BIJB Kertajati dikarenakan beberapa faktor yaitu diantaranya bahwa lahan pertanian ini sebagai mata pencaharian warga desa Sukamulya dan dikarenakan juga adanya ketidaksesuaian dan kesepakatan harga yang diberikan oleh pemerintah.

Dalam beberapa sumber yang di peroleh sampai dengan tahun 2016 warga masyarakat Sukamulya yang kontra mencapai kurang lebih 60 persen sedangkan warga masyarakat yang pro sebanyak sekitar kurang lebih 40 persen, namun kemudian seiring berjalannya waktu hingga tahun 2018 ternyata warga masyarakat yang tadinya kontra banyak yang sudah pro, sehingga warga masyarakat yang kontra saat ini hanya tinggal sekitar 5 persen lagi dan sudah termasuk kedalam minoritas. Hal ini dikarenakan beberapa pendekatan secara persuasive yang dilakukan oleh pemerintah serta kodim ke desa tersebut dan rata-rata warga masyarakat bersedia menerima harga ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah.

Peran aparat keamanan diantaranya kodim merupakan pihak yang terlibat pula dalam hal ini, memang pada saat konflik bentrokan terjadi tanggal 17 Nopember 2016 aparat keamanan ini menjalankan tugasnya dalam mengamankan asset negara dikarenakan masyarakat yang sudah cenderung berlaku anarkis, sehingga ada beberapa tindakan yang diambil

oleh aparat keamanan yang sudah sesuai dengan SOP yang dijalankan pada saat dilapangan.

Pasca konflik bentrokan terjadi baik pihak kodim maupun pihak kepolisian melakukan cipta kondisi damai dilingkungan desa Sukamulya yaitu dengan mendengarkan aspirasi masyarakat dan mendengar keluhan-keluhan masyarakat terkait dengan pembangunan bandara. Pihak keamanan yang ditugaskan dilokasi dalam cipta kondisi damai tersebut menampung keluhan-keluhan dan keinginan warga masyarakat kemudian disampaikan kembali kepada pihak-pihak yang terkait didalamnya, agar ditemui jalan tengah yang baik agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, sehingga konflik yang terjadi dapat diupayakan untuk diredam agar konflik bentrokan tidak kembali terjadi.

Konflik berada pada eskalasi tertinggi yaitu tanggal 17 Nopember 2016 terjadi bentrokan yang melibatkan aparat keamanan yaitu kepolisian, TNI dan satpol PP yang ikut mengamankan lokasi pengukuran, masyarakat yang pro dan masyarakat yang kontra. Konflik berawal ketika pemerintah melaksanakan program pembangunan bandara Kertajati sesuai peraturan menteri perhubungan tahun 2003 tentang penetapan lokasi pembangunan bandara. Kemudian Sesuai dengan instruksi presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan proyek strategis nasional, diselesaikanlah proyek pembangunan bandara ini yang sempat tertunda hingga hampir 10 tahun lamanya. Namun dalam proses percepatan pembangunan ini terjadi penolakan dari warga masyarakat yang tidak bersedia lahan pertaniannya terdampak pembangunan bandara dikarenakan lahan pertanian ini merupakan mata pencaharian warga masyarakat dikarenakan lahan pertanian yang dipergunakan adalah termasuk lahan subur, yang masih produktif menghasilkan panen yang melimpah.

Adanya penolakan dan bentrokan atas pembebasan lahan pertanian warga masyarakat yang terjadi ini merupakan puncak dari beberapa penolakan-penolakan yang telah ada sejak tahun 2004 sejak ada surat

penyataan yang ditandatangani oleh 11 kuwu/kepala desa terkait dukungan akan dibangunnya bandara BIJB Kertajati, Namun awal penandatanganan surat pernyataan ini masyarakat tidak diberitahukan dan juga tidak dilibatkan bahkan tidak ada sosialisasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat.

Konflik yang terjadi ini merupakan konflik vertikal karena konflik ini terjadi antara masyarakat dengan pemerintah. Namun kemudian konflik ini pun tidak hanya menjadi konflik vertikal namun sudah menjadi konflik horizontal dikarenakan adanya konflik yang terjadi antara masyarakat yang pro dan masyarakat yang kontra. dari beberapa sumber yang didapat bahwa masyarakat yang kontra melakukan intimidasi terhadap warga masyarakat yang pro, Intimidasi dilakukan agar masyarakat yang pro tidak menjual lahan pertanian dan pemukimannya ke pemerintah untuk dijadikan bandara BIJB Kertajati

Selain itu konflik menjadi semakin kompleks ketika pada kumpul massa tanggal 17 Nopember 2016 yang dilakukan pada saat pengukuran dilangsungkan oleh pihak BPN dan melibatkan ribuan aparat keamanan, BPN melakukan pengukuran karena mengacu kepada UU RI no 2 tahun 2012 tentang proses pengadaan untuk kepentingan umum yaitu salah satunya harus dilakukan pengukuran langsung. dan bila mana sudah ada kesepakatan dari semua pihak maka BPN siap untuk turun melaksanakan pengukuran langsung, apabila tidak ada hasil ukur maka tanah tersebut tidak dapat disertifikatkan. Maka dari itu pihak BPN melakukan pengukuran langsung yang menyertakan aparat keamanan. Berdasarkan hal tersebut maka pengukuran dilakukan yang berakhir dengan bentrokan pada saat kejadian ada penyusup yang ikut berada di antara kumpulan tersebut, yaitu massa dari dayak indramayu yang bukan merupakan warga Desa Sukamulya.

Dayak indramayu adalah merupakan warga perbatasan yang dalam hal ini ada oknum yang mengajak warga perbatasan indramayu tersebut untuk ikut dalam kumpul massa yang dilakukan di desa Sukamulya.

Dalam beberapa informasi yang didapat bahwa warga perbatasan indramayu tersebut adalah orang sewaan yang diikutsertakan dan dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk ikut kedalam aksi tersebut sehingga menjadi provokator dan pemicu konflik semakin membesar. Pada dasarnya masyarakat desa sukamulya sendiri merupakan warga yang sangat menghindari konflik, namun banyak pemicu yang mengakibatkan bentrokan terjadi di tengah pengukuran yang dilakukan oleh pihak BPN dalam perpanjangan *runway* untuk percepatan penggunaan bandara BIJB Kertajati agar dapat digunakan pesawat berbadan besar.

Konflik ini sebenarnya terjadi antara pemerintah dan masyarakat yang kemudian hal ini menjadikan aparat keamanan juga terlibat didalamnya, karena pengamanan dengan BPN yang dilakukan dalam pengukuran lahan warga masyarakat yang kemudian ini menimbulkan konflik horizontal juga yang melibatkan sesama masyarakat, yaitu masyarakat yang pro dan masyarakat yang kontra. Setelah kondisi ini dari pihak kepolisian maupun pihak Kodim berupaya untuk meredam situasi dengan cipta kondisi yang ada antara masyarakat yang pro dan masyarakat yang kontra agar tercipta suasana yang kondusif pasca konflik bentrokan terjadi.

Apa yang menjadi Penyebab konflik adalah salah satunya terkait dengan adanya ketidaksepakatan harga yang diminta oleh masyarakat kepada pemerintah. dari penggantian yang dilakukan pemerintah rata-rata perbata dihitung 2,8 juta tergantung kondisi lahan dan wilayah dimana lahan berada, Namun hal ini dirasa masyarakat terlalu kecil jika dibandingkan dengan harga tanah sekitar wilayah bandara yang sudah semakin tinggi nilainya dikarenakan banyak investor asing yang membeli melalui spekulasi, sehingga banyak juga warga masyarakat yang menaikkan harga tanahnya menyesuaikan dengan tanah yang di jual kepada beberapa investor diwilayah tersebut, hal ini sangat merugikan

kepada masyarakat yang ingin membeli tanah namun masih tidak sesuai dengan harga yang dibayarkan dari pemerintah.

Selain harga yang tidak disepakati itu ada beberapa tuntutan masyarakat dalam penolakan pembangunan bandara BIJB Kertajati. Selain itu warga masyarakat pun merasa tidak dilakukan prosedur seharusnya terkait dengan sosialisasi yang dilakukan pemerintah dalam memutuskan pembangunan bandara, yang awal mulanya terkait dengan keputusan AMDAL bahwa wilayah Kertajati merupakan wilayah yang tandus, namun pada kenyataannya wilayah ini lahan pertaniannya masih mampu panen dua kali dalam satu tahun, dan juga masih dapat menanam palawija setelah panen padi dilangsungkan.

Konflik dapat terjadi Ketika masyarakat merasa bahwa hak-haknya belum terpenuhi oleh pemerintah maka ini akan menjadi suatu polemik yang lambat laun akan terjadi konflik yang berkepanjangan. Masyarakat Desa Sukamulya sudah merasa tenang dan tenteram berada didesanya dan menggarap lahan pertaniannya yang memang dipergunakan sebagai mata pencahariannya. Maka ketika masyarakat mulai terusik dengan ketidakjelasan dan kesewenang-wenangan yang dilakukan pemerintah, maka konflik akan terjadi. Selain itu faktor yang menjadi penyebab mengapa konflik bisa terjadi adalah tidak adanya transparansi dari pemerintah dalam menentukan harga tanah terkait pembebasan yang dilakukan, komunikasi dan sosialisasi yang dilakukan tidak maksimal sehingga banyak dari warga masyarakat menolak pembebasan dikarenakan ketidakjelasan uang ganti rugi yang akan di terima.

Kecamatan kertajati memiliki 14 Desa, namun yang terdampak pembangunan Bandara BIJB Kertajati hanya 7 desa, 6 dari 7 desa yang terdampak ini pembebasan mulai dilakukan dari tahun 2005 dengan proses yang panjang. Diantara 7 desa ini 6 desa sudah bersedia lahan pertanian dan pemukimannya terdampak pembangunan dan telah dilaksanakan proses pengukuran serta pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah secara bertahap, namun berbeda dengan 6 desa yang lain

satu desa warga masyarakatnya lebih banyak yang masih menolak yaitu desa Sukamulya. Dari 6 desa yang telah sepakat baik harga maupun lainnya. melalui berbagai komunikasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintahan di desa masing-masing. Pembayaran yang dilakukan pemerintah secara bertahap dan pembayaran yang dilakukan berjalan lancar. Rata-rata Warga dari 6 desa yang terdampak tersebut telah pindah ke wilayah yang tidak jauh dari lokasi tempat tinggal semula.

Konflik bentrokan yang terjadi di Desa Sukamulya bermula ketika Sejak Kamis pagi, tanggal 17 Nopember 2016 Desa Sukamulya mulai dengan kondisi mencekam, karena desa ini merupakan benteng penolakan terakhir, setelah desa lainnya mengalami penggusuran untuk pembangunan bandara Kertajati. Sejak pagi ada kabar bahwa akan ada pengukuran oleh BPN yang melibatkan ribuan aparat keamanan, maka warga Sukamulya berkumpul di lahan-lahan pertanian yang mereka garap untuk melakukan penolakan terhadap proses pengukuran lahan untuk kepentingan bandara. Lokasi terjadinya bentrokan adalah di lahan pertanian milik warga masyarakat pro yang lahannya akan di ukur oleh pihak BPN dalam rencana perpanjangan *runway*. Namun belakangan diketahui bahwa masyarakat yang menghalang-halangi dalam pengukuran adalah bukan masyarakat pemilik lahan pertanian yang akan di ukur tersebut, melainkan masyarakat yang masih kontra dengan pembangunan bandara.

Dalam pembahasan analisis konflik ini diketahui bahwa berdasarkan kerangka dinamis dari Ichsan Malik ditemui beberapa faktor yang terjadi dalam konflik, yaitu adanya faktor SAT (*Structural, Accelerator, dan trigger*) factor struktural yaitu akar dari suatu konflik yang biasanya tidak terlihat dipermukaan, adanya faktor pendorong atau biasa disebut sebagai akselerator serta faktor pemicu adanya konflik yang terjadi berupa suatu peristiwa yang menjadikan eskalasi konflik menjadi besar.

Malik (2003) menyatakan bahwa faktor konflik biasa dianalogikan dalam sebuah kebakaran yang besar dipadang rumput disebutkan karena

adanya rumput kering sebagai *structural*, sepercik api sebagai pemicu, dan angin yang bertiup kencang sebagai *akselerator*. Untuk melihat hubungan setiap faktor yang diumpamakan sebuah pohon. Sebagaimana anatomi pohon, alat analisis konflik pohon membagi faktor konflik kedalam tiga hal yakni akar yang mempresentasikan penyebab struktural dari konflik, kemudian batang yang merupakan hambatan yang terdekat, dan cabang yang mewakili indikator atau gejala-gejala konflik yang terlihat dipermukaan.⁹¹

Konflik terjadi bermula ketika diketahui sumber konfliknya yaitu penggunaan lahan pertanian yang akan digunakan dalam pembangunan Bandara BIJB Kertajati, yang mana lahan pertanian ini merupakan lahan subur yang dipergunakan masyarakat kecamatan Kertajati sebagai mata pencaharian yang mayoritas memang sebagai petani, kemudian berupa harga yang diberikan tidak sesuai dengan yang diinginkan.

Dinamika konflik yang terjadi dalam tahun 2014 sebelum terjadi konflik dan pasca konflik tahun 2016, berdasarkan hasil temuan dilapangan diketahui yaitu diantaranya pada tanggal 18 Nopember 2014 Satpol PP, polisi dan TNI mengawal juru ukur yang sudah berada di wilayah Desa Sukakerta untuk melakukan pengukuran di wilayah Desa Sukakerta dan Desa Sukamulya. Masyarakat Desa Sukamulya yang mengetahui berita tersebut datang ke lokasi dan bertemulah antara petugas dengan warga di perjalanan, Kemudian terjadilah dialog diantara mereka yang diantaranya menanyakan surat tugas, yang sebelumnya tidak ada pemberitahuan kepada warga masyarakat, dalam dialog tersebut terjadilah bentrokan kecil dan diamankan sejumlah senjata tajam kemudian disusul oleh lemparan batu oleh aparat keamanan di lokasi kejadian.

Kejadian lain dalam konflik yang ada yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 bertempat dikecamatan Kertajati khususnya di Dusun Sukaresmi Desa Sukamulya beberapa perwakilan warga menghentikan aktivitas pembangunan BIJB, dan perwakilan warga masyarakat tersebut

⁹¹ Bambang Wahyudi, *Penanganan konflik pendekatan kearifan lokal*, Yogyakarta 2018

meminta kepada pihak kontraktor untuk memberikan kompensasi uang debu, untuk warga di desa Sukamula, selain kompensasi uang debu kepada masyarakat, perwakilan warga tersebut meminta untuk memberikan kompensasi debu tanaman palawija dari pertanian yang digarap, selain kedua kompensasi yang diminta, perwakilan warga masyarakat meminta perbaikan atas akses jalan dari landasan sampai dengan blok desa bantarjati selama akses jalan belum digunakan untuk pembangunan landasan BIJB, serta memberikan kesempatan bagi warga desa sukamulya untuk dapat bekerja dalam proyek pembangunan bandara tersebut.

Puncak konflik terjadi pada tanggal 17 Nopember 2016 yang melibatkan masyarakat Desa Sukamulya dengan aparat keamanan yang disiagakan di lokasi pengukuran, bentrokan mulai terjadi sekitar pukul 12.30 sampai dengan pukul 17.00 WIB. Dalam bentrokan yang terjadi di Desa Sukamulya masyarakat menggunakan berbagai senjata yang telah dipersiapkan salah satunya adalah dengan menggunakan ketapel yang senjatanya berupa baut yang diruncingkan serta senjata lain yang digunakan untuk melawan petugas keamanan yang disiagakan di lokasi pengukuran tersebut. Kemudian untuk menghalau massa yang semakin anarkis maka ditembakkanlah gas air mata oleh aparat keamanan di lokasi kejadian, dan ada oknum warga yang diamankan akibat bentrokan yang terjadi tersebut.

4.2.1.1 Faktor Konflik Pembebasan Lahan Pertanian dalam Pembangunan Bandara BIJB Kertajati

Pada konflik yang terjadi dalam pembangunan bandara BIJB Kertajati ini dapat dianalisis bahwa banyak sekali faktor yang mendasari konflik terjadi, faktor struktural yang mendasar salah yaitu bahwa tidak adanya komunikasi dan sosialisasi yang baik antara pemerintah daerah dan masyarakat yang terdampak pembangunan BIJB Kertajati, Warga masyarakat enggan untuk pindah dari desa mereka dikarenakan mereka merasa bahwa ini tanah leluhur yang harus dijaga kelestariannya karena desa dibangun oleh para pendahulu mereka dengan darah dan air mata sehingga keinginan untuk tetap mempertahankan desa sangat kuat. Selain itu tidak adanya kesepakatan harga yang diinginkan bagi masyarakat yang kontra, sehingga masyarakat yang kontra berupaya menghalang-halangi pengukuran yang dilakukan oleh pihak BPN yang melibatkan aparat keamanan dengan jumlah yang besar.

Selain itu pula konflik terjadi ketika masyarakat merasa bahwa adanya ketidakadilan yang mereka terima, Seperti halnya yang ditemukan bahwa masih adanya terjadi kesalahan dalam penghitungan luas lahan sehingga hal ini mengakibatkan kesalahpahaman. Warga masyarakat harus mengajukan keberatan terhadap luas lahan yang tidak sesuai dengan pengukuran yang dilakukan pihak BPN, yang dalam hal ini akan kembali mengulur waktu untuk dapat pindah dari lokasi yang terdampak bandara.

Konflik bentrokan yang terjadi pada 17 Nopember 2016 diketahui bahwa adanya pemicu atau Trigger yaitu adanya pengukuran yang dilakukan oleh pihak BPN dan Biro Aset yang menyertakan ribuan aparat keamanan ke Desa Sukamulya, Dalam analisis yang didapat bahwa pengukuran tersebut terjadi karena proyek percepatan dari pemerintah yang mengharuskan bandara segera difungsikan dengan penambahan

jalur *runway* yang akan digunakan sebagai landasan pesawat terbang di bandara tersebut, Pengukuran lahan dilaksanakan kepada lahan warga masyarakat yang sudah bersedia tanahnya di ukur dan dibebaskan, namun konflik terjadi ketika dari masyarakat yang kontra berusaha menghalang-halangi pengukuran tersebut sehingga ribuan aparat keamanan melakukan pengamanan dan menembakkan gas air mata sebagai balasan atas hadangan massa yang berusaha menyerang aparat keamanan.

Selain kondisi tersebut diatas, ada faktor pendorong atau akselerator yang membuat masyarakat melakukan aksi anarkis, diantaranya yaitu ditemukan bahwa dalam peristiwa tersebut warga desa Sukamulya disusupi oleh LSM dan juga oleh dayak indramayu yang merupakan warga dari luar Desa Sukamulya yang kemudian ikut bergabung kedalam kelompok masa dan hal ini yang membuat suasana semakin tidak kondusif sehingga berakhir dengan bentrokan dan berakhir dengan ditangkapnya 3 warga Desa Sukamulya yang berusaha menyerang aparat keamanan. Massa menghadang aparat yang akan melakukan pengukuran bukan merupakan warga pemilik lahan yang akan diukur oleh pihak BPN.

Faktor pendorong lainnya yaitu adanya keterlambatan pembayaran yang dilakukan pemerintah terkait dengan lahan yang sudah diukur dan pemberkasan telah dilakukan namun belum juga terealisasi, sehingga hal ini menimbulkan kekecewaan masyarakat yang sudah pro dan mau menerima kompensasi ganti rugi yang diberikan, akibat dari tergusurnya lahan pertanian yang menjadi mata pencahariannya sehari-hari. Sehingga hal ini merugikan masyarakat yang ingin segera pindah ke wilayah lain namun belum dapat dilakukan karena belum mendapatkan penggantian kerugian oleh pemerintah. Hal ini menjadi kekhawatiran tersendiri dikarenakan harga tanah disekitar yang sudah mulai naik sehingga ada kekhawatiran dari sebagian masyarakat bahwa uang yang dibayarkan

pemerintah tidak cukup untuk kembali membeli lahan untuk rumah maupun lahan garapan.

Faktor lain yang menjadi pendorong terjadinya konflik yaitu adanya rumah hantu yang tidak dibayarkan dikarenakan akan merugikan pemerintah. Rumah hantu sempat terbayarkan pada tahap pertama, namun kemudian muncullah ratusan rumah hantu lainnya, yang tidak hanya warga sekitar yang mendirikan namun juga banyak orang yang dari luar yang bekerja sama dengan pemilik lahan untuk numpang membangun rumah hantu dengan harapan bangunan rumah hantu tersebut dibayarkan oleh pemerintah, namun akhirnya diputuskan bahwa rumah hantu tidak akan dibayar lagi. Rumah hantu merupakan upaya dari masyarakat untuk mengambil keuntungan dari penggantian yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini akan menjadi faktor pendorong konflik dikarenakan masyarakat yang telah mengeluarkan dana untuk pembangunan tersebut akan kecewa dengan pemerintah yang memutuskan untuk tidak melakukan penggantian rumah hantu, maka dengan kondisi ini masyarakat yang telah membangun rumah hantu akan mudah untuk menimbulkan konflik kembali.

4.2.1.2 Aktor Konflik

Aktor konflik adalah pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, baik terlibat secara langsung maupun secara tidak langsung. Dinamika aktor konflik dapat dengan mudah memunculkan konflik baru atau konflik yang meluas. konflik yang terjadi tidak terlepas dari aktor konflik yang ada didalamnya, terkait pembangunan bandara BIJB Kertajati ini aktor konflik utama yang sesungguhnya adalah antara pemerintah sebagai pemberi kebijakan dan pengambil keputusan dan masyarakat pemilik lahan pertanian yang mana lahan ini yang akan digunakan dalam pembangunan bandara BIJB Kertajati. Konflik ini merupakan konflik vertikal karena melibatkan pemerintah dan masyarakat. Konflik terjadi antara masyarakat

desa Sukamulya yang sebagian menolak lahannya dipergunakan untuk pembangunan bandara BIJB Kertajati, dan pemerintah yang melibatkan aparat keamanan sebagai petugas yang mengamankan asset negara agar tindakan anarkis yang dilakukan dapat dihentikan.

Aktor konflik dalam konsep kerangka dinamis Ichsan Malik terbagi menjadi dua, yaitu provokator dan kelompok rentan. Aktor konflik adalah suatu komponen dalam konflik yang kontribusinya sangat besar untuk meningkatkan eskalasi konflik. Konflik yang terjadi dalam pembebasan lahan BIJB Kertajati ini melibatkan beberapa elemen yaitu pemerintah dan masyarakat namun akhirnya melibatkan aparat keamanan karena terjadi bentrokan akibat dari pengukuran yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini pihak BPN yang melaksanakan tugas tersebut. Dalam masyarakat sendiri yang terbagi dalam kelompok-kelompok masyarakat, yaitu kelompok masyarakat yang pro dan kelompok masyarakat yang kontra. Kelompok masyarakat yang kontra ini merupakan kelompok masyarakat yang tidak menginginkan lahan pertanian dan pemukimannya terdampak atau tergusur oleh pembangunan bandara, jika tidak dilakukan sesuai dengan prosedur dan tahapan yang jelas serta tidak adanya kesepakatan harga yang diminta. Kelompok masyarakat yang kontra ini disusupi oleh provokator dari dayak indramayu yang adalah bukan merupakan warga dari Desa Sukamulya yang ikut pada aksi massa tersebut sehingga mengakibatkan warga Desa Sukamulya yang sudah kontra dengan cepat terprovokasi dan mudah tersulutnya kondisi konflik yang terjadi

Aktor konflik selanjutnya yaitu kelompok yang pro, kelompok ini menyetujui dengan adanya penggusuran lahan pertanian dan pemukiman yang terdampak pembangunan bandara, Kelompok masyarakat pro ini bersedia dalam kurun waktu kapan pun untuk diadakan pengukuran dan pemberkasan terkait lahannya yang terdampak pembangunan bandara. Pihak BPN yang menyertakan aparat dalam melakukan pengukuran sehingga terjadi bentrokan pada tanggal 17 Nopember 2016 . Selain pihak

BPN ada juga pemerintah daerah setempat yang berdasarkan Instruksi presiden dalam percepatan pembangunan proyek strategis nasional melaksanakan instruksi tersebut untuk mendukung pembangunan bandara BIJB Kertajati untuk kepentingan umum.

Adapun kelompok rentan adalah kelompok yang mudah terprovokasi sehingga menyebabkan meluasnya konflik yang terjadi. Dalam pembangunan bandara BIJB Kertajati ini ada pihak masyarakat yang sudah pro namun belum mendapatkan pembayaran ganti kerugian dari pemerintah sedangkan lahannya sudah di ukur dan pemberkasan sudah dilakukan, dalam kurun waktu menunggu tersebutlah masyarakat yang pro ini mampu menjadikan konflik meluas dikarenakan ada kekecewaan yang dirasa kepada pemerintah yang belum merealisasikan pembayarannya, Dalam pembayaran pembebasan lahan ini pemerintah melakukan secara bertahap dikarenakan kemampuan dalam APBD terbatas dan juga harus di sesuai dengan prioritas dalam pembangunan, namun masyarakat yang pro dan sedang menunggu pembayaran ini dapat dengan mudah terprovokasi oleh masyarakat yang kontra yang memang dari awal menolak pembebasan lahan untuk pembangunan bandara BIJB Kertajati. Untuk lebih memperjelas dalam aktor konflik dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 4.1 Aktor konflik dalam pembangunan bandara BIJB Kertajati

No	Kategori Aktor	Keterangan
1.	Masyarakat	
	Masyarakat Kontra	Masyarakat kontra adalah masyarakat yang memiliki lahan pertanian di lokasi kecamatan Kertajati khususnya di Desa Sukamulya yang tidak menginginkan lahan pertaniannya tergusur oleh proyek pemerintah dalam pembangunan bandara BIJB Kertajati sehingga melakukan berbagai penolakan dalam proses dan tahapan-tahapan yang dilakukan untuk pembangunan kepentingan umum yaitu bandara BIJB Kertajati.
	Masyarakat Pro	Masyarakat pro adalah masyarakat yang mendukung segala kebijakan pemerintah dalam pembangunan bandara BIJB Kertajati, serta menyetujui lahan pertaniannya dibebaskan dan bersedia pindah ke lokasi lain setelah mendapatkan uang penggantian dari pemerintah terkait pembebasan lahan pertanian dan pemukimannya.
	Kelompok Rentan	Kelompok rentan ini adalah kelompok masyarakat yang mudah terprovokasikan, dalam pembangunan bandara ini kelompok rentan adalah kelompok masyarakat pro yang telah melakukan semua prosedur pengukuran serta pemberkasan dan sedang menunggu penggantian dari pemerintah namun belum

		juga terealisasikan, masyarakat kelompok rentan ini dapat kembali mempengaruhi kelompok kontra untu tetap mempertahankannya sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah.
	Kelompok Provokator	Kelompok provokator yang disinyalir ikut berada dalam kumpulan massa pada saat terjadi bentrokan tanggal 17 Nopember 2016, kelompok ini berasal dari luar desa sukamulya yang disebut sebagai dayak indramayu, yang berusaha membantu warga desa sukamulya khususnya masyarakat yang kontra dalam menolak pengukuran lahan yang dilakukan pihak BPN. Selain kelompok dayak Indramayu, para spekulasi termasuk kedalam kelompok ini dikarenakan para spekulasi tanah yang memanfaatkan kondisi ini untuk menawarkan harga tanah yang lebih tinggi kepada investor, sehingga hal ini membuat tanah disekitar bandara melonjak semakin tinggi, yang menyebabkan harga dari pemerintah dirasakan oleh masyarakat sudah tidak sesuai dengan harga tanah disekitar bandara yang sudah melambung tinggi dikarenakan banyak permainan harga dari spekulasi, menyebabkan warga megharapkan harga yang lebih tinggi yang dibayarkan oleh pemerintah terhadap lahan pertanian dan pemukiman milik warga masyarakat.

2.	Aparat Keamanan	
	Kepolisian	Diikutsertakan dalam pengamanan pada saat pengukuran yang dilakukan oleh pihak BPN dalam pembebasan lahan untuk kepentingan <i>runway</i> pada tanggal 17 Nopember 2016 yang berakhir dengan bentrokan, kepolisian bekerja sesuai SOP dilapangan yang sudah sesuai dengan prosedur yang dijalankan.
	Satpol PP	Satpol PP diikutsertakan dalam pengamanan pengukuran yang dilakukan pihak BPN namun berakhir dengan bentrokan, posisi satpol PP berada paling akhir di dalam barisan untuk menghalau masyarakat yang hendak menghalangi pengukuran yang dilakukan oleh pihak BPN.
	Kodim	Berperan mengamankan asset negara dan diikutsertakan dalam pengukuran untuk menjaga dan melindungi proses pengukuran agar berjalan dengan aman dan terkendali serta yang paling utama adalah mengamankan asset negara agar tidak dirusak massa pada saat pengukuran tanah yang dilakukan pihak BPN beserta Tim yang ditugaskan dilapangan.
3.	Pemerintah	
	Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten	Melaksanakan kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah provinsi dalam pembangunan bandara BIJB Kertajati yang sesuai dengan prosedur yang telah dijalankan untuk menyukseskan

		pembangunan sesuai instruksi presiden dalam program percepatan proyek strategis nasional.
	Badan Pertanahan Negara (BPN)	Badan Pertanahan Negara (BPN) melaksanakan kebijakan yang diberikan pemerintah Kabupaten dan provinsi dalam pemenuhan kebutuhan pengadaan lahan untuk pembangunan Bandara BIJB Kertajati, BPN melaksanakan pengukuran bersama dengan juru ukur dan bekerja sama dengan tim appraisal untuk melaksanakan pembayaran dan melakukan segala hal mengenai pemberkasan tanah.

Sumber : Kesbangpol Kabupaten Majalengka

4.2.1.3 Eskalasi dan De-eskalasi Konflik

Tingkat eskalasi memberikan kontribusi dalam melihat sejauh mana konflik tersebut mengakibatkan ketegangan dan kekerasan yang terjadi. Pada konflik pembebasan lahan pertanian untuk pembangunan bandara BIJB Kertajati ketika dilihat dari model eskalasi yang ditawarkan oleh Frederich Glasl (1997), bahwa konflik lahan yang terjadi berada pada tahap 5 yaitu *Lose of face*, yaitu serangan terbuka dan dilakukan secara langsung mengenai integritas moral lawan yang bertujuan untuk membuat mereka kehilangan muka, tahapan eskalasi utama, lawan harus dipermalukan, saling menyerang diranah publik. Tindakan yang menyebabkan rasa malu dimuka umum untuk satu maupun kedua belah pihak, hal ini terjadi pada konflik pembangunan bandara BIJB yang mana hal ini sudah terjadi yaitu dengan adanya serangan terbuka yang dilakukan di tengah lahan pertanian dan saling berhadap-hadapan dan masing-masing menggunakan senjata yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Hal ini dilakukan untuk menghadang dan menghalau tindakan yang dilakukan dan tidak sesuai dengan prosedur yang ada serta dilakukan secara sepihak sehingga kondisi ini membuat konflik semakin terjadi diantara kedua kubu yang saling berhadap-hadapan. Dalam hal ini kehormatan mulai diserang secara berulang ulang dan dilakukan secara terbuka, Semua gerakan pihak lain dianggap sebagai tipu daya, dan muncul *phase* kehilangan muka yang berhubungan dengan tindakan untuk membuat salah satu pihak merasa bahwa mereka dihakimi sebagai pihak lain dianggap sebagai tidak bermoral atau kriminal. Dalam fase ini komunikasi sangat tidak sehat cenderung saling menjatuhkan dan menuju kearah kebuntuan. Awal kumpul massa yang terjadi di lahan pertanian Desa Sukamulya melakukan komunikasi yang dilakukan perwakilan masyarakat dan aparat, namun tidak terjadi kesepakatan dan masing-masing berada pada posisi mempertahankan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam kebuntuan ini merendahkan pihak lain mungkin satu-satunya pilihan yang bisa diambil untuk meningkatkan citra diri. Komunikasi yang dijalin pada saat bentrokan belum mulai terjadi tidak dapat di laksanakan lagi, dikarenakan tidak menemukan kesepakatan dan masing-masing pihak sudah dalam posisi siap untuk melakukan kekerasan fisik. Serangan-serangan terbuka saling terjadi tanpa dapat di hindari lagi. Jika konflik sudah dalam tahapan ini maka solusi *win-lose* akan terjadi sehingga upaya resolusi yang harus dilakukan adalah dengan proses konsultasi pihak ke tiga yang netral dan mediasi. Dengan resolusi ini diharapkan mampu meredam konflik yang ada sehingga menghindari konflik menjadi semakin meluas.

Maka dari analisis konflik yang terjadi yang telah dijabarkan diatas bahwa konflik bermula ketika opini pembangunan bandara pada tahun 2004 sudah mulai muncul kepermukaan sedang kondisi yang ada belum dilakukan sosialisasi serta komunikasi yang baik secara terperinci,

sehingga terjadi konflik vertikal antara masyarakat dan pemerintahan, selain itu konflik horizontal pun mewarnai pembangunan ini dimana perbedaan keputusan antara masyarakat yang pro dan masyarakat yang kontra memicu timbulnya upaya intimidasi yang dilakukan terhadap masyarakat yang pro. Seperti yang telah dipetakan diatas tentang penyebab konflik menurut kerangka dinamis Ichsan Malik. Meskipun kondisi sekarang telah kondusif namun masyarakat yang kontra tetap ada walaupun jumlahnya sudah minoritas namun tetap saja keberadaannya harus tetap diperhatikan. Kemudian sesuai yang ada bahwa konflik menurut teori glasl, telah di jelaskan bahwa tahapan konflik yang terjadi adalah sudah pada level 5 yang penyelesaiannya melibatkan pihak ketiga dengan upaya negosiasi serta mediasi yang dilakukan.

4.2.1.4 Nilai Tanah

Nilai tanah disinyalir menjadi faktor yang sangat penting dalam pembebasan lahan, ketika harga tanah yang diberikan pemerintah tidak sesuai dengan kondisi harga tanah yang ada disekitarnya maka hal ini akan menjadi konflik, begitupun yang terjadi di Kabupaten Majalengka ini. sebagian masyarakat menolak lahannya untuk dibebaskan dikarenakan harga tanah yang dibayarkan sudah tidak sesuai dengan kondisi harga tanah yang sudah melambung tinggi diseputar bandara BIJB Kertajati. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ray M. Northam yang menyatakan bahwa nilai tanah adalah nilai *market value* yaitu harga jual beli tanah yang terjadi pada suatu waktu tertentu, beliau juga mengemukakan bahwa nilai tanah adalah nilai yang diestimasi oleh seorang penilai. hal ini dikemukakan pula oleh Agus Prawoto yang mengatakan bahwa setiap persil dari tanah itu bersifat unik dilokasinya serta komposisinya, nilai tanah bukan hanya kaitannya dengan harga tanah yang ada namun nilai tanah yang sesungguhnya adalah bersumber dengan daya alam yang dikuasai oleh negara, bahwa nilai tanah akan semakin tinggi jika disekitarnya telah dilakukan pembangunan baik dari

sarana dan prasarana yang ada baik itu jalan maupun pembangunan kepentingan umum lainnya maka nilai tanah disekitarnya akan semakin tinggi dan jauh di atas dari nilai NJOP yang ada.

Tanah yang awalnya dapat dikatakan tidak memiliki nilai sebelum ada pembangunan, maka harga tanah akan semakin tinggi jika sudah dilakukan pembangunan disekitarnya terlebih jika pembangunan tersebut merupakan pusat bisnis dimana para investor akan datang berbondong-bondong untuk menginvestasikan tanahnya diwilayah tersebut. Hal ini terjadi di Kabupaten Majalengka yang dikarenakan pembangunan bandara BIJB Kertajati sedang terus dikembangkan dan di dukung oleh sarana dan prasarana jalan yang memadai, maka dengan kondisi tersebut harga dan nilai tanah yang ada di kabupaten ini semakin tinggi dan dengan munculnya spekulasi-spekulasi tanah yang memiliki peran dalam melonjaknya harga nilai tanah yang ditawarkan, sehingga harga tanah yang dibayarkan oleh pemerintah di rasa sudah tidak sesuai dengan harga dan nilai tanah di sekitar lokasi bandara. Harga yang sudah tidak sesuai dengan kondisi di seputar bandara inilah yang menjadi salah satu penolakan dari masyarakat yang menginginkan harga yang lebih tinggi lagi sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada di wilayah tersebut.

4.2.2 Resolusi Konflik Pembebasan Lahan Pertanian untuk Pembangunan Bandara BIJB di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka.

Konflik yang terjadi yang melibatkan masyarakat baik yang pro maupun yang kontra dengan pemerintah mengakibatkan puncak konflik terjaid bentrokan antara masyarakat dengan aparat keamanan yang mengamankan lokasi pengukuran. Setelah konflik yang terjadi tersebut pada tanggal 17 Nopember 2016 maka ada upaya yang dilakukan untuk mengatasi kondisi yang kondusif, kondisi kondusif ini tidak serta merta didapatkan melalui hal yang mudah, diperlukan upaya-upaya resolusi

konflik yang salah satunya adalah melalui upaya pendekatan yang dilakukan Kodim setempat dalam melakukan atau mendengarkan keluhan-keluhan warga desa sukamuya terhadap kondisi saat ini. Kebijakan terkait hal ini dikoordinasikan dan dinilai sangat penting dalam upaya resolusi konflik yang dilakukan. Pemerintah dalam hal ini pun harus berupaya memperhatikan keadaan yang berkenaan dengan dampak yang terjadi dalam pembangunan. Selain tetap mendukung program pemerintah dalam pembangunan berkesinambungan. sebagaimana yang tertuang didalam pasal 6 Undang-undang Penanganan konflik sosial disebutkan bahwa :

- (1) Pencegahan konflik dilakukan dengan upaya: a. memelihara kondisi damai dalam masyarakat, b. mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai, c. meredam potensi konflik dan, d. Membangun sistem peringatan dini.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah daerah dan Masyarakat

Kebijakan Kodim dengan adanya pendekatan secara persuasif yang dilakukan, hal ini sangat berpengaruh baik kepada kondisi masyarakat pasca konflik terjadi dan warga masyarakat merasa diperhatikan dengan kondisi yang ada. Sedikit demi sedikit apa yang menjadi keluhan warga dapat terealisasi, adanya koordinasi yang dilakukan terkait dengan keluhan dan keinginan warga masyarakat dapat direalisasikan seperti contohnya perbaikan jalan alternative yang dilakukan Perusahaan BIJB dan bekerja sama dengan Pemerintah kabupaten dalam memberikan fasilitas jalan yang lebih baik. Seperti masukan kepada perusahaan agar dapat di serapnya tenaga kerja warga sekitar dalam pembangunan BIJB Kertajati.

4.2.2.1 Pemangku Kepentingan

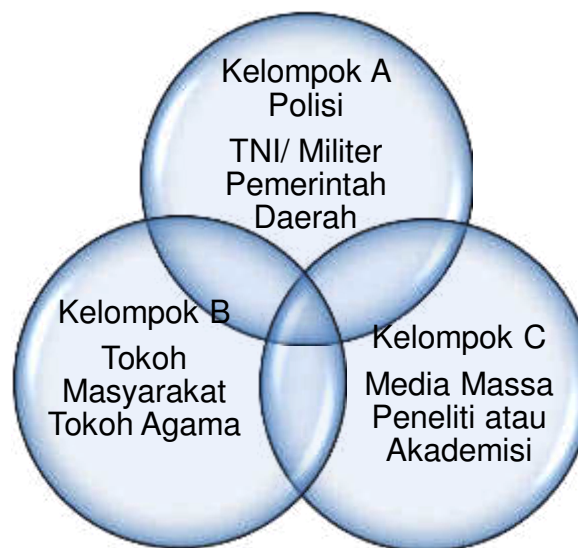
Kelompok masyarakat pemangku kepentingan atau *stake holder* adalah komponen keempat dalam kerangka dinamis pencegahan dan penyelesaian konflik. Pemangku kepentingan adalah elemen yang berkepentingan untuk menghentikan konflik serta mencegah meluasnya konflik. Elemen ini terdiri dari kelompok polisi, militer, tomas, toga, kelompok LSM, Media Massa dan kelompok peneliti. Pemangku kepentingan sangat berpengaruh terhadap eskalasi maupun deeskalasi konflik yang ada, pemangku kepentingan berperan sebagai rencana aksi dalam pembangunan perdamaian, meredam konflik yang ada agar tidak menjadi tingkatan eskalasi konflik yang lebih mengkhawatirkan. Pemangku kepentingan ini diharapkan mampu berkomunikasi, memberi kontribusi, bekerja sama, dan saling berkoordinasi agar mencegah terjadinya konflik dan menghentikan konflik jika sudah terjadi. Pemangku kepentingan ini diharapkan dapat menjadi pihak-pihak yang proaktif dalam pencegahan dan penyelesaian konflik, menjadikan bagian dari solusi bukan menjadi bagian dari masalah.⁹²

Dalam konflik Pembangunan bandara BIJB Kertajati pemangku kepentingan berperan masing-masing kepada upaya resolusi konflik yang terjadi dengan adanya pendekatan secara persuasif yang dilakukan kepada masyarakat, kemudian peran tokoh agama dalam setiap kesempatan keagamaan berupaya memberi masukan kepada masyarakat untuk tetap berserah diri dan bersabar dalam menghadapi kondisi yang ada di lingkungan. Begitu pun dengan *stake holder* yang lain yang berkepentingan didalamnya dan masing-masing memiliki tanggung jawab dalam upaya resolusi terhadap konflik yang terjadi, membangun upaya kondusif yang ada dalam masyarakat agar dapat dikomunikasikan dengan

⁹² Ichsan Malik, *Resolusi konflik Jembatan perdamaian*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta 2017 hlm 235

baik sesuai prosedur dalam tahapan-tahapan pembangunan BIJB Kertajati yang dilaksanakan.

Adapun pemangku kepentingan dalam resolusi konflik kerangka dinamis Ichan Malik dalam pembangunan bandara BIJB Kertajati dapat dikategorikan sebagai skema berikut ini:



Gambar 4.9 Skema Pemangku Kepentingan

Dalam skema di atas dapat dijelaskan bahwa pemangku kepentingan yang ada dikategorikan sebagai kelompok A,B dan C. Dimana kelompok A ini mempunyai peranan penting dalam resolusi konflik pembangunan BIJB Kertajati agar konflik tidak semakin melebar. Pemangku kepentingan kelompok ini pun memiliki tugas dalam mendukung pembangunan yang ada dan sudah dicanangkan oleh pemerintah. Pemerintah daerah meminta bantuan kepada TNI dan kepolisian untuk mengamankan kondisi konflik yang ada agar tidak berkelanjutan yang menyebabkan kondisi di wilayah Kertajati menjadi tidak kondusif.

Pemangku kepentingan dalam kelompok A ini termasuk aktor yang berperan sangat penting dalam membawa konflik semakin tinggi

eskalasinya atau semakin rendah. Pemangku kepentingan kategori A ini berperan mendukung dan menjaga segala fasilitas pemerintah, mendukung dan mengamankan pembangunan serta mengkondisikan segala hal agar tidak terjadi konflik. Kelompok A ini bertugas sebagai *stake holder* yang juga memiliki kewenangan dalam penyelesaian konflik agar tidak semakin meluas di wilayah terjadinya konflik yaitu di Desa Sukamulya Kecamatan Kertajati.

Kelompok B adalah tokoh masyarakat, dan tokoh agama Tokoh masyarakat. Dalam kerangka dinamis Icsan Malik. Kedua tokoh ini memiliki kapasitas besar dalam meredam konflik yang terjadi, diibaratkan sebagai pemadam kebakaran di kalangan masyarakat yang terlibat konflik, baik masyarakat yang pro maupun yang kontra. Kelompok pemangku kepentingan ini menjaga agar konflik tidak menyebar dan menyebabkan kerusakan semakin besar dan semakin bertambah tinggi eskalasinya. Maka dari itu kelompok B dalam pemangku kepentingan ini menjaga dan mengkondisikan masyarakat agar tetap menyelesaikan masalah dengan baik serta mengutamakan musyawarah dalam memutuskan segala sesuatunya agar konflik bentrokan yang pernah terjadi tidak terulang kembali. Tokoh agama di Desa Sukamulya ini yang memimpin masyarakat yang ada dalam berbagai ibadah seperti sholat istighosah yang dilaksanakan setiap malam jum'at dan setiap ibadah yang dilaksanakan diselipkan doa-doa dan tausiyah agar masyarakat tetap dalam kondisi berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa atas setiap kejadian yang ada dengan selalu bersabar dengan kondisi yang dihadapi.

Kelompok pemangku kepentingan selanjutnya yaitu kelompok C yaitu yang terdiri dari akademisi atau peneliti serta media massa. Akademisi memposisikan sebagai kelompok netral yang tidak memihak keduanya namun memahami kondisi konflik yang ada tersebut, akademisi lebih kepada berupaya mencari jalan tengah terhadap konflik yang mencuat kepermukaan. Melihat dari sisi akademisi bahwa di satu sisi

pembangunan ini dilakukan karena merupakan program yang dikembangkan pemerintah di mana setiap pembangunan yang dilaksanakan pemerintah untuk kepentingan umum seluruh warga masyarakat dan elemen yang lainnya harus mendukung pembangunan tersebut, namun disisi lain segala bentuk pembebasan yang dilakukan pemerintah harus pula memperhatikan kebutuhan masyarakat dan harus sesuai dengan prosedur yang dijalankan, agar dapat seiring sejalan tanpa ada yang merasa dirugikan.

Akademisi bertindak sebagai pemberi masukan atas berbagai kebijakan dan keputusan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Begitupun media massa yang ada, media massa juga sangat berperan dalam membentuk konflik yang ada apakah eskalasinya semakin tinggi atau semakin rendah, karena dengan media massa segala hal yang menjadi pemicu konflik dapat kembali terjadi jika dalam pemberitaan media massa tidak kooperatif atau lebih memihak kepada yang memberi keuntungan. Dengan demikian media massa dapat menjadi salah satu yang dapat memberikan kontribusi dan informasi positif dalam upaya resolusi konflik jika pemberitaannya menyejukkan dan tidak memihak. Dalam beberapa pemberitaan terkait dengan konflik bandara BIJB Kertajati, CNN Indonesia memberitakan terkait konflik yang ada yaitu pada tanggal 19 Nopember 2016, dengan judul “ Petani Majalengka Ketakutan, Utusan Istana turun tangan”, dalam berita tersebut CNN Indonesia memberitakan bagaimana mediasi dilakukan yaitu dengan pertemuan antara staf kepresidenan dan masyarakat, yang kemudian terjadi dialog diantara pertemuan tersebut. Artinya media massa CNN Indonesia memberitakan hal yang sesungguhnya terjadi sehingga tidak memposisikan pemberitaan yang memberatkan kesalah satu pihak saja.

Kemauan politik penguasa dalam menyelesaikan konflik yang ada yaitu adanya unsur Pemangku kepentingan. Dalam menyelesaikan konflik yang ada di Desa Sukamulya, Pemangku kepentingan yang ada

ikut membantu terciptanya kondisi yang aman di desa Sukamulya. Polisi dan tentara/TNI menjaga lingkungan tetap kondusif dengan cipta kondisi, anggota intel dari kodim dikerahkan untuk tetap menyerap aspirasi masyarakat maunya seperti apa dan bagaimana, kemudian disampaikan kembali kepada pihak yang berwenang, dengan adanya komunikasi yang dijalankan dengan baik maka akan timbul suatu saling kepercayaan bagi masyarakat bahwa keluhan dan aspirasi warga masyarakat di dengar dan di perhatikan oleh pihak yang berwenang.

Begitu pun dengan tokoh agama maupun tokoh masyarakat yang ada di daerah konflik, Tokoh agama yang ada meredam konflik dengan upaya yang dilakukan di Desa Sukamulya pada pasca konflik dilakukan sholat istighosah pada malam jumat setiap minggunya, sholat isighosah ini diikuti oleh seluruh masyarakat desa Sukamulya dengan berjamaah melakukan sholat istighosah setiap malam jumat, kegiatan ini dipimpin oleh tokoh agama di Desa Sukamulya. Selain melakukan sholat istighosah setiap malam jumat, Tokoh agama di desa sukamulya ini memberikan siraman rohani kepada warga desa setelah sholat dilaksanakan, Di dalam siraman rohani itu selalu ditekankan tentang kesabaran dan hal-hal positif lainnya untuk dapat selalu berprasangka baik terhadap sesame dan ikhlas dengan kehidupan yang dijalani, ditekan pula bahwa tetap menjaga kerukunan dan kebersamaan walalupun memiliki pandangan dan pendapat yang berbeda.

Tokoh masyarakat berperan aktif untuk ikut menjaga kondisi di Desa Sukamulya untuk tetap kondusif demi kenyamanan dalam berinteraksi dengan sesama warga masyarakat. Tokoh masyarakat yang ada terus berkoordinasi dengan pemerintahan di Desa Sukamulya seperti menjembatani adanya beberapa pertemuan yang melibatkan kepala desa dan warga masyarakat yang ingin didengar aspirasi dan keluhan-keluhannya terkait pembebasan lahan yang dipergunakan untuk pembangunan bandara BIJB Kertajati.

Dalam menjaga kondisi tetap kondusif berbagai upaya dilakukan baik dari pemerintah daerah maupun dari pemerintah pusat. Pada tanggal 27 Nopember 2018 , di Desa Sukamulya telah dilaksanakan musyawarah bentuk ganti rugi Kerugian, dalam pertemuan tersebut ada opini berupa penggantian lahan yang bukan berupa uang namun berupa relokasi lahan kembali yang sediakan oleh pemerintah, namun dalam musyawarah ini belum ditemukan kesepakatan lanjutan terkait hal ini, masih menunggu keputusan dari pemerintah provinsi terkait hal tersebut. Upaya pengantian kerugian selain uang ini merupakan salah satu solusi yang diberikan terkait dengan penggantian kerugian yang dialami warga Desa Sukamulya yang sampai saat ini tercatat masih ada warga desa nya yang tetap menolak untuk dilakukan penggusuran dan penggantian oleh pemerintah. Musyawarah ini dihadiri oleh pihak terkait yang berkepentingan didalamnya. dan juga warga Masyarakat dari Desa Sukamula, serta aparat keamanan yang juga hadir pada pertemuan tersebut. Dalam Musyawarah ini diharapkan menemui kesepakatan yang ada sehingga pembangunan dapat terus dilanjutkan tanpa terhambat oleh beberapa masyarakat yang masih kontra dengan hal ini.

4.2.2.1 Teori Resolusi Konflik Galtung *Peace making, Peace keeping dan Peace building*

Berdasarkan Teori galtung, upaya relusi konflik dilakukan dengan tahapan *Peace keeping, Peace Making dan Peace building* , dalam hal ini konflik pembangunan bandara BIJB Kertajati telah melalui proses-proses dan tahapan tersebut. Dengan adanya menghentikan kekerasan yang dilakukan dalam hal ini penarikan mundur pasukan yang dengan upaya-upaya yang dilakukan, kemudian tahapan selanjutnya dengan menciptakan perdamaian, dengan melakukan upaya cipta kondisi yang melibatkan intel kodim dan intel daerah ke Desa Sukamulya tersebut dengan melakukan pendekatan secara persuasive yang dilakukan dan terus dilaporkan perkembangannya dengan berkoordinasi kepada TNI,

kepolisian dan pemerintah terkait, mendengarkan keluhan dan keinginan warga masyarakat agar kondisi yang diharapkan dapat tercipta dengan baik.

Tahapan selanjutnya dalam teori galtung demi terciptanya pembangunan perdamaian yang berkelanjutan yaitu dengan *Peace building*. *Peace building* adalah tahapan resolusi konflik yang dilakukan setelah *peace making* dan *peace keeping* telah dilaksanakan. berbagai upaya telah dilakukan dalam hal ini, baik oleh pemerintah daerah sendiri maupun oleh PT BIJB, dalam menciptakan perdamaian dari pemerintah daerah melalui Bapelitbangda berupaya memperkuat struktur ekonomi masyarakat yang berdampak pada pembangunan bandara BIJB Kertajati, dengan mengedepankan sektor pariwisata yang sedang dikembangkan dengan melibatkan masyarakat daerah setempat. Hal lain yang sedang diupayakan pemerintah adalah dengan peningkatan dalam sektor perdagangan dan jasa, agar masyarakat asli Majalengka akan kuat menghadapi persaingan global yang semakin kompleks. Dengan kondisi peningkatan ekonomi yang baik maka kemungkinan terjadinya konflik akan semakin berkurang.

Dengan upaya yang dilakukan beberapa pihak demi menjaga kondisi yang mulai kondusif di wilayah pembangunan bandara maka hal ini diharapkan mampu menjaga agar konflik tidak kembali terjadi, Perusahaan memberikan bantuan yang dibutuhkan masyarakat sekitar dalam berbagai macam dan jenis bantuannya. Hal ini diharapkan mampu menjaga keharmonisan hubungan baik dengan warga sekitar bandara BIJB Kertajati .

PT BIJB berupaya menjaga kondisi yang sudah mulai kondusif dengan terus mendengarkan aspirasi dan keinginan warga seputar bandara yang harus didengar pula keluhan kesahnya, berbagai upaya dilakukan oleh PT BIJB dengan memberikan bantuan CSR yang

dibutuhkan oleh masyarakat, Ada beberapa bentuk bantuan yang dilakukan PT BIJB dalam membantu warga masyarakat sekitar bandara yang saat ini masih tetap bertahan antara lain Bantuan untuk perbaikan jalan, Bantuan untuk pengobatan gratis, Bantuan perbaikan masjid atau mushola, dan Bantuan sembako.

Selain itu pula ada kegiatan yang dilakukan oleh PT BIJB dengan melibatkan masyarakat dalam segi peternakan, PT BIJB membangun kondisi ini agar terciptanya hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar. Adapun upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan bantuan yaitu berupa hewan ternak sapi untuk qurban. Hewan ternak sapi untuk Qurban ini diserahkan kepada warga masyarakat perwakilan masing-masing desa untuk dilombakan pada saat hari idul qurban berlangsung. Bagi peternak yang dapat merawat hewannya dengan baik, maka PT BIJB memberikan hadiah kepada pemenang dengan melombakan berat dan kesehatan sapi qurban tersebut. Dalam kondisi ini diharapkan mampu menciptakan perdamaian yang ada dikawasan bandara BIJB Kertajati. selain itu upaya yang sedang dilakukan PT BIJB adalah akan diadakan kegiatan seminar untuk mengetahui kompetensi-kompetensi apa saja yang dibutuhkan, kegiatan ini rencananya akan dilaksanakan sampai dengan bulan Desember tahun 2018.

BIJB memiliki komitmen untuk memberdayakan warga yang terkena dampak bandara, dengan memberikan kesempatan bekerja seluas-luasnya. Tidak hanya pada perusahaan BIJB saja, namun juga memberikan kesempatan pada warga masyarakat yang terkena dampak pembangunan tersebut untuk bekerja bersama dengan mitra-mitra yang melakukan kerjasama dengan perusahaan BIJB antara lain yaitu Freshklindo *Cleaning Sevice*, *GB Parking* (Pengelola Parkir), kebersihan luar bandara, *tenant* dan *main contractor*.

Setiap keluhan selalu menjadi prioritas untuk menjadi perhatian, khususnya hal yang menjadi kewenangan pihak PT BIJB untuk di

selesaikan. Semua keluhan warga selalu diupayakan untuk diberikan solusi. Apabila keluhan tersebut bukan kewenangan dari PT BIJB, maka PT BIJB akan melanjutkan kembali laporan kepada yang memang berwenang dibidangnya masing-masing, selama hal ini untuk kepentingan secara keseluruhan dan menciptakan kondisi damai yang ada sehingga masyarakat dan semua komponen dalam pembangunan bandara BIJB Kertajati dapat berjalan maksimal sesuai koridornya masing-masing tanpa adanya beres dirugikan oleh pihak manapun demi keberlangsungan pembangunan sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam proses resolusi konflik terdapat rekonsiliasi konflik yang mana proses rekonsiliasi konflik menurut Rouhana dan Bar tal yaitu bahwa rekonsiliasi ini merupakan bagian dari upaya resolusi konflik. Rekonsiliasi merupakan upaya penyelesaian konflik dengan cara nir kekerasan. Dialog dan mediasi adalah salah satu cara yang dapat dilakukan dengan membangun hubungan baru dan komunikasi serta tata relasi yang baru. Dalam kasus konflik pembebasan lahan di Kecamatan Kertajati sudah diupayakan. Setelah konflik bentrokan terjadi dalam pengukuran yang dilakukan pihak BPN tertanggal 17 Nopember 2016. Pola rekonsiliasi yang dilakukan yaitu pihak yang bertikai yang terdiri dari aparat keamanan baik kepolisian dan satpol pp serta masyarakat dan pihak BPN yang melakukan pengukuran melakukan rekonsiliasi dengan duduk bersama yang dilakukan di balai Desa Sukamulya dan difasilitasi oleh staf kepresidenan dan konsorsium pembaharuan agraria, dalam pertemuan tersebut terjadi dialog yang dilakukan dengan sama-sama menyatakan keluhan dan keinginannya, setelah pertemuan tersebut para pihak saling berjabat tangan dan resolusi yang dilaksanakan yaitu menghentikan kekerasan yang dilakukan, baik oleh aparat maupun masyarakat yang terlibat didalamnya dan akan melakukan upaya komunikasi lebih lanjut.

Dalam pertemuan tersebut terjadi resolusi yaitu berupa kesepakatan bahwa akan melakukan upaya komunikasi yang lebih intens di antara

masyarakat dan pemerintahan terkait dengan pengukuran lanjutan yang akan dilaksanakan terhadap masyarakat yang sudah bersedia lahannya untuk di bebaskan, sedangkan bagi masyarakat yang belum bersedia maka akan dilakukan upaya lain yang akan dimusyawarahkan lebih lanjut. Di dalam pemerintahan desa itu sendiri pun antara masyarakat yang pro dan kontra telah terjadi rekonsiliasi yang dilakukan secara alami, melalui komunikasi yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari seperti bekerja, kesawah, keperkebunan maupun datang ketempat-tempat hajat dan juga ke acara-acara yang dilakukan oleh desa setempat yang masih memegang kebudayaan dari leluhur yang mengutamakan kebersamaan dalam lingkungan desa.

Dalam uraian pembahasan dalam teori galtung, bahwa yang terjadi dalam pembangunan bandara BIJB Kertajati belum menuju damai yang positif dan tahapannya masih damai negatif artinya kondisi sudah damai namun masih ada kelompok-kelompok masyarakat yang saat ini masih tetap bertahan dengan keputusannya untuk tetap mempertahankan lahan pertanian dan pemukiman miliknya untuk tidak tergusur karena pembangunan bandara BIJB Kertajati, walaupun jumlahnya sudah minoritas namun hal ini tidak dapat dianggap sepele karena dari kelompok kecil ini tidak menutup kemungkinan konflik akan kembali terjadi jika hal ini tidak mendapatkan perhatian yang lebih serius dari pemerintah.

4.2.2.2 Model Eskalasi-deeskalasi Konsep Ramsbotham dalam Resolusi Konflik

Model eskalasi deeskalasi Rambotham menggambarkan bagaimana konflik berpindah dari satu tahap ke tahap lain . Segala sesuatu yang terjadi pada konflik melalui tahapan-tahapan baik kondisi penurunan konflik maupun kondisi yang mengalami peningkatan konflik. Pada masing-masing kasus konflik akan mengalami pasang surut dalam konflik, yang mana hal ini juga terjadi pada pembangunan bandara BIJB Kertajati.

Pembangunan bandara BIJB Kertajati ini mengalami beberapa kali eskalasi konflik, walaupun kemudian sempat turun lagi, namun kembali meninggi sampai kemudian terjadi puncaknya yaitu bentrokan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Potensi konflik dimulai pada tahun 2004 ketika secara sepihak 11 Kepala Desa yang menjabat pada saat itu menandatangani pernyataan persetujuan pembangunan bandara BIJB Kertajati tanpa ada komunikasi dan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat di kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka. Dibawah ini merupakan tahapan eskalasi dan deeskalasi yang mengalami pasang surut yang di mulai tahun 2004 pada tabel berikut ini:

Tabel. 4.2 Eskalasi dan Deeskalasi Konflik

Periode	Eskalasi	Deeskalasi
14 Oktober 2004	11 Kepala Desa di Kecamatan Kertajati menandatangani surat persetujuan dukungan atas bandara tanpa ada sosialisasi dan komunikasi kepada masyarakat, dan dilakukan Analisis AMDAL, yang pada kenyataannya berbeda dengan kondisi dilapangan.	
17 Mei 2005	Terbit Peraturan Menteri Perhubungan No KM 34 Tahun 2005, tentang Penetapan bandara Kertajati, yang memicu kekhawatiran warga masyarakat untuk terdampak penggusuran dan melakukan beberapa demo kepada pemerintah kabupaten	

	Majalengka untuk menolak pembebasan lahan terkait rencana pembangunan bandara di wilayahnya.	
4 Sep, 2006	Dishub Jawa Barat melakukan survey lapangan dilokasi rencana pembangunan bandara BIJB Kertajati, dan belum ada kepastian kapan akan dimulai pembangunan, dan juga hal ini tidak ada sosialisasi dan komunikasi yang dilakukan terlebih dahulu secara detail kepada masyarakat sehingga para oknum spekulan dengan mempermainkan harga tanah di seputar rencana pembangunan bandara dan mulai memanfaatkan ketidaktahuan warga tentang hukum dan nilai tanah yang akan dibebaskan	
8 Juni, 2007	Pemerintah melakukan patok atas tanah tanpa pemberitahuan, dan warga masyarakat kesal sehingga mulai melakukan perusakan patok yang sudah dipasang tersebut dengan menggunakan linggis dan palu. Masyarakat merasa bahwa mereka belum	

	mendapat penjelasan yang detail terkait lahannya yang telah di patok oleh pemerintah.	
Tahun 2008		Bupati menerbitkan surat keputusan Bupati No 533/2008 tentang penetapan lokasi, dan berlaku selama 2 tahun, namun belum ada proses tahapan akan pembebasan lahan, yaitu pengukuran, pemberkasan maupun pembayaran ganti kerugian. Surat keputusan tersebut hanya berlaku untuk 2 tahun saja, sehingga masyarakat meyakini bahwa lokasi tersebut bisa saja berubah seiring dengan ketidakpastian yang ada dari pemerintah tentang rencana pembangunan bandara yang sudah berlangsung selama 4 tahun tersebut.
Tahun 2009	Pemprov Jawa Barat membentuk P2T atau Panitia Pengadaan tanah, dan siap melakukan pembebasan tanah tahap awal seluas 520 Hektare. namun hal ini masih terjadi Penolakan warga yang tetap	

	masih berlanjut, sehingga menimbulkan ketegangan antara masyarakat dengan panitia P2T. Pada tahun 2009 warga masyarakat lebih banyak yang kontra di bandingkan yang pro karena lahan pertanian merupakan mata pencaharian warga kecamatan Kertajati.	
Tahun 2010		Mulai diadakan Pembebasan lahan 520 ha, namun masih kepada desa yang sudah menerima rencana pembangunan bandara. lahan yang bebaskan yaitu untuk desa kertajati dan desa bantarjati, warga ke dua desa mulai menerima kondisi dengan penggantian lahan pertanian serta bangunan dan juga tanaman yang berada di atasnya. masyarakat yang kontra belum menerima, namun dalam hal ini tidak menghalang-halangi kepada desa yang sudah bersedia untuk dibebaskan.
Tahun 2014	Pada tahun 2014 ini mulai ada ketegangan yang kembali meningkat ketika P2T dan pihak	

	BPN melakukan tahapan dalam pembangunan yaitu Pengukuran yang dilakukan di Desa Sukakerta dan Desa Sukamulya, Namun warga desa Sukamulya menolak dan terjadi bentrokan kecil dengan aparat. kemudian dari P2T dan BPN mengambil keputusan untuk membatalkan pengukuran dikarenakan penolakan yang keras dari masyarakat desa Sukamulya.	
Tahun 2015, Awal Januari		Pada awal Januari, bagi warga yang pro lahannya untuk dibebaskan dan telah melakukan sampai dengan tahapan pemberkasan, maka dilakukan proses akhir yaitu Pembayaran untuk beberapa bidang lahan di Desa Sukamulya.
Tahun 2015,3 Feb.		Tanda tangan MOU antara komisi I DPRD dengan pemerintah Desa Sukamulya bahwa jika pemerintah membutuhkan lahan maka hak rakyat harus terpenuhi. Masyarakat yang kontra mendapat sedikit pencerahan

		mengenai aspirasi yang disampaikan ke komisi I DPRD agar dalam melaksanakan pembebasan segala hak warga masyarakat harus di penuhi dengan baik.
2015, 24 Des.	P2T melakukan pengukuran lahan di Desa Sukamulya, yaitu lahan milik warga yang sudah bersedia untuk di bebaskan, pengukuran ini batal dilaksanakan karena ada peningkatan ketegangan di masyarakat yang mencoba melakukan penghadangan dan penolakan dari masyarakat yang kontra dikarenakan pengukuran yang dilakukan tidak ada pemberitahuan resmi kepada masyarakat Desa Sukamulya secara keseluruhan.	
2016, 1 Januari		Dikarenakan sampai minggu terakhir bulan desember masih adanya penolakan yang dilakukan warga masyarakat yang kontra pada saat pengukuran, maka P2T memutuskan untuk menghentikan sementara dalam melakukan pengukuran

		lahan tersebut, namun tetap melakukan tahapan pembayaran terhadap lahan yang sudah setuju untuk dibebaskan milik masyarakat yang pro.
2016, 5 Januari	300 Massa yang berasal dari Desa Sukamulya melakukan unjuk rasa ke kantor BPN, dalam unjuk rasa tersebut disampaikan bahwa tetap Menolak pengukuran sepihak yang dilakukan tanpa adanya kejelasan mengenai harga lahan milik masyarakat yang ditawarkan oleh pemerintah dan meminta agar pemerintah melakukan pembebasan sesuai prosedur yang ada dan sistematis, sehingga masyarakat mendapat pemahaman terkait dengan harga yang ditawarkan oleh pemerintah	
9 Feb, 2016		Warga desa Sukamulya didampingi Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) untuk melakukan audiensi ke pihak BPN dan dalam audiensi tersebut disepakati bahwa

		dalam pembebasan lahan yang digunakan untuk kepentingan umum akan dilakukan sesuai prosedur dan undang-undang yang berlaku.
9 Agst 2016	Warga desa sukamulya melakukan aksi <i>long march</i> dengan jumlah kurang lebih 2000 orang, dalam aksi tersebut masyarakat menolak dan akan melakukan penghadangan terhadap proses pengukuran lahan mereka jika dilakukan tanpa prosedur yang benar.	
24 Agust, 2016	Terjadinya aksi dorong-dorongan dan adu mulut di desa Sukamulya yang terjadi antara oknum masyarakat pro yang melakukan pembangunan rumah hantu di lahan pertanian, dengan warga yang tetap menolak realisasi pembangunan bandara. Dalam aksi dorong-dorongan ini tidak ada korban luka, namun eskalasi konflik meningkat antara masyarakat yang pro dengan masyarakat yang kontra.	
24 Agust,		Pihak Polsek dan pihak Polres Kabupaten Majalengka

2016		mengamankan ke lokasi kejadian dan melakukan upaya mediasi antara masyarakat yang pro dan masyarakat yang kontra tersebut agar tercipta kondisi kondusif, kemudian dari pihak kepolisian berhasil membubarkan pekerja bangunan dan menghentikan pembangunan rumah hantu tersebut.
30 Agust, 2016	Tim Ukur dari P2T kembali mencoba melakukan pengukuran dan datang dengan dikawal oleh 30 orang aparat dan pegulat boxer, masyarakat langsung menghadang tim pengukuran tersebut dan menghalau tim ukur untuk tidak melakukan pengukuran, dengan mkondisi tersebut maka pengukuran urung dilakukan. karena kondisi masyarakat yang mulai tidak terkendali.	
17 Nop, 2016	Setelah beberapa kali hendak melakukan pengukuran namun selalu di halang-halangi massa, maka pada tanggal 17 Nopember 2016 dilakukan pengukuran oleh BPN yang	

	akhirnya melibatkan lebih dari 2000 aparat keamanan mulai dari kepolisian dan satpol PP, untuk mengukur lahan warga yang sudah pro untuk perpanjangan runway, namun kemudian kembali dihadang oleh warga masyarakat yang kontra dengan jumlah yang banyak, tapi belakangan diketahui ada penyusup dari luar daerah yaitu dayak indramayu, yang ikut kedalam kumpulan massa guna membantu masyarakat kontra dalam menghadang jalannya pengukuran, Oknum dari dayak indramayu ini berusaha memprovokasi massa agar terus melawan aparat keamanan, beberapa warga masyarakat dan dayak indramayu diamankan aparat kemudian dimintai keterangan mengenai hal tersebut. Polres dan polsek indramayu memberikan keterangan bahwa Kabupaten Majalengka tidak akan bertanggung jawab terhadap warga Indramayu tersebut jika ada hal-hal yang	
--	---	--

	tidak diinginkan, warga dayak indramayu di pulangkan ke daerahnya untuk menghindari keterlibatan kembali dengan masyarakat Majalengka yang dalam kondisi mudah terprovokasi oleh pihak manapun.	
19 Nop, 2016		Pasca kejadian bentrok dilakukan upaya meredam konflik dengan cara Mediasi yang dilakukan oleh staf kepresidenan. dalam pertemuan tersebut akhirnya menghasilkan kesepakatan yaitu dengan ditariknya aparat keamanan yang berjaga-jaga di lokasi kejadian yaitu di Desa Sukamulya.
1 Des 2016		Kedatangan komisi 4 DPR RI untuk mendengarkan aspirasi dan keluhan masyarakat Desa Sukamulya, dalam pertemuan tersebut masyarakat dihimbau untuk tetap mendukung pembangunan demi mensukseskan pembangunan untuk kepentingan umum.
Tahun 2017		Kodim di wilayah setempat melakukan pengamanan serta

		pendekatan secara persuasive melalui intel yang ditugasi berbaur kepada masyarakat untuk selalu berupaya cipta kondisi dan mendengarkan keluhan masyarakat dan dilanjutkan kepada yang berkepentingan. dalam hal ini pun dilakukan konsinyasi, sebagai keputusan yang dibuat dan kemudian sebagian masyarakat mulai menerima kondisi pembebasan lahan mereka, guna dimanfaatkan untuk pembangunan bandara BIJB Kertajati.
8 Juni 2018		Peresmian bandara dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, dari data yang diperoleh ada sekitar 50 Kepala Keluarga di Desa Sukamulya yang masih menolak pembebasan, sedangkan warga yang sudah pro sedang menunggu pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah secara bertahap, agar segera bisa relokasi secara mandiri di wilayah sekitarnya.

Sumber : Lembaga Bantuan Hukum Bandung

Dalam resolusi konflik yang ideal terdapat Transformasi konflik, Transformasi secara tidak langsung dapat memberikan kesadaran pada pihak-pihak yang berkonflik, setidaknya upaya bahwa hal tersebut penting untuk dilakukan karena apapun yang terjadi manusia atau masyarakat dapat berubah kearah perbaikan. Dalam transformasi konflik faktor-faktor yang sebelumnya konfliktual, diupayakan untuk dapat ditransformasikan dalam proses membangun budaya damai dan peningkatan kapasitas kelembagaan baik formal maupun informal. Dalam resolusi konflik yang ideal bahwa konflik tidak akan kembali terjadi dikarenakan ada upaya resolusi yang dilakukan dan telah tercapai atau tercabutnya akar konflik, sehingga yang akan menuju perdamaian yang positif.

Dalam kasus pembebasan lahan pertanian di bandara Kertajati ini, masih bersifat damai negatif dikarenakan masih ada kelompok-kelompok yang menolak pembebasan lahan pertanian dan pemukiman, sehingga hal ini akan berdampak kepada kemungkinan konflik akan muncul kembali jika ada pemicunya.

Dalam buku yang berjudul penanganan konflik pendekatan kearifan lokal karya Bambang Wahyudi disebutkan bahwa resolusi konflik dalam kelompok atau antar kelompok, diperlukan transformasi konflik tanpa kekerasan dengan menganalisa lima aspek yaitu: (1) transformasi konteks, (2) transformasi struktural, (3) transformasi aktor, (4) transformasi persoalan dan (5) transformasi kelompok dan personil (Miall,2002:250-252). Transformasi konteks perlu dicermati bagaimana mengidentifikasi kelompok-kelompok atau pihak-pihak yang terlibat kedalam konflik serta memahami kepentingan dan posisi masing-masing dengan kata lain perlu pemahaman konflik dari kedua perspektif pihak yang berselisih. transformasi konteks ini memerlukan perundingan atau dialog dan diperlukan intervensi pihak ketiga.

Dalam konflik pembebasan lahan pertanian di Kecamatan kertajati ini telah ada pihak ketiga yang ikut intervensi didalamnya yaitu dari staf kepresidenan yang namun hingga saat ini belum terealisasi apa yang

menjadi keinginan sebagian dari masyarakat yang kontra, dari data yang diperoleh bahwa staf kepresidenan hanya sebatas menampung dan mendengarkan aspirasi masyarakat terutama yang kontra dengan pembebasan lahan, namun belum ada tindakan lanjut yang jelas terkait dengan hal. Pada hal upaya pihak ketiga untuk menjembatani kasus ini sangat diharapkan terutama oleh masyarakat yang kontra, Pihak ketiga menjembatani antara pihak yang berkonflik yaitu pemerintah dan masyarakat pemilik lahan agar mendapat keputusan dan jalan tengah yang baik bagi kedua belah pihak, namun hal ini belum terlaksana dengan baik.

Selanjutnya adalah transformasi struktural, konflik struktural menyangkut ketidakadilan dan tujuan-tujuan yang tidak sejalan. ketidakadilan mulai dirasakan oleh masyarakat ketika secara sepihak kepala desa menandatangani persetujuan pembebasan lahan pada tahun 2004 pada hal kenyataannya tidak demikian. Kemudian dari data yang didapatkan banyak lahan warga masyarakat yang pro dan telah di ukur namun luas yang di ukur tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang ada, dan masih banyaknya kesalahan dalam penghitungan sehingga masyarakat merasa hal ini menjadi bentuk ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai penyelenggara pengadaan tanah untuk pembangunan bandara BIJB Kertajati. Seiring dengan berjalannya waktu berbagai kesalahan dalam penghitungan luas lahan dan bangunan telah diselesaikan dengan pengajuan keberatan yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga dapat diukur ulang dan diselesaikan sesuai dengan kondisi luas lahan yang ada, Hal ini akan berdampak bahwa upaya untuk pengajuan keberatan oleh masyarakat di perhatikan oleh pemerintah dan menemukan penyelesaian dengan baik sehingga hal ini mengurangi kemungkinan resiko konflik kembali terjadi.

Transformasi aktor, pihak-pihak yang berkonflik harus menentukan kembali arah dan tujuan yang ingin dicapai, perubahan aktor yang berkonflik juga merupakan salah satu bentuk untuk menyelesaikan

konflik. konflik akan menjadi semakin mudah diselesaikan, manakala terjadi perubahan dalam kepemimpinan para pihak, dalam pembebasan lahan untuk pembangunan bandara BIJB Kertajati. Sejak terjadi bentrokan pada saat pengukuran aktor konflik yang ada yaitu masyarakat yang tadinya kontra berubah menjadi pro seiring berjalannya waktu yaitu dengan adanya pendekatan yang dilakukan dengan para pihak yang terkait, Namun kondisi ini bukan berarti pihak yang mengupayakan pendekatan ini mencoba mempengaruhi. Kesediaan masyarakat yang tadinya kontra kemudian menjadi pro ada merupakan kesadaran sendiri dimana diyakini bahwa hal ini merupakan program pemerintah demi kepentingan umum dalam bidang pembangunan infrastruktur yang akan mengembangkan perekonomian bagi wilayahnya.

Transformasi persoalan, konflik dapat berubah seiring dengan kemunculan isu-isu atau persoalan konfliktual yang baru, dalam hal kasus pembebasan lahan ini persoalan yang ada masih seputar persoalan ketidaksetujuan terkait harga tanah yang diberikan oleh pemerintah juga tentang persoalan lahan pertanian yang subur yang seharusnya tidak digunakan untuk pembangunan apapun, dikarenakan lahan pertanian ini merupakan mata pencaharian warga masyarakat yang memang bekerja sebagai petani, karena kondisi ini tidak mudah untuk beralih profesi ke bidang lain, yang mengakibatkan persoalan inilah yang ada dan tetap menjadi salah satu dari tuntutan masyarakat yang kontra, sehingga bingkai persoalan ini masih tetap ada di desa Sukamulya Kecamatan Kertajati dan sulit untuk dijadikan perubahan sebagai pembuka penyelesaian dalam konflik lahan ini.

Transformasi konflik selanjutnya yaitu transformasi kelompok atau personal, dengan kondisi di Desa Sukamulya yang saat ini sudah tidak ada lagi intimidasi yang dilakukan kelompok masyarakat yang kontra kepada masyarakat yang pro, karena sudah sama-sama memahami keputusan masing-masing bahwa lahan akan dibebaskan atau tidak merupakan keputusan pribadi terhadap hak milik lahannya masing-

masing, sehingga masyarakat bebas memilih untuk bersedia atau tidak lahannya dibebaskan untuk pembangunan bandara, dan tidak lagi ada unsur intimidasi dalam pengambilan keputusan yang dilakukan masing-masing pihak.

Transformasi lain yang dapat di lihat yaitu transformasi personal, masing-masing personal telah memahami bahwa kondisi pembebasan lahan ini adalah untuk kepentingan umum yang akan berdampak kepada tingkat perekonomian dan pembangunan yang pesat di lingkungan tempat tinggalnya, yang akan berdampak pula kepada lebih mudahnya akses dalam berbagai transportasi yang ada seiring dengan perbaikan sarana dan prasana jalan. Transformasi personal yang dapat dilihat tampak adalah kepada kepala desa Sukamulya yang awalnya berada pada posisi kontra terhadap pembebasan lahan ini dikarenakan adanya semacam kontrak politik sebelum menjadi kepala desa bahwa akan mempertahankan desa Sukamulya agar tidak terdampak pembangunan bandara jika terpilih menjadi kepala desa, Namun karena kondisi yang ada pada saat ini dan diyakini bahwa ini merupakan program pemerintah maka kepala desa sudah pro dengan pembangunan bandara ini dan sebagai kepala desa harus ikut mendukung segala upaya pembangunan demi kepentingan umum. Walaupun demikian kepala desa tetap memfasilitasi masyarakat yang masih kontra untuk tetap menghargai pilihannya masing-masing dalam upaya untuk tetap mempertahankan lahan pertanian dan pemukiman yang dimiliki oleh masyarakat.

Transformasi konflik yang dilakukan dalam upaya resolusi konflik yang terjadi di desa Sukamulya kecamatan kertajati memang belum semuanya berjalan dengan maksimal. Di Desa Sukamulya saat ini masih ada kelompok warga masyarakat yang tetap mempertahankan lahan pertanian dan pemukimannya, kendati telah dinyatakan bahwa lahan pertanian dan lahan pemukimannya adalah jalur yang akan digunakan dalam aktifitas bandara baik untuk jalur penerbangannya maupun untuk pusat kegiatan bisnis sebagai pendukung dari adanya aktifitas bandara

BIJB kertajati. Dalam hal ini resolusi konflik yang ideal belum dapat dilaksanakan. Kondisi damai yang ada saat ini masih merupakan damai negatif artinya memang kondisi saat ini sudah damai dan kondusif namun secara keseluruhan akar konflik belum terselesaikan secara tuntas dikarenakan masih adanya kelompok-kelompok yang sampai saat ini menolak lahannya untuk digunakan pembangunan bandara, walaupun kelompok ini sudah minoritas namun tidak menutup kemungkinan konflik akan kembali terjadi jika pemerintah tidak memperhatikan kebutuhan dan keinginan warga desa tersebut.

Upaya Penyelesaian konflik merupakan salah satu yang diupayakan ketika konflik terjadi, sehingga situasi yang diharapkan adalah konflik akan bertransformasi menjadi damai, Dalam konflik pembebasan lahan ini diharapkan akan menjadi damai yang positif, menurut Galtung damai positif adalah terciptanya kondisi yang harmonis bagi kehidupan dalam bermasyarakat, terciptanya keadilan, kesetaraan dan sudah tidak ada lagi perselisihan diantara yang berkonflik. Namun pada kenyataannya damai yang saat ini tercipta di Desa Sukamulya adalah damai yang negatif artinya yaitu kondisi dimana sudah tidak adanya bentrokan, tidak adanya perang dan sudah tidak ada lagi kekerasan, namun pada kenyataannya masih ada kekerasan yang tidak nampak seperti ketidakpuasan, ketidakadilan, ketidaksetaraan dan juga masih adanya kelompok-kelompok yang tidak sepakat dengan pemerintah dan masih adanya persoalan yang belum tertuntaskan dengan baik.

4.2.3.2 Pendekatan *Local Wisdom* sebagai Metode Penyelesaian Konflik

Kearifan lokal merupakan norma yang terjadi dimasyarakat, bentuk kearifan lokal berbeda-beda dalam setiap daerah, kearifan lokal di pegang kuat oleh komunitas atau kelompok tertentu yang berupaya untuk melestarikan adat istiadat dan budaya yang ada dan terjadi di daerah

tersebut. Kearifan lokal dapat ditunjukkan dengan aktivitas kultural yang menekankan aspek kebersamaan dan filosofi-filosofi yang mendalam.

Masyarakat desa Sukamulya masih memegang prinsip adat istiadat tersebut, dengan berbagai kegiatan tahunan yang tetap dijalankan dan lebih diaktifkan kembali, hal ini digunakan pula dalam meredam konflik yang terjadi, tujuan dari penyelenggaraan ini masyarakat menjadi lebih dapat berkomunikasi dalam kondisi tersebut. adanya interaksi yang baik menjadikan kebersamaan terjalin dengan suasana yang saling percaya dan keterbukaan serta mengurangi kesalah pahaman yang terjadi.

Masyarakat berbaur menjadi satu, pada saat itulah kondisi mulai mencair dan warga masyarakat yang pro dan kontra dapat kembali bersama dalam satu acara yang diselenggarakan pemerintah desa dalam mempererat kebersamaan dan menghindari konflik yang terjadi. Local wisdom yang ada di daerah bermacam-macam bentuknya, yaitu suraan, sedekah bumi, munjungan, mapag sri serta kegiatan keagamaan lainnya seperti nuzulul qur'an, isra mi'raj dan maulid nabi, hal ini bertujuan untuk membangun perdamaian yang berkelanjutan. Kebudayaan dapat dijadikan upaya pendekatan dalam proses menuju perdamaian, dan perdamaian merupakan hal yang utama yang harus di dahulukan. Pendekatan *Local wisdom* menjadi salah satu sarana menuju pembangunan perdamaian yang menjadi suatu tujuan dari akhir dari suatu konflik, untuk mencapai suatu damai yang positif dan berkesinambungan.

Wasino, 2006 mengungkapkan bahwa makna dari suatu kearifan lokal dalam bentuk tertentu seperti tradisi, membutuhkan pemahaman mendalam. dan setiap tradisi memiliki nilai positif sebagai bentuk hubungan yang berkesinambungan antara generasi terdahulu dengan generasi berikutnya. dan secara substansial, kearifan lokal didefinisikan

menjadi nilai-nilai utama yang diyakini kebenarannya dan menjadi acuan dalam bertingkah laku sehari-hari masyarakat setempat.⁹³

Kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun ini bermacam-macam bentuk dan maksudnya serta memiliki tata nilai atau perilaku kehidupan masyarakat di Desa Sukamulya, yang akan memiliki dampak positif dan memiliki nilai berkesinambungan bagi berbagai generasi ke generasi yang ada di masyarakat tersebut. Dengan adanya kearifan lokal yang masih terus dianut oleh masyarakat daerah tersebut maka hal itu merupakan peranan yang sangat penting dalam suatu masyarakat yang memiliki arti perdamaian yang memberikan dampak terhadap resolusi konflik dengan nilai-nilai kebudayaan yang ada.

Melalui pembahasan resolusi konflik tersebut diatas maka berbagai upaya yang dilakukan yaitu melalui mediasi yang dilakukan pihak ketiga terhadap pelaku konflik berdampak sangat baik bagi sehingga masing-masing pihak memahami dan mengetahui keinginan serta kebutuhan yang diperlukan, kemudian adanya pihak-pihak yang berupaya meredam konflik agar tidak mudah kembali kepermukaan tentunya di dukung dengan *stake holder* yang ada, terutama yang berhadapan langsung dengan masyarakat seperti tokoh agama yang terus berusaha mengarahkan ke hal-hal yang positif, kemudian dari pemerintahan desa yang sampai saat ini terus membina masyarakatnya, dengan tidak memaksakan kehendak kepada masyarakat yang sampai saat ini masih bersikap kontra terhadap pembangunan walaupun jumlahnya sudah minoritas namun tetap mendapat perhatian dari pemerintah desa setempat.

Upaya yang dilakukan perusahaan dalam memberikan solusi yang baik dengan berbagai bantuan-bantuan yang diberikan sangat membantu dalam memberikan solusi untuk membangun perdamaian dengan kondisi yang ada saat ini. Pembangunan perdamaian harus di dukung oleh

⁹³ Bambang Wahyudi, *Penangan konflik pendekatan kearifan lokal*, Yogyakarta, September 2018 hlm 38

segenap pihak yang terkait terlebih dengan pemerintah daerah yang harus selalu berada pada posisi tidak merugikan masyarakat namun juga tetap mendukung segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Kemudian upaya yang dilakukan berkaitan dengan *local wisdom* yang ada sangat membantu dalam upaya resolusi konflik yang terjadi, karena dengan adanya *local wisdom* akan memberikan ruang kepada masyarakat untuk saling berinteraksi dan selalu menjaga kebersamaan dan keselarasan dalam bermasyarakat, sehingga tercipta kondisi damai yang diharapkan seluruh masyarakat.

BAB 5

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai resolusi konflik pembebasan lahan pertanian untuk pembangunan bandara BIJB di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka, maka peneliti menarik kesimpulan dari hasil penelitian ini sebagai berikut :

Pertama, dari hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa konflik pada lahan pertanian yang terdampak pembangunan bandara BIJB Kertajati meliputi beberapa faktor. Faktor awal konflik yaitu kurangnya sosialisasi dan komunikasi yang dilakukan pemerintah terhadap warga masyarakat yang bermula adanya kesepakatan pemerintah provinsi dengan 11 kepala desa, Namun pada kenyataannya kesepakatan itu dibuat tanpa ada pemberitahuan kepada masyarakat secara detail terkait dengan pembangunan bandara serta tahapan-tahapan dan proses apa saja yang harus dilalui. Kemudian adanya intimidasi yang dilakukan terhadap masyarakat yang pro. adanya ketidaksesuaian akan harga lahan yang diinginkan oleh warga belum dapat direalisasikan oleh pemerintah hal ini dikarenakan untuk penentuan harga ada tim apraisal yang menilai berdasarkan nilai NJOP yang ada di wilayah tersebut dengan penghitungan lahan berikut tanaman dan bangunan diatasnya.

Pemicu bentrokan itu terjadi adalah dengan adanya pengukuran yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional dengan menyertakan ribuan aparat untuk mengukur lahan warga yang sudah pro namun masyarakat yang kontra berusaha menghalang-halangi jalannya pengukuran yang dilakukan, Sehingga terjadi bentrok antara aparat keamanan, masyarakat

yang pro dan masyarakat yang kontra. berakhir dengan ditembakkannya gas air mata untuk menghalau massa yang mulai anarkis.

Faktor pendorong mengapa konflik tersebut terjadi yaitu dikarenakan adanya isu rumah hantu yang tidak lagi dibayarkan oleh pemerintah. Adanya keterlambatan pembayaran yang dilakukan membuat faktor pendorong konflik semakin kuat, hal ini dikarenakan timbulnya kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah yang menyebabkan konflik menjadi semakin kompleks. Kemudian juga adanya penyusup dari luar daerah yang mendorong bentrokan terjadi yang mengakibatkan warga masyarakat menjadi terprovokasi dengan kondisi tersebut.

Dari analisis yang dilakukan terkait dengan konflik pembebasan lahan untuk pembangunan bandara BIJB Kertajati majalengka ini ada beberapa saran dari peneliti terkait dengan hal ini yaitu: (1) Pemerintah hendaknya melakukan komunikasi dan sosialisasi yang intensif terkait dengan lahan milik warga yang digunakan untuk pembangunan bandara, agar segala sesuatu yang berkenaan dengan pembebasan dan teknis pembayaran diketahui warga pemilik lahan, (2) Bagi masyarakat yang sudah menyetujui dengan pembebasan ini agar diperhatikan hak-hak dan keinginannya yaitu untuk segera di urus kewajiban pemerintah yaitu membayar seluruh ganti rugi terhadap lahan warga, agar warga dapat kembali membeli lahan jika sudah ada penggantian dari pemerintah. (3) Adanya kejelasan dari pemerintah terkait dengan rumah hantu yang dibangun akan diganti atau tidak, agar warga masyarakat tidak mengharapkan penggantian dari rumah hantu tersebut.

Kedua, yaitu tentang resolusi konflik yang dilakukan pasca terjadi bentrokan pada tanggal 17 Nopember 2016, bahwa setelah konflik terjadi, ada upaya mediasi yang dilakukan pihak ketiga yaitu dari Staf khusus kepresidenan yang memang memiliki kedekatan dengan beberapa LSM yang menjembatani pertemuan tersebut, hasil dari pertemuan tersebut

disepakati bahwa aparat keamanan yang disiagakan di lokasi kejadian agar ditarik mundur dengan syarat bahwa konflik atau bentrokan tidak kembali terjadi dengan mendengarkan keluhan dari masing-masing perwakilan masyarakat baik yang kontra maupun yang pro, hal ini dilakukan dan terus berkoordinasi dengan aparat keamanan yang ditugaskan dilokasi kejadian.

Dari pihak keamanan kodim menugaskan anggotanya yang tidak berseragam untuk melakukan pendekatan secara persuasive kepada warga masyarakat, dan melakukan upaya komunikasi yang baik, sehingga diketahui apa yang menjadi keinginan dari masyarakat, dan berupaya menghentikan intimidasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga cipta kondisi terus dilakukan di Desa Sukamulya dengan terus mendengarkan aspirasi dan keinginan masyarakat dalam pembangunan bandara BIJB Kertajati.

Berbagai pihak terus berupaya menjembatani agar suasana yang saat ini cenderung kondusif agar terus terjaga, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan pendekatan kearifan lokal atau *local wisdom* yang ada di daerah tersebut. karena hal ini akan mempertemukan masyarakat yang pro dan kontra dalam suatu acara yang sakral dan diyakini hal ini menjadi bentuk komunikasi untuk menghindari kesalahpahaman yang terjadi diantara warga masyarakat. Untuk masyarakat yang masih kontra tercatat berdasarkan informasi baik dari kecamatan maupun dari desa saat ini adalah sekitar 50 kepala keluarga yang masih bersikukuh dengan 9 tuntutan yang diinginkan dan telah diajukan kepada pemerintah. Walaupun jumlah yang kontra saat ini sudah menjadi minoritas namun, Dalam hal ini tetap dilakukan upaya baik dari pemerintah daerah maupun desa yang terus menerus melakukan upaya jalan yang terbaik dengan kondisi ini.

Dari PT BIJB melakukan upaya-upaya berupa bantuan CSR untuk kepentingan masyarakat sekitar yang terdampak pembangunan bandara BIJB Kertajati, hal ini dilakukan dalam upaya cipta kondisi damai agar warga masyarakat kepentingannya diperhatikan sehingga dalam situasi dan kondisi yang ada tercipta suasana damai dan nyaman dalam kebersamaan. Kondisi yang ada di Desa Sukamulya sudah cenderung kondusif, namun damai yang dicapai belum pada tahapan terciptanya damai positif dan masih bersifat damai negatif karena masih adanya beberapa kelompok-kelompok masyarakat yang tidak bersedia lahannya terdampak pembebasan akibat pembangunan bandara BIJB Kertajati dan masih mempertahankan lahannya miliknya dengan mengajukan beberapa keinginan atau tuntutan yang telah disampaikan kepada pemerintahan desa setempat.

Berdasarkan analisis resolusi konflik, maka peneliti memberikan saran terkait dengan resolusi yang dilakukan yaitu : (1) sebaiknya ada tindak lanjut dari staf kepresidenan terkait dengan mediasi yang dilakukan sehingga warga masyarakat yang saat ini kontra masih bisa mendapat informasi terkait dengan yang telah dbicarakan pada saat mediasi berlangsung, (2) Upaya resolusi yang dilakukan belum maksimal dikarenakan masih ada kelompok-kelompok masyarakat yang saat ini masih kontra, hendaknya pemerintah tetap memperhatikan warga kontra walaupun saat ini jumlahnya masih minoritas

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut, maka peneliti memberikan beberapa rekomendasi guna menjadikan salah satu bahan evaluasi untuk kedepannya, agar kondisi yang kondusif tetap terjaga, adapun rekomendasi terbagi menjadi dua yaitu rekomendasi teoritis dan rekomendasi praktis, yaitu :

5.2.1 Rekomendasi Teoritis

Dikarenakan keterbatasan waktu dan biaya maka penelitian yang dilakukan hanya dibatasi pada analisis konflik dan resolusi yang dilaksanakan pasca konflik tersebut terjadi. Peneliti belum melakukan penelitian dampak setelah kondisi ini. Peneliti melihat ada beberapa hal yang akan memicu kembali konflik jika hal tersebut belum dapat diselesaikan oleh pemerintah. Maka jika diperlukan penelitian lanjutan maka hal yang dapat disarankan oleh peneliti yaitu:

1. Terkait dengan beberapa warga masyarakat yang pada saat ini masih berada pada posisi kontra dan masih mempertahankan lahan pertanian dan pemukiman miliknya.
2. Terkait dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang terdampak pembangunan bandara BIJB Kertajati.

Rekomendasi teoritis yang disarankan tersebut akan sangat berpengaruh kepada timbulnya konflik kembali jika masyarakat masih ada yang pada posisi kontra dan belum ada solusi terkait hal ini serta jika tingkat kesejahteraan masyarakat lokal semakin menurun maka hal ini pun akan menimbulkan konflik kembali. Saat ini masih ada kelompok masyarakat yang masih mempertahankan lahan pertanian dan pemukiman miliknya dan tidak bersedia lahannya bebaskan untuk pembangunan bandara BIJB Kertajati.

5.2.2 Rekomendasi Praktis

Pertama, Pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten sebagai pemangku kepentingan agar mengupayakan resolusi konflik yang dilakukan memenuhi tahapan resolusi konflik yang ideal, agar tercipta suasana yang kondusif menuju damai yang positif. Pemerintah juga harus tetap memperhatikan minoritas warga yang saat ini masih ada yang kontra dan masih tetap mempertahankan lahan pertanian dan pemukiman

miliknya agar tidak terdampak pembangunan bandara BIJB Kertajati serta tetap diperhatikan keinginannya dan tetap mendapat perlindungan di tengah-tengah pembangunan Bandara BIJB Kertajati yang terus dilanjutkan dan dikembangkan.

Kedua, kepada perusahaan PT BIJB yang saat ini telah memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat, maka untuk selanjutnya dapat memberikan kemudahan-kemudahan dalam perihal lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal, agar dapat meningkatkan kesejahteraannya dan dapat menikmati serta mendapatkan manfaat atas pembangunan bandara BIJB Kertajati diwilayahnya.

Keempat, untuk pemerintah agar konsep tentang penguatan struktur ekonomi dan pendidikan untuk menghindari diparitas pendapatan bagi warga maskarakat lokal agar tetap dilaksanakan dan dijadikan rencana pembangunan daerah yang berkesinambungan agar masyarakat lokal tidak tersingkirkan dari daerahnya yang dikerenakan banyak pendatang yang akan memadati wilayah Majalengka karena adanya pusat bisnis *aeorcity* dan adanya pertumbuhan pembangunan yang sangat baik.

Kelima, faktor kerahasiaan dalam penentuan tempat pembangunan diberbagai daerah harus dijaga oleh pemerintah agar jarak antara isu pembangunan dengan pelaksanaan pembangunan tersebut tidak terlalu jauh. Dikarenakan hal ini untuk menghindari permainan para spekulan tanah dalam menawarkan serta menaikkan harga tanah di wilayah yang akan direncanakan pembangunan oleh pemerintah karena hal ini akan menimbulkan konflik dalam pembebasan lahan yang di rasa tidak sesuai dengan harga yang semakin tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Anwar, Syaiful, 2016 *Melindungi Negara* Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Alwi,. Syafaruddin M.S. 2013, Drs *Resolusi Konflik dan Negosiasi Bisnis*, BPFE- Yogyakarta. September

Buzan,Barry, 1998, *security:A New Framework For Analysis*, Boudner colo:Lynne Reinner Ole Waver,&jaap de wilde

Emzir,M.Pd Prof.Dr. 2010 *Metodologi penelitian kualitatif Analisis data*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Fisher, Simon et al , 2005, *working with conflict-skill&strategies for action*, London:zed bookL.td

Folger, J.P., dan Poole,M.S (1984). *Working Through Conflict*. USA:Scoot,Foresman Company

Galtung ,Johan. 1996 *Peace by Peaceful Means peace and conflict development and civilization*, International Peace research Institute, Sage Publication, Olso

Galtung, Johan 2000, *Conflict Transformation by Peace full Means (The Transcend Method)*, United NationsDisadter Management Training Programme., Geneva

Iskandar syah Mudzakir,S.H,.MH *Pembebasan tanah untuk kepentingan umum*, Permata aksara, Jakarta 2015

Liliweri,Alo Prasangka dan konflikKomunikasi Lintas budaya masyarakat multicultural, Yogyakarta PT LKiS Printing Cemerlang

Malik, Ichsan 2017, *Resolusi konflik Jembatan perdamaian*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta .

Miall, Hugh Oliver Ramsbotham Tom woodhouse, 2002, *Resolusi Konflik Kontemporer*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

- Miles, Matthew B, et al , 2014, *Qualitative Data Analysis A methods sourcebook*, Sage Publication,
- Mulyo, Sulistijo Sidarto, et al, *Proyek Infrastruktur dan sengketa Konstruksi*, Depok: Prenadamedia Group, Februari 2018
- Musleh, Herry, 2012 *Kearifan Lokal dalam menyelesaikan konflik Agraria*, UIN-Maliki Press,
- Rizal Panggabean Samsu, *Konflik dan Perdamaian Etnis di Indonesia*, Jakarta September 2018
- Sidarto, Sulistijo et al, *Proyek Infrastuktur dan Sengketa Konstruksi*, Depok Februari 2018
- Syah, Mudakir Iskandar SH.,M.H *Pembebasan tanah untuk pembangunan kepentingan umum*, Permata Aksara, Jakarta 2015.
- Wahyudi Bambang, *Penanganan Konflik Pendekatan Kearifan Lokal*, Yogyakarta, September 2018
- Windhu,Putra *Perekonomian Indonesia penerapan beberapa Teori Ekonomi pembangunan di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok 2018
- Wirawan, 2009 *Konflik dan Manajemen Konflik*, Jakarta:Salemba Hunamika
- Yudistira.Garna,K. (2006) *Teori Sosial Pembangunan*, Bandung.: Primaco Akademika Judistira Garna Foundation
- Yogiawan Arif, *Bantuan Hukum ditengah Kegagalan Negara*, Direktur LBH Bandung. E-Book
- Universitas Pertahanan, *Buku Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi*, Unversitas Pertahanan Press, Bogor 2017

JURNAL/TESIS

- Budiono Nugroho, *Prediksi nilai tanah berdasarkan nilai indikasi rata-rata tanah pada zona nilai tanah dengan menggunakan metode linier dan non linier pada kecamatan Rungkut*, Tesis, Program studi Teknik Sipil Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jawa Timur 2012

- Dina Kartika, *Hubungan pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Bandara (Kajian atas pembangunan Bandara Kertajati di Jawa Barat)*, Tesis, Institut Teknologi Bandung , 2015 (TESIS)
- Fahurah F, Armin Basong, Hermansyah H.Tagala. *Judul Identifikasi faktor yang mempengaruhi nilai jual lahan dan bangunan pada perumahan tipe sederhana*, Jurnal SMARTek Vol8 No 4 Nopember 2010 hlm 251-269
- Gumilar Rusliwa Soemantri, *Memahami Metode Kualitatif*, Sosial Humaniora Vol 9 No 2, Desember 2005:57-65 Universitas Indonesia, Depok
- Hijrah Saputra, Teori keamanan nasional, mata kuliah Teori Keamanan Internasional konsentrasi Keamanan Internasional. Universitas Indonesia, 2012
- Levana Apriani,Bambang Edhi Leksono, *Pengembangan model nilai tanah dengan Geographically weighted regression (GWR) dalam pengujian kualitas nilai tanah pada lingkungan terpengaruh keberadaan transportasi darat dan udara,(studi Kasus:Kelurahan Cempaka, Kecamatan Andir,Kota Bandung)* Jurnal Pendidikan Geografi, Volume 16, Nomor 2, Oktober 2016.
- Mitha Andini Setiawati, Djakaria M.Nur. Ahmad Yani *Respon masyarakat Terhadap Rencana pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka*, Jurnal Analogi Pendidikan Geografi,Volume 1, Nomor 2, September 2013
- Rudi Susilana Drs. Penelitian Kualitatif, Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan FIP-UPI
- Tri Tjahjono dan Eny Yuliawati, *Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) dan potensi Kertajati sebagai Aerocity*, Jurnal Perhubungan udara, Jakarta Pusat 31 Juli 2017
- Waluyo Zulfkar dan Yayat Rukayat, *Dampak sosial, Ekonomi dan Politik dalam pembangunan Bandara Udara Kertajati di Kabupaten Majalengka*, Universitas Nurtanio Bandung , Terdapat dalam Jurnal Sosiohumaniora, Volume 19 No.3 Nopember 2017:225-23

Sri Wahyuni, *Strategi Pemerintah Indonesia dalam penyelesaian Konflik Klaim Traditional Fishing Ground pada zona ekonomi Eksklusif Indonesia di Perairan Natuna oleh republic Rakyat Tiongkok*, Tesis. Universitas Pertahanan, Bogor 2018

Sulistyo, Adi *Ancaman Asimetris terhadap sistem Pertahanan negara dalam sudut pandang pertahanan Nir-Militer* , Symmetric Warfare Study Program, Faculty of Defense Strategy Indonesia Defense University. Jakarta September 2013

Wirawan, Ervan , *Konflik Pembebasan Tanah pembangunan jalan tol Jombang-Mojokerto Studi Desa Watukadon Kabupaten Jombang* 2017 pada jurnal Jurnal Politik Muda, Vol.6, No.1, Januari –Maret 2017

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/LAINNYA

Buku Putih Pertahanan Negara. 2015

Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka, 2017, Kabupaten Majalengka dalam Angka, Majalengka *Regency in Figures*

BAPPENAS , Rencana Pemerintah Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025

Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 5 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pertahanan No 16 Tahun 2012

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

Universitas Pertahanan, Buku Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi, Universitas Pertahanan Press, Bogor 2017

INTERNET

Fiki Ariyanti, Liputan 6 judul 10 Fakta Menarik soal Bandara kertajati di Majalengka melalui situs <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3537128/10-fakta-menarik-soal-bandara-kertajati-di-majalengka> tanggal 24 Mei 2018

Anugrah Perkasa, CNN Indonesia , 9 Agustus 2016, dengan judul BPN Ukur Tanah hari ini, Petani Majalengka siaga <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160809082804-20-150071/bpn-ukur-tanah-hari-ini-petani-majalengka-siaga>?

Huriyatul Akmal, Pengantar Resolusi Konflik , 24 November 2012, di ambil dari situs <https://www.scribd.com/doc/114250614/Pengantar-Resolusi-Konflik>

Konflik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/konflik>

Situs www.kpu.go.id/koleksigambar/Visi_Misi_JOKOWI-JK.pdf

<http://pusbindiklatren.bappenas.go.id/file/bukuterbit/SIMPUL%20Vol.%2029%20-%20April%202017.pdf>

http://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2007/km_no_5_tahun_2007.pdf

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180524114909-92-300911/pembangunan-bandara-kertajati-mangkrak-sejak-era-megawati>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160809082804-20-150071/bpn-ukur-tanah-hari-ini-petani-majalengka-siaga>

<http://www.kpa.or.id/news/blog/warga-sukamulya-menolak-pembangunan-bjib/>

<https://properti.kompas.com/read/2016/11/21/084411721/pembebasan.lahan.bandara.kertajati.dianggap.melanggar.uu>

<https://www.scribd.com/doc/114250614/Pengantar-Resolusi-Konflik>

http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/688/jbptunikompp-gdl-widiyawati-34385-5-unikom_p-i.pdf

<https://www.project-syndicate.org/columnist/joseph-e--stiglitz>

Situs Berita lingkungan Mongabay
<http://www.mongabay.co.id/2016/11/18/begini-bentrok-warga-saat-pembebasan-lahan-bandara-internasional-jawa-barat-kertajati/> Oleh Donny Iqbal, Begini Bentrok warga saat pembebasan Lahan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati, 18 November 2016,

Kompas .com oleh Arimbi Ramadhiani, 21 Nopember 2016
<https://properti.kompas.com/read/2016/11/21/084411721/pembebasan.lahan.bandara.kertajati.dianggap.melanggar.uu>, di Akses pada tanggal 12 Juli 2018

<https://majalengkakab.bps.go.id/>, Diakses September 2018

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161119164948-20-173810/petani-majalengka-ketakutan-utusan-istana-turun-tangan?>



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl.KSR. Dadi Kusmayadi Komplek Pemda Kel. Tengah Cibinong-Bogor 16914 Telp/Fax. (021) 8758836

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / 1226 -Kesbangpol

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. H. SUJANA AZHARI**
Jabatan : **Plh. Kepala Seksi Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor**

Berdasarkan surat : Wakil rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan –
Universitas Pertahanan Nomor B/2170/VIII/2018 Tanggal : 31 Agustus 2018 perihal :
Permohonan Izin Penelitian Wawancara dan Permintaan Data.

Dengan ini menerangkan :

a.	Nama	Suri Lesmanawati
c.	Pekerjaan	Guru
d.	Alamat	Griya Bukit Jaya Blok M. 14/33 Kel. Tlajung Udik Kec. Gunung Putri
e.	Peserta	1 (satu) Orang
f.	Maksud	Penelitian
g.	Judul Penelitian	Resolusi Konflik Pembebasan Lahan Pertanian Untuk Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka
h.	Penanggung jawab	Prof. Dr. Ir. Dadang Gunawan, M. Eng
i.	Lokasi	Kabupaten Majalengka
j.	Lembaga/instansi yang dituju	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas seperlunya.

Demikian surat keterangan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan berlaku
Sampai **Desember 2018**.

Cibinong, 13 September 2018



A.n. KEPALA
Plh. Idwasbang

Drs. H. SUJANA AZHARI
Pembina
NIP. 196703011993031003

Tembusan : Kepada

- Yth. 1. Bupati Bogor (Sebagai Laporan)
2. Warek I BAK – UNHAN



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan K.H Abdul Halim No. 109 Kode Pos 45411 Telepon/Fax (0233) 282511

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 071 / 86 / Kesbangpol

1. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka, dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Berdasarkan Surat dari : An. Rektor Universitas Pertahanan Warek I Bid Akademik dan Kemahasiswaan Nomor : B/2170/VIII/2018 Tanggal 31 Agustus 2018 Perihal : Permohonan Izin Penelitian, Wawancara dan Permintaan Data

Dengan ini menerangkan bahwa :

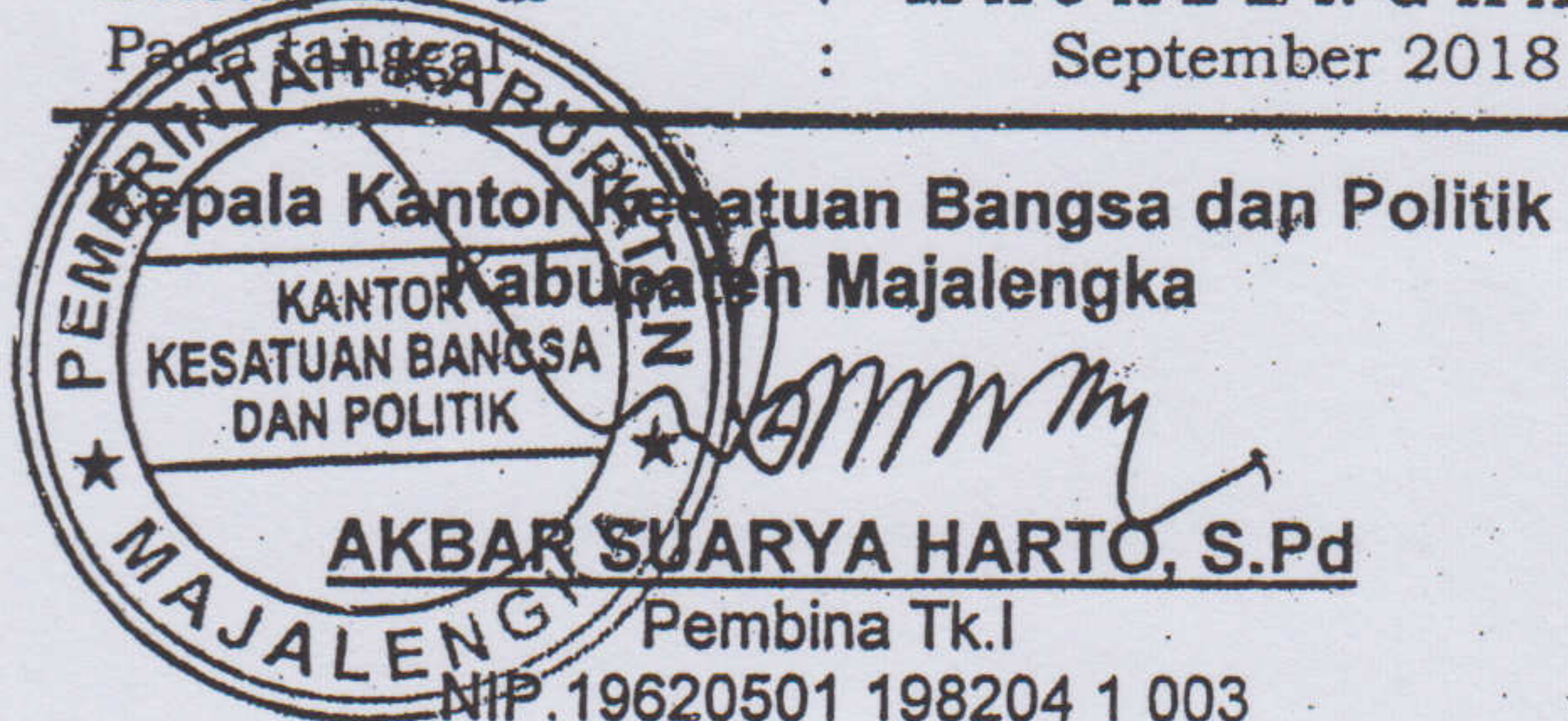
- a. Nama : **SURI LESMANAWATI**
- b. Tempat Tanggal Lahir : Bogor, 28 Oktober 1977
- c. NPM/NIM : 120170303030
- d. Agama : Islam
- e. Pekerjaan : Guru
- f. Alamat : Griya Bukit Jaya Blok M 14/33 Rt. 001 Rw. 030 Kel/Desa. Tlajung Udik Kec. Gunung Putri Kab. Bogor
- g. Tujuan : Penelitian
- h. Judul Penelitian : **RESOLUSI KONFLIK PEMBEBASAN LAHAN PERTANIAN UNTUK PEMBANGUNAN BANDARA INTERNASIONAL JAWA BARAT (BIJB) DI KECAMATAN KERTAJATI KABUPATEN MAJALENGKA**
- i. Lokasi Penelitian : Wilayah Kecamatan Kertajati Kab. Majalengka

2. Rekomendasi ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Hanya bagi kegiatan pendahuluan atau bahan penelitian ;
- Mentaati ketentuan yang berlaku ;
- Setelah tiba dilokasi dan sebelum melaksanakan penelitian harus melapor diri ke Instansi setempat dengan menunjukan surat ini ;
- Harus memperhatikan keamanan dan ketertiban umum selama kegiatan berlangsung ;
- Harus memperhatikan adat istiadat setempat ;
- Rekomendasi penelitian ini berlaku mulai : **25 September 2018 s/d 30 Desember 2018**

3. Setelah melaksanakan kegiatan penelitian agar melaporkan kepada Bupati Majalengka Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka berbentuk **Hard Copy dan Soft Copy**

Ditetapkan di : **MAJALENGKA**
Pada tanggal : **September 2018**



Tembusan : disampaikan kepada :

- 1. Yth. Bupati Majalengka (**sebagai laporan**)
- 2. Yth. Kepala Bappelitbangda Kab.Majalengka
- 3. Yth. Dandim 0617 Majalengka dan Danramil 1715 Kertajati Kab. Majalengka
- 4. Yth. Kapolres Majalengka dan Kapolsek Kertajati Kab. Majalengka
- 5. Yth. Kepala BPN Majalengka
- 6. Yth. Kepala BPS Kab. Majalengka
- 7. Yth. Kepala Satpol PP Kab. Majalengka
- 8. Yth. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Majalengka
- 9. Yth. Kepala Dinas Pertanian Kab. Majalengka
- 10. Yth. Camat Kecamatan Kertajati Kab. Majalengka
- 11. Yth. Kepala Kantor LBH Kab. Majalengka
- 12. Yth. Ketua Konsorsium Pembaharuan Agraria Kab. Majalengka
- 13. Yth. Tokoh Agama Majalengka dan Tokoh Masyarakat
- 14. Yth. Rektor Universitas Pertahanan Warek I Bid Akademik dan Kemahasiswaan

LAMPIRAN

Pedoman wawancara narasumber

No	Narasumber	Jabatan/ Instansi	Pertanyaan Penelitian
1	Aris Budiyanto, S.ST.,M.Si	Kepala BPS	1. Bagaimana kondisi warga masyarakat menurut bapa sebagai kepala BPS karena sekarang lahannya sudah beralih fungsi ? 2. Bagaimana dan apa yang sekiranya bapak ketahui sebagai kepala Badan Pusat Statistic, tentang fenomena rumah hantu yang memang banyak berdiri di lahan warga yang lahan tersebut akan dibebaskan ? 3. Bagaimana dengan tingkat kesejahteraan yang ada di kabupaten Majalengka khususnya di Kecamatan Kertajati setelah adanya pembangunan Bandara Internasional jawa Barat ini ? apakah sudah terlihat kemajuan dalam kesejahteraan masyarakat?

2	Aep	Kepala Sie IDPS	1. Bagaimana dengan statistik kecamatan kertajati yang saat ini sudah ada bandara, khususnya dalam peningkatan kesejahteraan? 2. Ada beberapa penolakan dari warga sekitar yang tidak menyetujui bahwa lahannya di bebaskan untuk bandara, menurut bapak sebagai orang yang terjun langsung kemasyarakat dalam pendataan ini bagaimana? 3. Menurut data statistik yang ada bagaimanakah kondisi Lahan pertanian apakah memang benar bahwa disana termasuk lahan yang tandus sehingga pemerintah memilih kertajati sebagai salah satu bandara yang dikembangkan ? 4. Apakah ada perubahan kesejahteraan dari sebelum dan setelah pembangunan bandara menurut badan pusat statistik kabupaten majalengka, walaupun tadi seperti yang bapak bilang memang belum signifikan artinya tetap ada atau bagaimana ?
2.	H. Tatan Hartono BE,S.H	Direktur LBH Kab. Majalengka	1. Bagaimana pembebasan lahan yang dilakukan untuk bandara kertajati, menurut bapak sebagai direktur Lembaga Bantuan Hukum kabupaten Majalengka bagaimana melihat kondisi ini? 2. Apakah pernah ada laporan atau meminta bantuan hukum ke kantor bapak dari warga sekitar bandara tentang penggusuran yang mereka

			alami ? 3. Bagaimana dengan konflik-konflik yang terjadi dalam pembebasan lahan yang bapak ketahui? 4. Untuk Proses pengukuran yang pernah terjadi di tahun 2016 yang mencuat konflik di sukamulya bagaimana pendapat bapak sejauh mana dari lembaga hukum memahami hal ini? 5. Setelah konflik sejauh apa dari badan hukum ikut menangani hal ini, kemudian apakah kondisi damai sekarang ini bisa di laksanakan? 6. Apakah pembebasan lahan pada saat ini sudah selesai saat ini ? dan menurut bapak yang terjadi konflik kemarin apakah sudah selesai ? 7. Dalam konflik yang terjadi kemarin, Ada warga yang diamankan, sejauh mana LBH membantu hal tersebut?
3.	Akbar Suarya Harto,S.Pd.	Kepala Kesbangpol Kab. Majalengka	1. Pada saat pengukuran lahan yang di lakukan oleh BPN pada tahun 2016, Bagaimana konflik tersebut bisa terjadi? dan bagaimana dengan kronologisnya? 2. Menurut bapak sebagai kepala kesbangpol bagaimana kondisi atau keadaan yang sekarang ini setelah 2 tahun berjalan pasca konflik terjadi? 3. Menurut bapak sebagai kepala kesbangpol proses kedepannya

			bagaimana dgn masyarakat yang sampai saat ini masih kontra ? Menurut bapa dengan Bambang CS ini akan mau mengalah? 4. Dalam banyak yang kita ketahui dalam hal pengadaan tanah biasanya ada makelar tanah , atau spekulasi-spekulasi, menurut bapak Untuk makelar tanah sendiri bagaimana? apakah dalam hal ini ada dan bisa merupakan pemicu konflik juga ? 5. Apakah memang lahan yang dibebaskan itu merupakan lahan tandus? karena ada juga yang bilang lahan tersebut adalah lahan subur
4.	Deddy	Kepala Bagian Ketertiban Umum Satpol PP	1. Bagaimana awalnya konflik terjadi di desa Sukamulya pada bulan Nopember 2016? 2. Apa yang menjadi faktor-faktor penyebab konflik? 3. Apakah pada saat pengukuran memang harus menurunkan aparat untuk proses tersebut ? Dan apa yang dilakukan sat pol pp menghadapi kondisi dilapangan ketika bentrokan terjadi ? 4. Bagaimana Kondisi wilayah tersebut pasca bentrokan terjadi dengan aparat ?
5.	Aminudin,S.Sos.,M.M	Camat Kertajati	1. Bagaimana kondisi di kecamatan Kertajati pada tahun 2018, Khususnya pada Kecamatan Kertajati yang mana pernah terjadi

			konflik pada bulan Nopember tahun 2016? 2. Bagaimana Konflik itu sendiri terjadi pada tahun 2016? dan factor-faktor apa yang memang menjadi pemicu konflik tersebut? 3. Pada saat konflik itu terjadi, dari bapak sebagai camat apa yang dilakukan untuk menenangkan kondisi yang ada ? 4. Sebetulnya dari kondisi bandara sekarang ini berapa hektar lagi lahan warga yang masih akan di bebaskan untuk pembangunan bandara? 5. Bagaimana dengan Fenomena Rumah hantu yang memang banyak sekali di bangun warga? 6. Apakah menurut bapak dengan tidak dibayarnya rumah hantu itu akan memicu konflik yang ada di masyarakat ? 7. Untuk masyarakat yang saat ini masih kontra walaupun memang jumlahnya sudah minoritas, Tindakan apa yang akan bapak lakukan sebagai camat kertajati? 8. Mulai kapan demo-demo dilakukan dalam upaya pembebasan lahan tersebut? 9. Sampai hari ini bagaimana, apakah pengukuran sudah selesai dilaksanakan ? 10. Apakah kemungkinan ada solusi untuk yang masih kontra yaitu
--	--	--	--

			relokasi misalnya?
6.	Letkol Arm Novi Herdian,S.H.,M.M.	DANDIM 0617/ Majalengka	1. Secara garis besar bagaimana menurut bapak sebagai komandan kodim dengan kondisi kabupaten majalengka sendiri terkait dengan pembangunan bandara yang dilakukan pemerintah ? 2. Bagaimana dengan upaya pembebasan lahan yang di lakukan, sejauh mana Kodim sebagai keamanan ikut berperan serta aktif didalamnya ? 3. Setelah masuk tahun 2018 ini dengan penekanan yang bapak lakukan dengan pihak BPN apakah seluruh proses pembebasan lahan sudah dilaksanakan ? 4. Apakah ada komunikasi dari pihak pemerintah sudah mensosialisasikan dengan baik kepada masyarakat , Bagaimana kodim sejauh ini mencoba menjembatani ? 5. Menurut bapak apakah sosialisasi yang dilakukan sudah berjalan sebagaimana mestinya, dan juga bagaimana kondisi yang ada sekarang pasca konflik terjadi ? 6. Dari pantauan intel kodim yang di tempatkan di daerah tersebut menurut bapak kira-kira ada berapa Kepala Keluarga lagi yang menolak? 7. Untuk Bambang Cs sendiri itu menurut pantauan bapak bagaimana?

			8. Apakah sekarang menurut bapak kondisi akan terjadinya konflik kembali muncul? Seiring dengan masih adanya beberapa masyarakat yang bersikukuh dengan keinginan mereka? 9. Sejauh mana Kodim ikut berperan serta aktif menjaga situasi yang sudah kondusif agar tetap terjaga kondusif hingga waktu yang akan datang ? 10. Bagaimana proses resolusi konflik yang dilakukan pasca konflik terjadi di wilayah kertajati ? 11. Apakah ketika akan melakukan pengukuran dari Pihak BPN selalu berkoordinasi dengan Kodim?
7.	Dede Kusnadi	PASI INTEL KODIM 0617/ Majalengka	1. Bagaimana kondisi yang terjadi konflik pada saat pengukuran tanah untuk pembangunan bandara, Factor apa saja menurut intel kodim yang membuat masyarakat menolak pembangunan bandara ? 2. Bagaimana posisi dari kodim sendiri ketika pasca konflik terjadi ? ataupun tindakan- tindakan apa yang dilakukan TNI atau kodim pada khususnya. 3. Mengapa banyak aparat yang di kerahkan pada saat pengukuran lahan yang di lakukan pihak BPN pada bulan Nopember 2016 ? dan sejauh mana sistem pembebasan itu dilakukan?

			4. Mengapa sampai terjadi penembakan gas air mata? apakah yang memicu hal tersebut sepengetahuan bapak sebagai intel kodim ? 5. Bagaimana pembangunan bandara telah berjalan sampai saat ini, menurut pandangan bapa sebagai intel di Kodim ?
8.	Isha	Anggota INTEL KODIM 0617 /Majalengka	1. Bagaimana kondisi sekarang yang ada di seputar desa sukamulya yang mana sampai saat ini pembangunan bandara kertajati terus berlanjut ? 2. Bagaimana dengan kejadian dan pelaksanaannya? Apakah ada demo lagi yang dilakukan warga terlebih kepada warga yang kontra ? 3. Apakah pengukuran itu terus dilanjutkan padahal ada warga yang tidak setuju ? 4. Menurut bapak sebagai petugas intel yang di tempatkan di desa tersebut apa yang membuat beberapa masyarakat sekarang masih belum mau tanahnya untuk di bebaskan? 5. Apakah mungkin ada spesifikasi untuk rumah hantu yang akan di bayarkan oleh pemerintah? 6. Sekarang ini apa yang dilakukan untuk menjaga paling tidak kondisi yang rata-rata sudah mulai kondusif tetap stabil, walaupun memang ada beberapa warga yang masih belum menerima kondisi ini?

			7. Setelah kejadian gas air mata itu bagaimana kondisi dilapangan ? dan apa yang telah dilakukan untuk meredam kondisi tersebut?
9.	AKP H. Tatang	Kapolsek Kertajati	1. Bagaimana dari bapak sebagai Kapolsek dalam menanggapi penolakan warga dalam pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat? 2. Bagaimana tentang Faktor-faktor konflik yang terjadi pada bulan Nopember 2016? Bisa bapak ceritakan? 3. Bagaimana dengan kondisi bagi masyarakat yang sudah menerima dan yang belum menerima pembangunan bandara ini ? apakah ada pihak-pihak tertentu yang ikut memediasi hal ini ? 4. Menurut bapak apakah konflik yang terjadi di masyarakat pada waktu itu memang betul-betul masyarakat Kecamatan Kertajati atau ada susupan dari pihak luar yang memiliki kepentingan? Bagaimana menurut bapak? 5. Bagaimana Peran Polisi dalam hal ini dari wilayah polsek sendiri ? 6. Bagaimana dengan Upaya negosiasi yang dilakukan berbagai pihak terkait dalam upaya membangun perdamaian di wilayah kertajati ? 7. Apakah ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan terkait dengan alih fungsi lahan yang terjadi?

10.	Nono Darsono,S.H	Kepala Desa Sukamulya	1. Bagaimana tanggapan dari warga masyarakat sendiri mengenai pembangunan bandara yang mengharuskan meninggalkan lahan dan pemukiman? 2. Selama ini menurut bapak sebagai kepala desa Sukamulya sendiri apakah ada dari pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan didalamnya seperti ada gerakan yang memotori masyarakat untuk menolak kondisi ini? 3. Apakah sebelumnya sosialisasi dilakukan dengan baik oleh pemerintah? 4. Bagaimana dengan fenomena rumah hantu yang ada/ apakah ini merupakan salah satu penyebab konflik juga, da nada berapa banyak masyarakat yang boleh di bilang kontra? 5. Menurut bapak sebagai kepala desa Sukamulya apa yang seharusnya dilakukan untuk mengatasi hal ini agar tidak kembali terjadi konflik? 6. Menurut bapak bagaimana tentang alih fungsi lahan yang pastinya akan berdampak kepada para petani yang tidak bisa lagi menggarap lahan di desa Sukamulya? 7. Apakah dari pemerintah daerah sendiri mengadakan pelatihan-pelatihan terkait alih fungsi lahan yang tadinya petani kemudian harus
-----	------------------	-----------------------------	--

			berubah dalam keseharian?
11.	Ulis	Sekretaris Desa Sukamulya	1. Apa yang dilakukan perangkat desa pasca konflik terjadi waktu tahun 2016 lalu, dalam menjaga warga masyarakat agar tidak kembali terpicu konflik lain? 2. Bagaimana perangkat desa menghadapi kondisi masyarakat yang sampai saat ini masih kontra ? 3. Apakah masyarakat saat ini berada hanya pada dua posisi yaitu pro dan kontra saja? Dan apakah warga desa menolak pembangunan bandara? 4. Apakah ada kegiatan sosialisasi yang dilakukan di desa sukamulya mengenai tahapan-tahapan dalam pembebasan tanah? 5. Untuk daerah Sukamulya sendiri ini yang terkena dampak pembangunan, apakah untuk bandaranya atautkah untuk aeorcitynya? 6. Apa mungkin butuh proses dan akan masuk kedalam anggaran APBN ? dan apa yang dilakukan pemerintah mengenai hal ini? 7. Bagaimana perangkat desa menghadapi kondisi pada saat bentrokan terjadi ? 8. Bagaimana kondisi yang sekarang setelah dua tahun berlalu? dan sampai saat ini berapa kepala keluarga kira-kira yang masih kontra?

			9. Apa upaya yang dilakukan perangkat desa untuk menampung aspirasi masyarakat? 10. Bagaimana harapan warga desa sukamulya setelah kejadian ini ? 11. Dari PT BIJB bagaimana, apakah ada beberapa kebijakan dalam hal lowongan pekerjaan untuk masyarakat yang terdampak bandara? 12. Sampai saat ini yang kontra belum ada tindak lanjut lagi ? ada potensi konflik lagi ? 13. Untuk lahan pertanian di desa ini berapa kali bisa panen dalam satu tahun? Apakah benar ini memang lahan tandus? 14. Apakah ada pelatihan-pelatihan yang disediakan oleh pemerintah mengingat banyak warga yang akan berubah profesinya karena laih fungsi lahan?
12.	Nunang	Kepala Bagian pengadaan Tanah BPN	1. Bagaimana proses yang dilakukan BPN sebagai instansi bagian pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara Kertajati ? 2. Bagaimana dengan harga yang telah di tetapkan? Apakah yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur yang seharusnya yang mana hal ini tidak merugikan masyarakat yang terdampak pembangunan? 3. Apakah dalam pelaksanaan pengukuran selalu melibatkan aparat keamanan karena kondisi yang sampai saat ini masih ada masyarakat

			yang belum bersedia lahannya untuk di bebaskan ? 4. Dalam hal yang menyangkut dengan pengukuran lahan yang dilakukan oleh BPN, Menurut bapak bagaimana kondisi masyarakat sekarang ini? 5. Bagaimana tahapan-tahapan yang dilakukan pihak BPN dalam pengadaan tanah untuk kepentingan bandara ini ? 6. Bagaimana peran BPN melakukan pengukuran dalam Pembangunan bandara Kertajati? 7. Bagaimana tahapan yang dilakukan terhadap pengukuran di karenakan ada beberapa warga masyarakat yang masih menolak tanah nya untuk di ukur ? 8. Bagaimana untuk pembayaran yang dilakukan terhadap warga masyarakat yang terdampak pembangunan bandara ? 9. Apakah dalam sosialisasi kepada warga masyarakat sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada ? 10. Apakah pihak BPN telah melakukan semua itu sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan?
13.	Bambang Nurdiyansyah, S.Pd	Warga Desa Sukamulya	1. Bagaimana kondisi Desa Dukamulya saat ini ? Apakah ada kegiatan pengukuran lagi yang dilakukan ataukah ada musyawarah yang di

			laksanakan ? 2. Apakah sebelumnya pernah ada sosialisasi yang dilakukan dalam pembebasan lahan tersebut? 3. Apakah sebelum bentrokan 2016 ada bentrokan yang skalanya kecil? atau gesekan-gesekan dengan beberapa pihak misalnya ? 4. Setelah kondisi yang kita tahu bahwa bandara ini telah di resmikan oleh presiden Joko Widodo apakah sudah tuntas masalah tersebut ? 5. Bagaimana Proses penggantian yang sudah dilakuakn untuk warga yang memang sudah pro dan bersedia lahannya untuk di bebaskan ? 6. Ada berapa kepala Keluarga kira-kira pada waktu itu ? 7. Perjuangan apa saja yang telah dilakukan masyarakat Sukamulya, khususnya yang kontra untuk tetep mempertahankan lahannya ? 8. Bagaimana kronologi kejadian bentrok pada bulan Nopember 2016 yang lalu? bisa bapak ceritakan ? 9. Kemudian apa yang terjadi setelah malam berlalu? apakah ada bentrokan lagi setelah itu ? 10. Mengapa bisa melibatkan staf kepresidenan pa ? Apakah mereka melakukan upaya negosiasi atau mediasi? 11. Setelah kondisi, Sekarang-sekarang ini apakah yang dilakukan oleh
--	--	--	---

			pemerintahan Desa Sukamulya? 12. Bagaimana dengan masyarakat yang sudah pro, dan sudah di bebaskan lahannya ? Apakah kehidupannya lebih baik dari sebelumnya? 13. Sekarang berubah alih fungsi lahan dan tidak punya keahlian lain, apakah dari pemerintah pernah menawarkan ada semacam pelatihan untuk masyarakat karena beralihnya fungsi lahan? 14. Apakah lahan pertanian di Sukamulya termasuk lahan yang tandus ? dan bagaimana kondisi warga sukamulya dalam keseharian? 15. Menurut bapak bagaimana kondisi saat ini, seberapa optimis bapa dan warga yang kontra lainnya untuk mempertahankan lahan ini ? 16. Mengapa desa lain tidak seperti desa Sukamulya yang masih mempertahankan lahannya, sedangkan desa lain sudah terbebaskan semua ? 17. Apa yang akan dilakukan dengan tuntutan warga yang kontra, terhadap tuntutan jika tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah ? 18. Apakah dalam waktu dekat sudah ada musyawarah kembali yang dilakukan untuk mempertahankan hal ini ?
14.	Sopiah	Warga Desa	1. Berapa lahan yang ibu punya yang terkena dampak bandara ?

		Sukamulya	2. Tahun berapa mulai ada gusuran dan di bayarkan? dan bagaimana penerimaan warga terhadap akan terkena gusurannya? 3. Apakah dalam waktu dekat ini ada yang akan di bayarkan lahan maupun rumah dari pemerintah? 4. Ibu ada rencana pindah kemana setelah lahan ibu di bayarkan semua ? 5. Berapa harga yang di bayarkan oleh pemerintah ? jika ibu pindah apakah masih bisa mencukupi dana yang ada ? 6. Apakah masyarakat yang kontra masih banyak? dan bagaimana bentrokan terjadi? 7. Menurut ibu bagaimana kesiapan masyarakat desa untuk pindah dari wilayah ini? 8. Apa benar Desa Sukamulya ini termasuk lahan yang tandus? 9. Menurut ibu sejauh mana kepaladesa memperjuangkan warganya? 10. Setelah kejadian di Nopember 2018 bagaimana kondisi warga, Apakah ada upaya yang dilakukan misalnya adat istiadat yang digunakan? 11. Bagaimana kegiatan dan kondisi desa sukamulya sekarang yang mana desa –desa lain sudah tidak ada lagi ?
--	--	-----------	---

			12. Apakah pernah ada sosialisasi yang dilakukan yang kaitannya dengan rencana pembayaran yang akan dilakukan? 13. Bagaimana dengan fenomena rumah hantu yang ibu ketahui ?
15.	Drs. Eddy Noor Sudjatmiko, M.Si	Kepala Bapelitbangda	1. Bagaimana dengan adanya konflik pembebasan lahan warga untuk pembangunan bandara BIJB yang bapak ketahui sebagai kepala Bapelitbangda ? 2. Berapa hektare lahan yang akan di bebaskan oleh pemerintah untuk proyek strategis nasional ini ? dan termasuk dalam anggaran pemerintah daerah atau provinsi? 3. Menurut bapak bagaimana kondisi Desa Sukamulya saat ini bagaimana? apakah tergolong aman jika saya melakukan penelitian ke wilayah tersebut ? 4. Menurut bapak bagaimana seharusnya mengupayakan agar konflik lain tidak kembali terjadi yang akan berhubungan dengan ekonomi yang ada di masyarakat? 5. Untuk masyarakat yang sudah terdampak pembangunan bandara, dalam arti masyarakat yang lahannya sudah di bayarkan oleh pemerintah pindah lokasi yang baru, Menurut bapak bagaimana tingkat kesejahteraannya sekarang ini?

			6. Apa yang dilakukan Bapelitbangda dalam mengatasi kondisi yang sekarang ini untuk menghadapi perekonomian masyarakat majalengka? 7. Bukankah dengan industri dan pabrik-pabrik yang masuk akan banyak menyerap tenaga kerja? 8. Apakah pembangunan bandara ini sudah terlihat meningkatnya perbaikan ekonomi di wilayah Majalengka, Bagaimana menurut bapak? 9. Apakah ada bentuk pelatihan yang dilakukan oleh perusahaan PT BIJB untuk memberi ruang kepada masyarakat yang terdampak bandara? 10. Menurut bapak selain solusi yang tadi sudah disebutkan kira-kira apalagi yang dapat dilakukan untuk meminimalisi konflik ekonomi yang akan terjadi ? 11. Untuk dokumen peta dan lain-lain terkait dengan bandara apakah Bapelitbangda di ikutsertakan dalam perencanaan yang ada ? 12. Menurut bapak sejauh mana optimis perekonomian majalengka akan berkembang ? dan persiapan yang dilakukan Majalengka dalam menghadapi tingkat perekonomian ini
--	--	--	--

			13. Bagaimana tanggapan bapak mengenai bandara yang memang sudah ada wacana dari tahun 2005 dan tidak juga terealisasi hingga lebih dari 10 tahun terakhir ? 14. Dalam konflik yang terjadi pada bulan Nopember khususnya di Desa Sukamulya melibatkan Staf kepresidenan, Apa yang bapak ketahui dengan hal ini? 15. Seberapa optimis bapak dengan kondisi ini dalam memperjuangkan ke pemerintah provinsi untuk vasum yang belum direalisasikan ? 16. Tanah yang ada di wilayah Majalengka sudah banyak dimiliki oleh investor dari luar, Bagaimana menurut bapak jika dari investor tersebut justru membangun pabrik-pabrik di area seputaran bandara?
16.	H. Achmad Diki, M.M.	Sekretaris Daerah Kab. Majalengka	1. Mengapa bandara ditetapkan di majalengka, factor-faktor apa saja sehingga terpilih di Kabupaten Majalengka ini, dan berapa desa yang terdampak? 2. Apakah pembebasan lahan sudah melalui proses yang seharusnya ? 3. Sejauh mana komunikasi pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi dalam terkait dengan pembangunan bandara? dan apa yang dilakukan pemerintah daerah dalam menghadapi perubahan pembangunan di Majalengka?

			4. Bagaimana konflik bisa terjadi di dalam pengukuran untuk lahan bandara? Apakah sosialisasi terlebih dahulu sudah dilakukan? 5. Apa yang menjadi pemicu warga masyarakat yang tidak bersedia lahannya di bebaskan untuk kepentingan bandara? 6. Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam menjaga kondisi yang sudah mulai kondusif dalam 2 tahun ini pasca konflik terjadi?
17.	Nadia Maulina	Finance and Administration staff	1. Apakah ada pelatihan-pelatihan khusus yang dipersiapkan oleh PT BIJB untuk membantu masyarakat yang lahannya beralih fungsi ? 2. Bantuan apa sajakah yang diberikan oleh pihak BIJB terhadap warga sekitar yang terdampak pembangunan bandara ? 3. Apakah ada kesepakatan khusus antara PT BIJB dengan warga masyarakat desa sukamulya terhadap pembangunan bandara? 4. Bagaimana komitmen dari PT BIJB untuk membantu warga masyarakat khususnya dalam lowongan pekerjaan ? 5. Apa yang dilakukan pihak BIJB jika ada keluhan warga masyarakat terkait dengan pembangunan Bandara BIJB Kertajati ?

LAMPIRAN
DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka



Wawancara dengan Perangkat Desa Sukamulya Kec. Kertajati



Warga Desa Sukamulya di kantor Staf Kepresidenan RI



**Pertemuan di Balai Desa Sukamulya berkenaan dengan
penyelesaian konflik lahan**



Wawancara dengan Kepala Kesbangpol Kab. Majalengka



Wawancara dengan Kepala Badan Pusat Statistik Kab.Majalengka



Wawancara dengan Lembaga Bantuan Hukum Kab. Majalengka



**Wawancara dengan Kasubbag Pengadaan Tanah BPN
Kabupaten Majalengka**



Wawancara dengan Satpol PP Kabupaten Majalengka



Wawancara dengan masyarakat Desa Sukamulya



**Aparat keamanan dan Warga Masyarakat
pada saat pengukuran akan dilaksanakan**



Aparat pengamanan disiagakan di Lokasi Pengukuran



Dayak Indramayu yang ikut bergabung kedalam kelompok Massa di Desa Sukamulya



Aksi penolakan warga Desa Sukamulya



Aksi penolakan warga masyarakat



Aksi penolakan warga masyarakat



Pertemuan Warga dan kepala desa dalam acara silaturahmi dan mendengarkan aspirasi dan keinginan warga masyarakat



Suasana kekeluargaan warga Desa Sukamulya dalam melestarikan budaya kearifan lokal



**Wawancara dengan kepala Desa Sukamulya
Kecamatan Kertajati**



Wawancara dengan Dandim 0617/Majalengka



Tampak Luar Bandara BIJB Kertajati



Pintu masuk kawasan Bandara BIJB Kertajati



Wawancara dengan Pasi Intel Kodim 0617/Majalengka



Wawancara dengan Kaplosek Kertajati



**Wawancara dengan Kepala Bapelitbangda
Kab. Majalengka**



Wawancara dengan Camat kertajati



Acara keagamaan di Desa Sukamulya



**Suasana kekeluargaan warga Desa Sukamulya
dalam melestarikan budaya kearifan lokal**



**Suasana kekeluargaan warga Desa Sukamulya
dalam melestarikan budaya kearifan lokal**



**Suasana kekeluargaan warga Desa Sukamulya
dalam melestarikan budaya kearifan lokal**



Bantuan PT BIJB dalam memperingati idul Qurban dengan melombakan hewan qurban yang diberikan kepada perwakilan masyarakat, Qurban Idol BIJB 2018



Bantuan PT BIJB dalam memperingati idul Qurban dengan melombakan hewan qurban yang diberikan kepada perwakilan masyarakat, Qurban Idol BIJB 2018